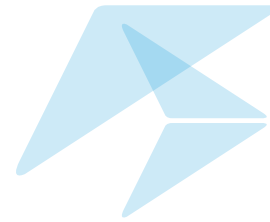




KEMENTERIAN KEUANGAN  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL



# KAJIAN DANA DESA

Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa,  
Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur  
Pada Seribu Desa Di Indonesia



Kerja Sama Penelitian Antara  
Badan Kebijakan Fiskal Dan  
Politeknik Keuangan Negara STAN  
Kementerian Keuangan





# **KAJIAN DANA DESA**

**Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa,  
Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur  
Pada Seribu Desa Di Indonesia**

**BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
2018**

# KAJIAN DANA DESA

## Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia

© 2018, Badan Kebijakan Fiskal dan Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan

Desember 2018

### Pengarah:

Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

### Penanggung Jawab:

Hidayat Amir (Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal), Basuki Purwadi (Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal), Rahmadi Murwanto (Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN), Tanda Setiya (Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Politeknik Keuangan Negara STAN), dan Agunan Paulus Samosir (Koordinator Peneliti Badan Kebijakan Fiskal)

### Tim Penulis:

Irwanda Wisnu Wardhana, Bondi Arifin, Maman Suhendra, Eko Wicaksono, Acwin Hendra Saputra, Rita Helbra Tenrini, I Gede Agus Ariutama, Praptono Djuned, Akhmad Solikin, Sofia Arie Damayanty, Hadi Setiawan, Rudi Handoko, dan Arif Budi Rahman

### Kontributor Validasi Kuisisioner & Asisten Pelatihan Surveyor:

Shobibur Rohman Ghiffari, Adhi Rifqi Mubarak, Oktava Nur Nur Aji Setiadi, Farhan Ali Bahtiar, Moh. Nur Iskandar

### Supervisor Surveyor Mahasiswa:

Adenada Kharishma Daiva Harimurti, Agastya Arnanda Primawan, Ahmad Yasin Dairobi, Arief Ahmad Abdul Azis, Aldi Abdillah Lubis, Baiquni Al Farouq, Dyah Rizki Anggita Putri, Irsyaad Reynaldi Bahri Tanjung, Ivan Krisna, Jihad Shalqi Ramadhan, Mahendra Dicky Setyawan, Muhammad Ammar Faiz, Muhammad Imam Nugraha, Petrus Andito Nugraha Candraningrat, Prasida Ivan Krisna, Ridhan Lukmanul Hakim, Rizaldy Muhammad Alim, Satria Yudha

### Kontributor Studi Lapang:

Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN Reguler dan Alih Program Tahun Masuk 2016 dan 2017, Makmun, Tri Wibowo, Mutaqin, Mahpud Sujai, Adrianus Dwi Siswanto, Lokot Zein Nasution, Ragimun, Purwoko, Widodo Ramadyanto

### Kontributor Diskusi:

Dewi Puspita (Badan Kebijakan Fiskal), Agung Kurniawan PP (Badan Kebijakan Fiskal), Merita Pahlevi (Badan Kebijakan Fiskal), Kresnadi Prabowo Mukti (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), Imam Mukhlis (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), Aan Prianto (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), Mulyono (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), Akhmad Basori (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Edy Suharto (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), R. Gatot Megantoro (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Sri Najiyati (Kemendesa PDTT), Danarti (Kemendesa PDTT), Slamet RTS (Kemendesa PDTT), Emma Rahmawati (Kemendesa PDTT), Endang Basuni (Kemendagri), Khoirunurrofik (Universitas Indonesia), Usman (Universitas Indonesia), Rika Fatimah P.L. (Universitas Gajah Mada), Sudarno Sumarto (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)

### Kontributor Teknis:

Wahyu Kusuma Romadhoni, Endang Larasati, Bambang Lukmono, Toto Trianto, Anggoro Kurniawan Sejati, Arif Wicaksono, Sriyanto, Arif Wibawa, Riedho Hizwar, Pusoko Nur Seto, Agung Kurniawan, Risanto, Aditya Widya Permana, Arif Taufiq Nugroho

### Penerbit:

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-53083-1-4



---

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN LITERATUR</b>	<b>5</b>
A. Kerangka Regulasi	5
B. Konsep <i>Community Driven Development</i> (CDD)	7
C. Program Dana Desa di Indonesia	10
D. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	16
E. Kajian Dana Desa yang Telah Dilakukan di Indonesia	18
<b>BAB III</b>	
<b>DATA DAN METODOLOGI</b>	<b>25</b>
A. Data	25
B. Strategi Identifikasi Evaluasi Program	28
C. Desain Regresi	28
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL DAN DISKUSI</b>	<b>33</b>
A. Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa	33
B. Dana Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Lapangan Pekerjaan	38
C. Badan Usaha Milik Desa dan Kesempatan Kerja	45
D. Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur	54



<b>BAB V</b>	_____
<b>KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN PENELITIAN LANJUTAN</b>	<u>63</u>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<u>69</u>
<b>LAMPIRAN</b>	<u>71</u>
<b>BIODATA SINGKAT PENULIS</b>	<u>91</u>



---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, 1999-2017	2
Gambar 1.2	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau	3
Gambar 2.1	Desa Sebagai Sistem Pemerintahan Daerah	6
Gambar 2.2	Desa Sebagai Komunitas yang Berdikari	7
Gambar 2.3	Perkembangan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 - 2018	11
Gambar 2.4	Perbandingan Alokasi Dana Desa Per Kapita (Jawa Dan Luar Jawa)	11
Gambar 2.5	Proporsi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017	12
Gambar 2.6	BUM Desa Dan Perekonomian	16
Gambar 2.7	BUM Desa Dan Intervensi Pemerintah	17
Gambar 3.1	Proses Pengumpulan Data Survei Dana Desa	27
Gambar 3.2	Peta Sebaran Survei Desa dan Kelurahan	28
Gambar 4.1	Tren BUM Desa/Badan Usaha Ekonomi Kelurahan	35
Gambar 4.2	Tren BUM Desa/Badan Usaha Ekonomi Kelurahan, Jawa dan Luar Jawa	36
Gambar 4.3	Badan Usaha Milik Desa	37
Gambar 4.4	Informasi Eksistensi Badan Usaha Lokal Desa/Kelurahan	38
Gambar 4.5	Informasi Pengetahuan Badan Usaha Lokal Berdasarkan Pendapatan Per Kapita dan Hubungan Istimewa	40
Gambar 4.6	Pemanfaatan Badan Usaha Lokal oleh Masyarakat	41
Gambar 4.7	Pemanfaatan Badan Usaha Lokal oleh Masyarakat Berdasarkan Jenis Layanan	42
Gambar 4.8	Pemanfaatan Badan Usaha Lokal oleh Masyarakat Berdasarkan Hubungan Istimewa dengan Aparat	43



Gambar 4.9	Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa	44
Gambar 4.10	Korelasi Antara Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan BUM Desa	45
Gambar 4.11	Rata-Rata Proporsi Jumlah Pekerja di Sektor Jasa	46
Gambar 4.12	Alokasi Dana Desa Per Kapita dan Pekerjaan Pertanian (Jawa)	48
Gambar 4.13	Alokasi Dana Desa Per Kapita dan Jam Kerja di Pertanian (Pulau Sumatera dan Riau)	49
Gambar 4.14	Alokasi Dana Desa Per Kapita dan Jam Kerja di Pertanian (Indonesia Bagian Timur dan Tengah)	50
Gambar 4.15	Pendidikan Aparat Desa	53
Gambar 4.16	Persepsi Kualitas Infrastruktur Jalan	55
Gambar 4.17	Persepsi Kualitas Infrastruktur Penerangan	57
Gambar 4.18a	Persepsi Kualitas Infrastruktur Sanitasi	58
Gambar 4.18b	Persepsi Kualitas Infrastruktur Air Bersih	59
Gambar 4.18c	Persepsi Kualitas Infrastruktur Selokan	60
Gambar 4.19	Persepsi Kualitas Infrastruktur Irigasi	61





---

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Matriks Ringkasan Kegiatan <i>Community Driven Development</i>	8
Tabel	3.1	Data Penelitian	25
Tabel	3.2	Sebaran Sampel Unit Survei Dana Desa	28
Tabel	4.1	Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi	34
Tabel	4.2	Badan Usaha Milik Desa dan Kesempatan Pekerjaan	47
Tabel	4.3	Dana Desa dan Kesempatan Pekerjaan	51
Tabel	5.1	Ringkasan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa	67





---

## KATA PENGANTAR

Kebijakan penyaluran Dana Desa yang sudah berjalan sejak tahun 2015 merupakan gagasan membangun Indonesia dari pinggiran. Hingga tahun 2018, alokasinya dalam APBN telah mencapai Rp187,75 triliun. Setelah empat tahun berjalan dan melibatkan penyaluran dana yang cukup besar, perlu dilakukan evaluasi terkait dampak kebijakan ini terhadap perekonomian di desa. Meskipun evaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Desa telah banyak dilakukan, baik oleh akademisi, lembaga penelitian, maupun dari pihak pemerintah sendiri, namun sifatnya masih terbatas pada sampel di daerah tertentu ataupun realiasi pembangunan fisik yang sudah dicapai.

Kajian yang merupakan kolaborasi antara Badan Kebijakan Fiskal dan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN ini mencoba melengkapi berbagai kajian yang sudah ada sebelumnya, dengan mengambil sampel cukup besar di mencakup hampir seluruh pulau besar di Indonesia. Tim kajian terdiri dari para peneliti dan dosen, serta melibatkan para mahasiswa PKN STAN dalam pengumpulan data primer melalui survei di desa/kelurahan tempat tinggal mereka yang dilakukan pada saat masa libur perkuliahan. Lebih dari 15.000 responden, 1000 desa/kelurahan, dan ribuan mahasiswa yang terlibat diharapkan dapat memberikan hasil kajian yang valid dan mewakili kondisi penyaluran Dana Desa di seluruh Indonesia. Kami menemukan bahwa Dana Desa meningkatkan secara positif keberadaan Badan Usaha Milik Desa, kesempatan bekerja, dan persepsi masyarakat atas infrastruktur.

Kolaborasi yang dibangun dalam pelaksanaan kajian ini bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan kajian yang besar dan *reliable*, tetapi juga untuk mewujudkan nilai-nilai sinergi antar unit di Kementerian Keuangan. Terdapat proses pembelajaran dan pengayaan sudut pandang dalam setiap tahap pelaksanaan penelitian. Pembelajaran bukan hanya didapatkan oleh para mahasiswa ketika mewawancarai responden dan terjun langsung dalam suatu penelitian, tetapi juga dirasakan oleh para peneliti dan dosen dalam mendesain suatu survei yang cukup besar. Berbagai pembelajaran tersebut menjadi pengalaman yang berharga bagi pelaksanaan penelitian di masa yang akan datang, baik untuk tujuan evaluasi maupun sebagai dasar perumusan kebijakan.



Tim mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama yang solid dalam penelitian ini. Para pimpinan di Badan Kebijakan Fiskal dan PKN STAN yang telah memfasilitasi pelaksanaan kajian ini, para narasumber yang telah memberikan masukan, data dan informasi sehingga meningkatkan kualitas analisis, tim dosen PKN STAN yang mengorganisir pelaksanaan survei oleh para mahasiswa, para peneliti BKF yang melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan survei, serta para mahasiswa PKN STAN atas dedikasinya dalam menghadapi responden dalam proses pengumpulan data. Kami berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan implementasi kebijakan Dana Desa dan menjadi rujukan bagi pelaksanaan penelitian lainnya.

Jakarta, Desember 2018

**Tim Penulis**



---

## RINGKASAN EKSEKUTIF

**Tujuan penyaluran dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi komunitas desa.** Dana Desa yang berasal dari APBN dialokasikan guna mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan melalui pemberian kesempatan untuk pemerintah desa mengelola dan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Penyaluran Dana Desa sudah dilakukan sejak tahun 2015, dengan alokasi dana mencapai Rp187,75 triliun hingga tahun 2018. Kementerian Keuangan perlu melakukan evaluasi terkait dampak penyaluran tersebut pada perekonomian dan kehidupan masyarakat di desa.

**Penelitian ini mencoba melengkapi berbagai penelitian lain terkait evaluasi Dana Desa.** Tujuan penelitian adalah untuk melihat bagaimana dampak penyaluran Dana Desa terhadap perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), kesempatan kerja, serta kualitas infrastruktur. Topik terkait BUM Desa menjadi fokus utama mengingat bahwa belum terdapat penelitian Dana Desa yang memfokuskan pada topik tersebut. Adapun kesempatan kerja dan kualitas infrastruktur juga dicoba dieksplorasi melalui survei kepada responden, untuk dapat dibandingkan dengan data sekunder maupun penelitian lainnya.

**Penelitian ini menggunakan data primer dari survei mencakup 2.015 sampel aparat desa/kelurahan dan 14.300 sampel rumah tangga di desa/kelurahan di Indonesia.** Sebaran sampel meliputi wilayah Sumatera, Jawa, serta Indonesia Tengah dan Timur. Metode analisis yang digunakan adalah ekonometri program evaluasi, yaitu metode *first-difference* dan *difference-in-difference* (DID) dengan adaptasi intervensi kontinu alokasi dana desa per kapita. Adapun untuk meyakinkan bahwa estimasi yang dilakukan adalah karena adanya intervensi dana desa, maka dilakukan serangkaian uji plasebo.

**Jumlah BUM Desa meningkat secara substansial setelah adanya program Dana Desa.** Jumlah badan usaha lokal di desa dan kelurahan per kapita meningkat dari sekitar 1%-2% sebelum adanya Dana Desa, menjadi sekitar 8% untuk BUM Desa sedangkan kelurahan hanya meningkat sekitar 0.4%. Estimasi rata-rata dana desa per kapita yang diperoleh setiap desa sampel pada tahun 2015-2017 adalah sebesar Rp375.100. Model yang digunakan memberikan estimasi setiap penambahan satu juta rupiah per kapita memberikan kemungkinan peningkatan ketersediaan 0.3 BUM Desa perkapita. Peningkatan BUM Desa tidak hanya terjadi di pulau Jawa tetapi juga terjadi di luar pulau Jawa, dan mencakup hampir pada seluruh jenis usaha. BUM



Desa yang terbentuk rata-rata masih bersifat tradisional seperti toko kelontong yang berada di rumah penduduk.

**Namun demikian, pengetahuan masyarakat tentang BUM Desa masih belum optimal.** Penerima manfaat informasi keberadaan badan usaha lokal desa/ kelurahan lebih besar diterima oleh rumah tangga yang merupakan keluarga dari aparat desa ataupun tokoh masyarakat dan penerimanya regresif terhadap pendapatan per kapita keluarga. Hal ini mengindikasikan masih terbatasnya akses informasi badan usaha lokal desa/kelurahan oleh rumah tangga miskin dan masyarakat pada umumnya.

**Pemanfaatan badan usaha di lingkungan desa/kelurahan masih relatif sangat sedikit dan adanya indikasi ketidakselarasan antara jenis usaha yang didirikan dengan kebutuhan masyarakat desa.** Walaupun pemanfaatan badan usaha di desa lebih tinggi (sekitar 15%) dari pada tingkat pemanfaatan badan usaha di kelurahan (sekitar 10%), pemanfaatan oleh masyarakat umum belum optimal. Pemanfaatan jauh lebih besar dimanfaatkan oleh tokoh masyarakat desa ataupun rumah tangga yang memiliki hubungan keluarga dengan aparat desa. Minimnya tingkat pemanfaatan tersebut berkorelasi dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses rembug desa. Masyarakat yang berpartisipasi dalam program desa berkorelasi positif dengan pemanfaatan BUM Desa. Rendahnya tingkat pemanfaatan tersebut perlu menjadi perhatian mengingat keberadaan badan usaha tidak membawa manfaat ekonomi yang optimal pada masyarakat apabila tingkat pemanfaatan masyarakat rendah.

**Terkait dengan jenis usaha BUM Desa, layanan jasa lembaga keuangan dan perdagangan merupakan jenis layanan yang lebih cenderung dimanfaatkan oleh masyarakat desa/ kelurahan.** Meskipun penggunaan layanan keuangan di desa lebih rendah, namun penggunaan layanan perdagangan dan distribusi di pedesaan jauh lebih tinggi daripada di kelurahan. Hal ini mengindikasikan layanan keuangan dan layanan perdagangan adalah dua jenis layanan yang lebih cenderung diakses oleh masyarakat desa, sedangkan di kelurahan, hanya layanan keuangan yang lebih cenderung untuk diakses oleh masyarakat. Sementara itu, pemanfaatan badan usaha lokal untuk pelatihan/pengembangan dan penyewaan sangat kecil sekali apabila dibandingkan dengan jenis layanan lainnya.

**Terdapat indikasi BUM Desa memberikan kesempatan bekerja masyarakat desa di bidang jasa.** Namun, riset ini tidak menemukan indikasi meningkatnya kesempatan kerja di bidang lainnya yang disebabkan karena adanya BUM Desa di wilayah desa tersebut. Hal ini mendukung ide pemanfaatan BUM Desa yang lebih banyak dimanfaatkan sebagai akses keuangan dan perdagangan sehingga membuka peluang untuk masyarakat melakukan usaha di bidang jasa.

**Meningkatnya alokasi dana desa per kapita akan meningkatkan kesempatan kerja, seperti yang dirasakan di Sumatra dan Indonesia Tengah dan Timur.** Ini mendukung gagasan bahwa semakin besar dana desa per kapita, semakin besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Namun, ketika dana desa per kapita sangat besar, dampaknya terhadap lapangan kerja akan berkurang, seperti yang ditunjukkan oleh Indonesia di Indonesia Tengah dan Timur. Penjelasan yang mungkin untuk ini adalah teori manajemen yang tidak efektif tentang perubahan organisasi, yaitu kapasitas sumber daya organisasi yang terbatas seperti pendidikan,



yang mempengaruhi kinerja organisasi. Kondisi pendidikan aparat desa sampel dari data survei dana desa menunjukkan bahwa sekitar 50% pendidikan aparat desa adalah setingkat SMU.

**Terkait kualitas infrastruktur pasca penyaluran Dana Desa, penelitian ini menemukan bahwa kemanfaatan infrastruktur relatif telah dinikmati oleh sebagian besar lapisan masyarakat di desa.** Hal ini diindikasikan oleh meningkatnya proporsi rumah tangga kurang mampu yang puas atas pelayanan infrastruktur (transportasi, penerangan, kesehatan dan pertanian). Survei juga menunjukkan bahwa sebelum penyaluran Dana Desa, masyarakat kelurahan lebih merasakan kemanfaatan infrastruktur dibandingkan masyarakat desa, dan gap persepsi antara keduanya cukup besar. Namun pasca Dana Desa tingkat kepuasan masyarakat desa dan kelurahan meningkat, dan gap antara keduanya mengecil.

**Berdasarkan temuan yang diperoleh, maka beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah:**

1. perlunya regulasi yang mengatur tentang proporsi pemanfaatan dana desa sesuai keadaan regional wilayah tersebut terutama untuk pengembangan sumber daya manusia;
2. terkait dengan tujuan dana desa untuk peningkatan perekonomian desa dan penanggulangan kemiskinan, maka faktor jumlah penduduk (atau jumlah penduduk miskin) dan luas wilayah diusulkan menempati proporsi yang substansial dalam formula alokasi dana desa karena besaran anggaran per kapita menentukan dampak terhadap pengembangan sumber daya manusia;
3. perlunya regulasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penentuan jenis usaha BUM Desa sehingga terjadi keselarasan antara potensi dan kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha BUM Desa;
4. perlunya regulasi yang mendorong kerja sama antara pemerintah lokal dengan pihak swasta yang ahli dalam bidang usaha BUM Desa agar BUM Desa dapat berkembang secara optimal dan tidak bergerak secara tradisional, serta dapat mencegah terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang aparat desa.

**Mengingat survei Dana Desa 2018 yang telah dilakukan mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa atau kelurahan, maka penelitian mendalam mengenai aspek sosial ekonomi lainnya akan dilakukan pada periode selanjutnya.**







## **PENDAHULUAN**

Salah satu ide pokok Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, agar pembangunan nasional dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih merata. Pada akhir tahun 2014, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum atas kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara singkat, Dana Desa diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini merupakan wujud pengakuan negara terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan/atau hak tradisional. Tujuan dari penyaluran Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia selama satu dekade terakhir (2008 - 2017) menunjukkan tren yang semakin menurun. Penurunan jumlah tersebut terjadi baik di perdesaan maupun di perkotaan. Sebagai ilustrasi adalah data penurunan kemiskinan pada tahun 2017. Selama tahun 2017, jumlah penduduk miskin turun sebanyak kurang lebih 1,19 juta (dari 27,77 juta pada Maret 2017 menjadi 26,58 juta pada September 2017). Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401,28 ribu orang (dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017). Sementara untuk daerah perdesaan jumlah penduduk miskin turun sebanyak 786,95 ribu orang (dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017). Dari data di atas tampak juga bahwa jumlah penduduk miskin di perdesaan relatif lebih tinggi daripada di perkotaan. Kondisi tersebut berlaku baik secara nasional maupun per pulau (lihat Gambar 1.2). Hal ini bisa dikatakan bahwa persoalan utama kemiskinan berada di perdesaan.

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, 1999-2017



Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No 05/01/Th.XXI, 2 Januari 2018

Dana Desa telah dialokasikan selama empat tahun (2015-2018) dengan total mencapai Rp187,75 triliun. Pada tahun pertama, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,8 triliun kemudian, terus meningkat hingga mencapai Rp60 triliun (tahun 2018). Pada periode yang sama, jumlah orang miskin di Indonesia, termasuk di daerah perdesaan, semakin menurun. Namun, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara keduanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, beberapa pihak melakukan penelitian terkait Dana Desa. Satu diantaranya adalah kajian ini yang melibatkan Badan Kebijakan Fiskal dan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN.

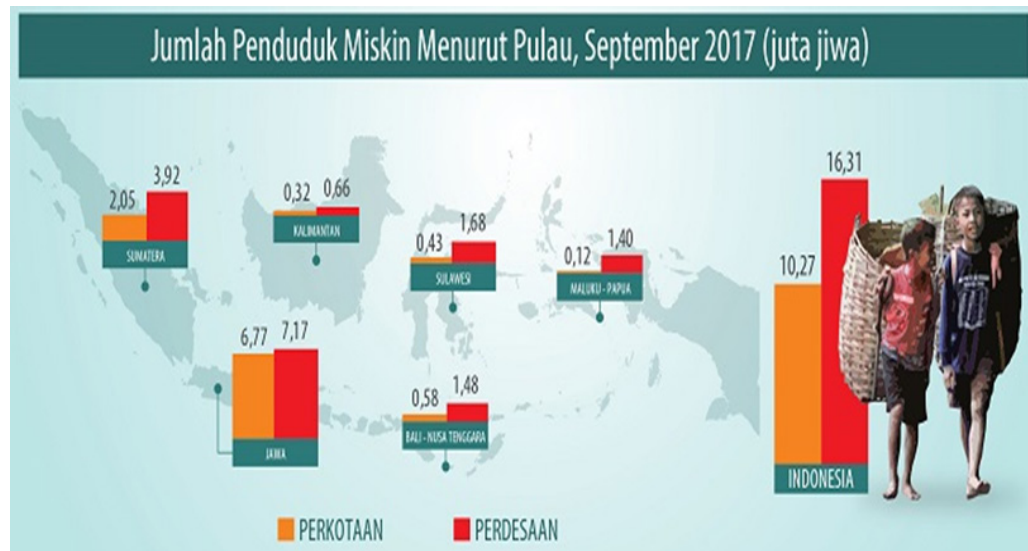
Pemanfaatan Dana Desa lebih diarahkan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi untuk kedua bidang prioritas tersebut setidaknya mencapai 90% dari total Dana Desa (BKF, 2017:30). Hasilnya, terjadi percepatan penyediaan sarana dan prasarana fisik desa seperti jalan desa, jembatan, embung, irigasi, drainase dan MCK (Mandi Cuci Kakus). Sedangkan output dari bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), RTLH (Rumah Tangga Layak Huni), bantuan jamban bagi keluarga tidak mampu, pemberdayaan posyandu, dan sebagainya.

Berdasarkan data Kementerian Desa, sampai tahun 2017 tercatat pendirian BUM Desa telah mencapai 21.811 unit (BKF, 2017:50). BUM Desa yang dibentuk dari uang Dana Desa diharapkan menjadi salah satu sarana untuk menghidupkan ekonomi pedesaan dengan menjangkau dan mengembangkan potensi sumber daya desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 memungkinkan pemerintah desa untuk menggunakan Dana Desa sebagai penyertaan modal BUM Desa untuk peningkatan perekonomian desa, pengelolaan potensi desa, peningkatan usaha, penciptaan pasar, perbaikan layanan umum, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat desa. Kebijakan pemerintah ini menciptakan insentif



yang berbeda pada wilayah administrasi pedesaan dengan wilayah administrasi kelurahan dari waktu ke waktu.

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau



Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No 05/01/Th.XXI, 2 Januari 2018

Di sisi lain, manajemen pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk dapat mengalokasikan potensi sumber daya yang efisien dan efektif. Terbatasnya kapasitas sumber daya masyarakat desa seperti pendidikan menjadi hambatan pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Ini membuat dampak Dana Desa akan juga akan bergantung pada faktor-faktor tersebut.

Program Dana Desa dan BUM Desa diyakini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat pedesaan. Namun, belum ada studi spesifik yang mendukung hipotesis tersebut terutama yang mengukur dampak pengeluaran publik di tingkat pedesaan terhadap ketersediaan dan kinerja badan usaha lokal serta penciptaan lapangan kerja di Indonesia yang melibatkan lebih dari dua ribu wilayah administrasi desa dan kelurahan.

Besarnya cakupan wilayah penelitian dan wilayah administrasi yang lebih spesifik (desa dan kelurahan), memungkinkan pemanfaatan metode kuasi-eksperimental belanja pemerintah program Dana Desa dengan identifikasi strategi yang lebih baik. Metode *difference-in-difference* (DID) dan *triple-difference* dapat diterapkan. Metode penelitian ini memanfaatkan wilayah administrasi kelurahan dan wilayah administrasi desa yang tidak memiliki BUM Desa sebagai kelompok area pembanding (*control group*). Data utama yang digunakan adalah data primer melalui Survei Dana Desa 2018 yang mencakup wilayah administrasi pedesaan dan kelurahan. Data tersebut kemudian dilengkapi dengan data sekunder dari berbagai sumber, antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan data proyeksi populasi.



Studi ini menitikberatkan pada eksplorasi terkait BUM Desa dalam hubungannya dengan tujuan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, analisis atas hasil temuan di lapangan terkait pembangunan pedesaan yang dilaksanakan pasca kebijakan penyaluran Dana Desa juga dilakukan dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Pendalaman atas eksplorasi hubungan Dana Desa dengan topik-topik lain dikaji lebih jauh.



## TINJAUAN LITERATUR

### A. Kerangka Regulasi

Program Dana Desa sebagai sebuah kebijakan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan sejak tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan Undang Undang Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 memungkinkan pemerintah desa untuk menggunakan Dana Desa sebagai penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desaa) untuk peningkatan perekonomian desa, pengelolaan potensi desa, peningkatan usaha, penciptaan pasar, perbaikan layanan umum, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Kebijakan pemerintah ini menciptakan insentif yang berbeda pada wilayah administrasi perdesaan dengan wilayah administrasi kelurahan dari waktu ke waktu. Akses pendanaan dan kerjasama antara pelaksanaan program desa dan badan usaha lokal di wilayah administrasi perdesaan akan menurunkan harga efektif dari pemanfaatan badan usaha lokal dan penyediaan lapangan pekerjaan di wilayah administrasi perdesaan.

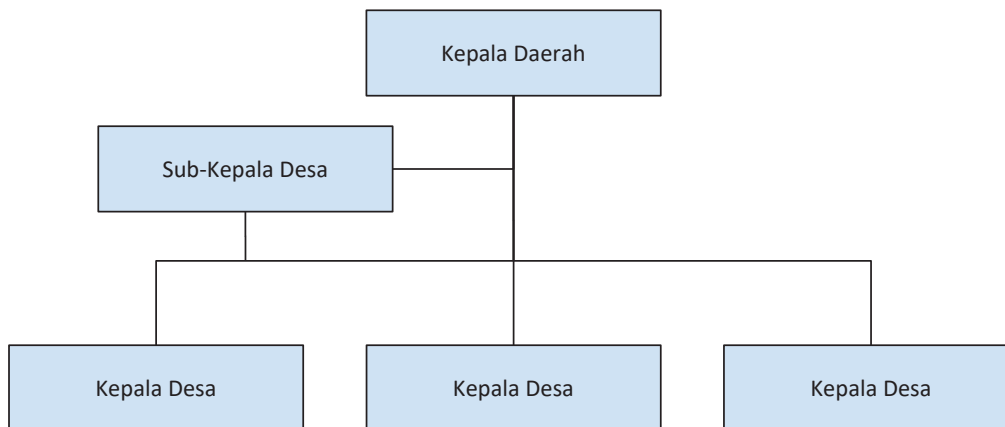
Peran desa dalam pemerintahan di Indonesia mengalami sejarah panjang sesuai dengan rezim pemerintahan yang memayunginya (Salim, A., et al. 2017). Sejak pemerintahan kolonial, desa diakui sebagai entitas berdasarkan tradisi dan adat dari masing-masing daerah dimana desa bergerak tanpa adanya intervensi dari pemerintahan pusat. Dengan kata lain, desa memiliki kuasa untuk mengembangkan daerah mereka masing-masing sesuai dengan potensi daerah tersebut sesuai dengan tradisi dan adat yang ada. Sementara itu, pada zaman Orde Baru, sistem pemerintahan tersentralisasi yang bersifat *rigid*. Pada era ini, *patronase* dan kontrol politik terhadap pemerintahan desa sangatlah kuat sehingga desa tidak memiliki kuasa untuk mengembangkan daerah masing-masing atas kehendak mereka sendiri.

Namun sejak dimulainya Orde Reformasi pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi dengan pertumbuhan sistem desentralisasi yang sangat cepat. Secara



sederhana, desentralisasi diartikan sebagai pemindahan kekuasaan kepada daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 (yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004) dimana pemerintahan tingkat daerah diberikan otonomi untuk mengurus daerahnya masing-masing dimana desa dalam konteks ini berada dibawah pemerintahan tingkat daerah tersebut. Dengan kata lain, desa dalam konteks ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah (gambar 2.1).

**Gambar 2.1 Desa sebagai Sistem Pemerintahan Daerah**



Sumber: Salim, A., et al. 2017

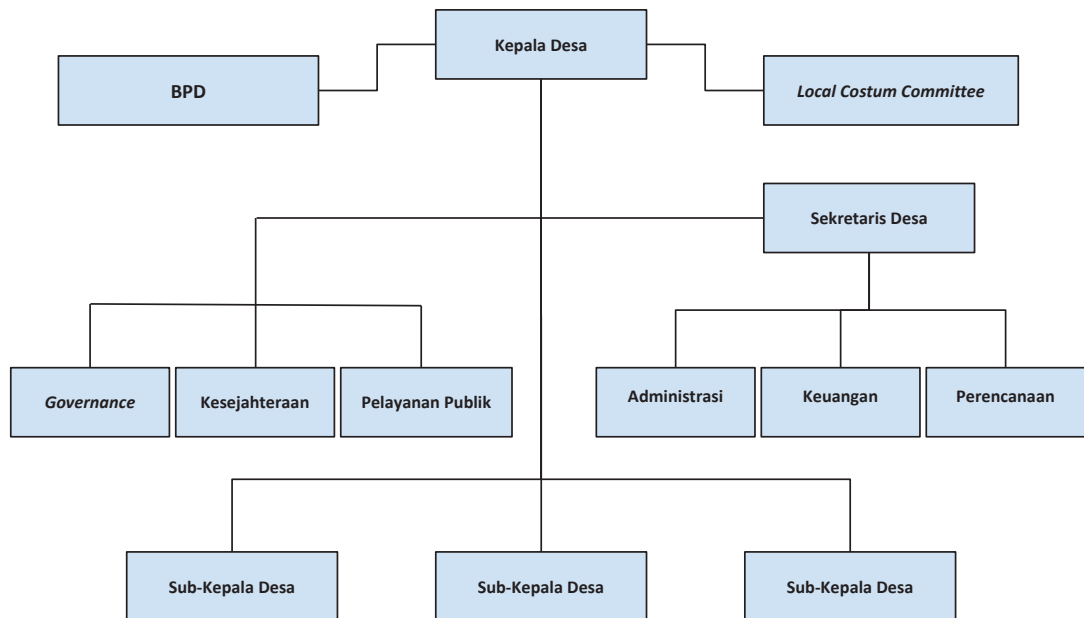
Namun, sejak tahun 2014, guna mengurangi tendensi *patronase* yang justru berpindah dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah, Pemerintah memperkenalkan UU Desa dimana membentuk desa sebagai dimensi baru atas pemerintahan daerah dengan membentuk desa sebagai unit administrasi yang berdiri secara mandiri sehingga memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan dan anggarannya sendiri. Hukum ini secara umum membentuk 3 prinsip utama, yaitu:

1. Desa diberikan hak untuk membentuk regulasi dan mengatur kepentingan dari masyarakat desanya masing-masing.
2. Desa didorong untuk berdaya (*self-empowered*) dan demokratis dalam tatanan masyarakat.
3. Desa perlu diatur oleh *ad hoc legislation*.

Oleh karena itu, desa tidak hanya berperan sebagai bagian dari pemerintahan daerah seperti yang dijelaskan pada grafik 2.1. Tetapi, justru desa juga berperan sebagai komunitas yang berdikari dalam mengurus masalah daerah mereka masing-masing seperti slogan yang digemakan oleh pemerintah “*one village, one plan, one budget*” (gambar 2.2).



Gambar 2.2 Desa sebagai Komunitas yang Berdikari



Sumber: Salim, A., et al. 2017

## B. Konsep *Community Driven Development* (CDD)

Program Dana Desa merupakan salah satu bentuk *Community Driven Development* (CDD), yaitu pengembangan masyarakat yang menekankan pada kontrol komunitas terhadap pengambilan keputusan dan sumber daya investasi. Pada dasarnya, ide dari CDD adalah bagaimana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah khususnya masyarakat miskin. CDD bertujuan meningkatkan kondisi hidup dari masyarakat miskin melalui perbaikan akses atas *basic services*, *social capital* dan *local governance*. Maka dari itu, pendekatan CDD menjadi bentuk intervensi pembangunan yang populer karena memberdayakan masyarakat dalam membuat keputusan untuk daerahnya dengan menggunakan sumber daya secara efisien.

**Tabel 2.1 Matriks Ringkasan Kegiatan Community Driven Development**

Negara /Kegiatan	Infrastruktur	Inklusi Keuangan	SDM	Jumlah (Daerah)	Dampak
Afganistan ( <i>National Solidarity Program II</i> )	✓		✓	500	Peningkatan akses infrastruktur, namun tidak kualitas
India ( <i>District Poverty Initiative Program</i> )	✓	✓		6	Peningkatan akses dan konsumsi
Nepal ( <i>Poverty Alleviation Fund II</i> )	✓			55	Peningkatan akses pendidikan dan konsumsi
Filipina ( <i>KALAH! CIDSS</i> )	✓		✓		Peningkatan konsumsi dan pekerjaan
Senegal ( <i>Programme Nasionale d'infrastructures Rurales</i> )	✓		✓		Peningkatan akses dan konsumsi
Zambia ( <i>Zambia Social Recovery</i> )	✓		✓		Peningkatan akses dan konsumsi
Bolivia ( <i>Bolivia Social Investment</i> )	✓	✓			Peningkatan akses, minimal dalam kualitas
Honduras ( <i>Honduras Social</i> )	✓		✓		Peningkatan akses
Thailand ( <i>Thai Village Fund</i> )		✓		78.000	Tidak mengurangi kemiskinan

Sumber: diolah dari berbagai sumber (Arcand, 2008; Beath, Christia, & Enikolopov, 2013; Boonperm, Haughton, & Khandker, 2013; Boonperm, Haughton, Khandker, & Rukumnuaykit, 2012; Center, 2007; Chandoevrit & Ashakul, 2008; Chase & Sherburne-Benz, 2001; Deininger & Liu, 2009; Newman et al., 2002; Parajuli, Acharya, Chaudhury, & Thapa, 2012)

Beberapa negara di dunia telah menerapkan program *Community Driven Development* (CDD) dengan berbagai bentuk. Tabel 2.1 menampilkan matriks ringkasan bentuk kegiatan pelaksanaan dari negara-negara yang telah menerapkan program CDD dan dampak terhadap masyarakat di negara tersebut. Infrastruktur mencakup pembangunan infrastruktur daerah seperti pembangunan jalan desa, infrastruktur pendidikan seperti sekolah, serta infrastruktur kesehatan seperti sanitasi dan perlindungan untuk lansia. Inklusi keuangan meliputi kegiatan untuk peningkatan akses ke kredit mikro. Sumber daya manusia (SDM) terdiri dari kegiatan untuk peningkatan kualitas sumber daya





manusia seperti pelatihan, pelayanan kesehatan, dan pembentukan komunitas usaha. Sementara itu, dampak merupakan estimasi dampak pelaksanaan kegiatan terhadap berbagai aspek di masyarakat seperti peningkatan akses terhadap infrastruktur kesehatan dan peningkatan kualitas perekonomian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hampir seluruh negara yang melaksanakan program CDD pada tabel 2.1, kecuali Thailand, melakukan pembangunan infrastruktur terutama sarana pendidikan dan kesehatan. Ini karena negara-negara tersebut merupakan negara berkembang yang pada umumnya memerlukan peningkatan infrastruktur untuk mengembangkan ekonomi dan sumber daya manusia. Selain infrastruktur, program CDD juga dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia seperti peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan masyarakat serta pembentukan kelompok-kelompok usaha di masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Afganistan, Filipina, Senegal, Zambia dan Honduras. Sementara India, Bolivia dan Thailand memanfaatkan program CDD untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan kepada kredit mikro. Program kredit mikro di Thailand dimulai pada tahun 2001 dan diberikan pada 78 ribu desa. Ini menjadikan program kredit mikro di Thailand adalah program kredit mikro terbesar di dunia.

Program CDD tersebut pada umumnya berhasil meningkatkan akses terhadap infrastruktur yang berhubungan seperti meningkatnya akses terhadap jalan, sarana pendidikan dan sarana kesehatan. Namun, peningkatan akses terhadap infrastruktur tersebut tidak selalu meningkatkan kualitas perekonomian dan sumber daya manusia di daerah tersebut. Sebagai contoh, walaupun program kredit mikro di Thailand terbukti dapat meningkatkan akses kepada lembaga keuangan, tetapi belum dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Indikasi kesalahan *mistargeting* pemberian kredit mikro menjadi salah satu sebab kurang efektifnya program tersebut (Menkhoff & Rungruxsirivorn, 2009). Hal yang sama juga terjadi di Afganistan dimana peningkatan akses terhadap infrastruktur pendidikan dan kesehatan belum dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Beath et al., 2013).

Terlebih lagi, keluasan dampak program berbeda-beda pada berbagai negara, jenis program, dan penerima manfaat. Meningkatnya pinjaman dari Dana Desa di Thailand berkorelasi positif dengan meningkatnya 3.5% pengeluaran rumah tangga miskin dan rumah tangga yang berada di sektor pertanian (Boonperm et al., 2013). Menggunakan metode penerima intervensi dan kontrol, program *Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services Program* (KALAHY CIDSS) yang ditargetkan terhadap 25% daerah termiskin dari 42 propinsi termiskin di Filipina meningkatkan 9% aksesibilitas dan 12% konsumsi per kapita rumah tangga, lebih besar manfaatnya untuk keluarga miskin (Labonne, 2013). Berdasarkan fakta tersebut, dampak program CDD memiliki potensi dampak yang lebih besar ketika penerima manfaat program tersebut di tujukan untuk golongan tertentu seperti masyarakat miskin.



### C. Program Dana Desa di Indonesia

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

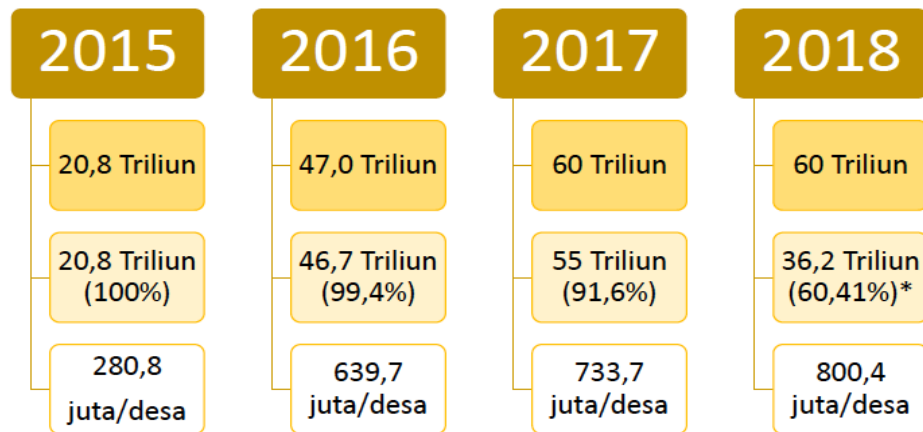
Untuk meningkatkan partisipasi komunitas desa, Pemerintah Indonesia memberikan Dana Desa kepada desa-desa di seluruh Indonesia sejak tahun 2015. Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara mensyaratkan adanya pendapatan pemerintah desa yang berasal dari Dana Desa selain pendapatan lainnya guna mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana ini memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk mengelola dan memanfaatkan keuangan sesuai dengan kebutuhannya.

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Kriteria penentuan tingkat kesulitan geografis didasarkan kepada ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. Namun, pertimbangan jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah dan lokasi desa hanya menempati 10 persen dari distribusi alokasi Dana Desa selama tahun 2015-2017. Proporsi Alokasi Dasar (AD) yang relatif sangat besar dibandingkan dengan Alokasi Formula (AF) (90% : 10%) menyebabkan perbedaan alokasi Dana Desa per kapita berdasarkan kepadatan penduduk, ataupun luas wilayahnya.

Gambar 2.4 memperlihatkan perbandingan alokasi Dana Desa per kapita tahun 2015-2017 antara wilayah administrasi perdesaan di Pulau Sumatera dan pulau-pulau lain di wilayah Indonesia tengah dan Indonesia timur terhadap Pulau Jawa. Nilai yang tertera dalam sumbu X adalah tahun rata-rata alokasi Dana Desa, rata-rata proyeksi populasi dan rata-rata alokasi Dana Desa per kapita. Nilai yang tertera dalam sumbu Y merupakan indeks perbandingan (Indeks Pulau Jawa = 1.00) antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia bagian tengah dan timur dengan Pulau Jawa. Sebagai contoh, rata-rata proyeksi jumlah penduduk wilayah administrasi perdesaan di Pulau Sumatera pada tahun 2015 adalah 0.27 kali (27%) dibandingkan rata-rata proyeksi jumlah penduduk wilayah administrasi perdesaan di Pulau Jawa.



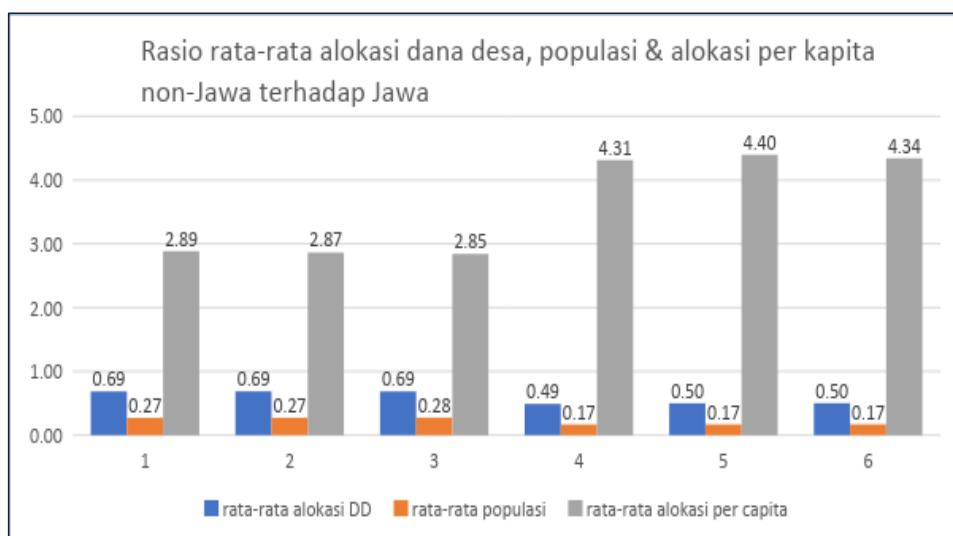
**Gambar 2.3 Perkembangan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 – 2018**



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah Tim Peneliti

Gambar 2.4 memberi indikasi bahwa formula Alokasi Dasar dan Alokasi Formula yang diterapkan menyebabkan besaran rata-rata alokasi Dana Desa selama tahun 2015-2017 per wilayah administratif di Pulau Sumatera mendapatkan sekitar 70% dibandingkan wilayah administratif yang serupa dengan Pulau Jawa. Wilayah administratif di pulau-pulau lainnya di Indonesia bagian timur dan tengah rata-rata mendapatkan sekitar 50% dibandingkan dengan Pulau Jawa. Proyeksi jumlah penduduk di Pulau Sumatera sekitar 28% dan proyeksi jumlah penduduk di bagian Indonesia tengah dan timur sekitar 17% dari proyeksi jumlah penduduk di Pulau Jawa. Hal ini yang menyebabkan lebih kecilnya alokasi Dana Desa di Pulau Sumatera dan Indonesia bagian tengah dan timur berdasarkan penerapan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.

**Gambar 2.4 Perbandingan Alokasi Dana Desa Per Kapita (Jawa dan Luar Jawa)**



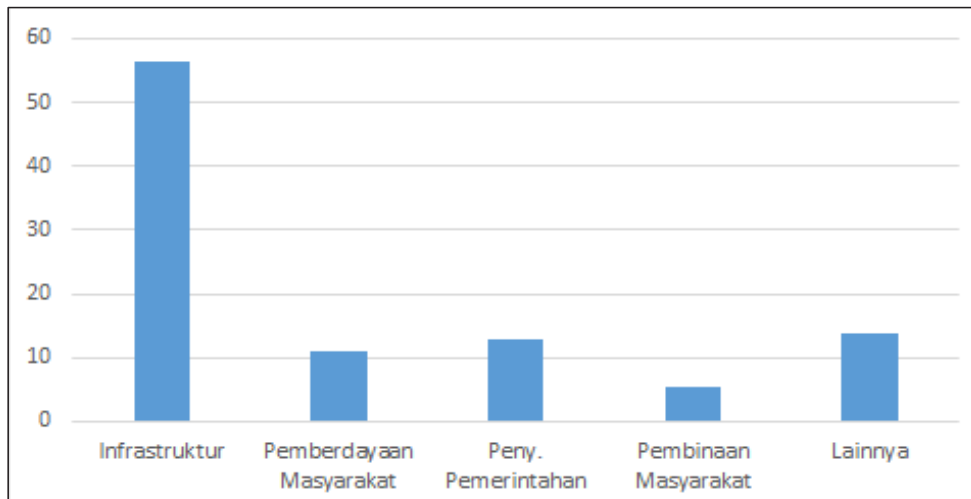
Sumber: Kementerian Keuangan (2018)



Padatnya penduduk di Pulau Jawa jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya dan tingginya proporsi dalam formula alokasi dasar menyebabkan alokasi Dana Desa per kapita selama tahun 2015-2017 di Pulau Sumatera 285% lebih besar dibandingkan dengan alokasi serupa di Pulau Jawa. Lebih besar untuk wilayah di Indonesia tengah dan timur yang memperoleh 430% alokasi Dana Desa per kapita dibandingkan dengan Pulau Jawa. Perbedaan yang substansial Dana Desa per kapita antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya di luar Pulau Jawa dapat ditinjau dari dua sisi. Pada satu sisi, hal ini memperlihatkan kesenjangan alokasi Dana Desa per kapita antar wilayah sehingga wilayah dengan penduduk padat akan lebih sulit untuk mendapatkan dampak sebaik wilayah dengan penduduk yang tidak padat. Pada sisi lainnya, Pulau Jawa adalah daerah yang lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah di luar Pulau Jawa, sehingga alokasi Dana Desa per kapita yang lebih besar di daerah luar Pulau Jawa dapat memberikan pemerataan pembangunan di daerah tersebut. Hal ini juga yang mensyaratkan pentingnya analisis dilakukan dengan alokasi Dana Desa per kapita daripada menggunakan total alokasi Dana Desa karena perbedaan substansial antara wilayah di Indonesia.

Penyaluran alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Kabupaten/Kota yang kemudian disalurkan kepada Desa yang berada di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa alokasi Dana Desa dilakukan dengan tiga tahap, 40% pada bulan April, 40% pada bulan Agustus, dan 20% pada bulan November. Pemerintah Desa dapat memanfaatkan Dana Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

**Gambar 2.5 Proporsi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017**



Sumber: Kementerian Keuangan (2018)



Selain alokasi Dana Desa, penggunaan dana tersebut sangat mempengaruhi analisis dampak yang dapat diberikan oleh program Dana Desa pemerintah. Gambar 2.5 memperlihatkan proporsi rata-rata pemanfaatan Dana Desa dari 1.008 desa di Indonesia pada tahun 2017 berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal dan Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan terhadap aparat desa di wilayah survei. Pembangunan infrastruktur desa merupakan kegiatan utama dengan lebih dari 55% pemanfaatan Dana Desa ditujukan kepada pembangunan infrastruktur pada tahun 2017. Penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat menjadi prioritas pemanfaatan selanjutnya oleh pemerintah desa. Pemanfaatan tahun 2015 dan 2016 di perkirakan memiliki tren yang serupa. Hal ini didasarkan informasi yang diberikan oleh aparat desa dan belum adanya regulasi yang mensyaratkan untuk melakukan perubahan untuk kegiatan tertentu seperti program “*cash for work*” pada tahun 2018.

Nilai alokasi Dana Desa per kapita yang lebih besar untuk wilayah di Pulau Jawa dan penggunaan yang lebih besar proporsinya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur mengindikasikan pentingnya perbedaan dampak (*heterogenity*) antara wilayah di Indonesia dan jenis pemanfaatan di wilayah tersebut. Sebagai contoh, Pulau Sumatera diharapkan dampaknya lebih besar daripada Pulau Jawa untuk suatu program pemberdayaan yang serupa, dan wilayah yang menggunakan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat lebih besar diharapkan memiliki dampak yang lebih besar daripada daerah lainnya.

Penciptaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di desa dapat dilakukan dari program pembangunan infrastruktur, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa membutuhkan tenaga kerja untuk pembuatan infrastruktur seperti jalan, dan jembatan. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat menciptakan lapangan pekerjaan antara lain melalui program pelatihan kerja dan pendampingan masyarakat desa, program kerja padat karya serta program pemberdayaan lainnya.

Hal yang unik dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dibandingkan negara lainnya untuk mendukung program Dana Desa adalah program yang memberikan insentif pendirian Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan Undang Undang Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 memungkinkan pemerintah desa untuk menggunakan Dana Desa sebagai penyertaan modal BUM Desa untuk peningkatan perekonomian desa, pengelolaan potensi desa, peningkatan usaha, penciptaan pasar, perbaikan layanan umum, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat desa. Pendirian BUM Desa ini diharapkan dapat mengembangkan potensi desa dan menciptakan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat di desa tersebut.



BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan pelayanan umum (*servicing*). Mereka dapat menjalankan unit usaha berupa perusahaan air minum, usaha listrik, pangan, pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi lainnya. BUM Desa juga dapat melakukan unit usaha penyewaan berupa alat transportasi, alat pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah dan barang sewaan lainnya. Usaha lain yang dapat dilaksanakan BUM Desa adalah perantara (*brokering*) seperti pembentukan pasar desa, produksi, perdagangan, bisnis keuangan, menjalankan usaha bersama, dan pariwisata. Luasnya jenis usaha yang dapat dilaksanakan oleh desa memberikan keleluasaan masyarakat desa untuk menentukan unit usaha yang dibutuhkan oleh mereka. Di lain pihak, partisipasi masyarakat desa menjadi salah satu faktor penting untuk mengetahui alternatif jenis usaha yang akan dilakukan. Kesalahan atau keterbatasan kapasitas manajemen pemanfaatan BUM Desa dapat mengurangi manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Aparat pemerintah desa dapat menjadikan BUM Desa alat aparat desa untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan. Sebagai contoh, kami mendapati beberapa unit usaha BUM Desa yang berupa usaha notaris, sedangkan yang dapat menjalankan kegiatan kenotariatan adalah aparat desa dan notaris yang bukan merupakan penduduk miskin.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suriadi et al (2015) mengemukakan bahwa pembentukan BUM Desa merupakan hasil dari *institutional strengthening*, *training* dan *technical guidance*. Lebih dari itu, peran universitas sebagai institusi ekonomi sosial desa diproyeksikan dapat memberdayakan dan memperbaiki perekonomian desa, memperbaiki penerimaan desa, memperbaiki aktualisasi potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga BUM Desa diharapkan dapat menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan dan kesetaraan ekonomi di daerah tersebut.

Terkait dengan sistem pemerintahan desa, data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 kemiskinan yang ada di desa berada pada level 14,11%, sedangkan di kota hanya 8,22%. Berdasarkan data tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa sistem pemerintahan desa dapat dikatakan masih belum efektif dalam administrasi pemerintahan desa dan pengentasan kemiskinan sebagai upaya *sustainable development*. Menurut Wanusmawatie dan Muluk (2017), permasalahan hidup masyarakat desa di Indonesia dapat dikatakan sangat kompleks. Berdasarkan perspektif *systems thinking*, segala komponen yang membuat kompleksitas dalam permasalahan desa perlu diperhitungkan untuk memastikan sistem pemerintahan desa dapat berjalan dengan efektif.

Dalam konteks fleksibilitas pada akuntabilitas anggaran desa, penelitian yang dilakukan oleh Husin Dasmi (2015) menemukan bahwa banyak desa yang tidak mencatat dan melaporkan penggunaan anggaran desa karena kompleksitas peraturan dan terbatasnya pemahaman staf desa terhadap bentuk pencatatan keuangan dan prosedur yang diberikan. Penelitian ini dilakukan terhadap 10 desa di kawasan Lhokseumawe dan Aceh Utara dengan membandingkan format keuangan yang diberikan pemerintah dengan realisasi implementasi akuntansi keuangan di daerah



tersebut. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya masalah keuangan desa disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

1. Pemahaman desa yang buruk terhadap regulasi/peraturan.
2. Hampir seluruh desa tidak dapat melakukan proses akuntansi (*bookkeeping*).
3. Pemerintah desa tidak memiliki prosedur standar dalam operasi pemasukan dan pengeluaran daerah.
4. Pemerintah desa tidak memiliki bentuk keuangan desa yang praktis dan sederhana untuk digunakan.
5. Terdapat kelemahan dalam penguatan/pelatihan sistem keuangan desa oleh pemerintah pusat.
6. Tingkat pengawasan dan kontrol Dana Desa yang rendah sehingga rentan disalahgunakan.
7. Pemerintah desa tidak mampu menggabungkan laporan keuangan seperti anggaran desa dan realisasinya untuk mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik.
8. Rendahnya kualitas kantor pemerintah desa yang berujung pada administrasi desa yang tidak optimal.

Dengan demikian optimalisasi administrasi keuangan desa diperlukan untuk memastikan bahwa Dana Desa dapat digunakan pada tingkat optimalitas yang baik. Sehingga dampak dari setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah desa dapat terukur secara aktual. Regulasi maupun bentuk kebijakan seperti modifikasi sistem pencatatan laporan keuangan di tingkat desa dalam *flow of budget accountability* perlu didorong.

#### **D. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**

Desa dapat mendirikan badan usaha sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. BUM Desa sebagai salah satu program andalan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian perekonomian di desa berpotensi memberikan manfaat dan kesejahteraan seluruh warga desa. Dampak ekonomi BUM Desa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran serta penurunan tingkat kemiskinan (lihat Gambar 2.6).



BUM Desa sejatinya bukanlah hal baru bagi desa. Upaya pemerintah dalam menggerakkan ekonomi desa sudah dilakukan sejak lama. Berbagai institusi sosial dan institusi keuangan mikro pernah dibentuk oleh pemerintah seperti Badan Kredit Desa (BKD), BINMAS, Kredit Umum Perdesaan (KUPEDDES), (Kelompok Informasi Kampung (KIK), Kredit Canda Kulak (KCK), Badan Usaha Unit Desa (BUUD), dan Koperasi Unit Desa (KUD). Namun demikian upaya tersebut belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Jika melihat persentase penduduk miskin perdesaan yang masih relatif tinggi dimana persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13.76% pada September 2014 menjadi 14.21% pada Maret 2015 (BPS, 2015), maka dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber daya yang ada di desa belum terkelola dengan baik, yang berakibat pula pada tingkat urbanisasi yang masih begitu tinggi (Pattiro, 2016).

Keberadaan BUM Desa ini telah menarik perhatian banyak kalangan. BUM Desa menarik untuk dikaji karena beberapa alasan seperti: (i) apa nilai tambah BUM Desa apabila dibandingkan dengan jenis usaha lain yang dilakukan pribadi maupun kelompok masyarakat setempat? (ii) apakah pengusaha-lokal di desa bersangkutan tidak ada yang tertarik dengan jenis usaha tersebut? (iii) bagaimana mengembangkan BUM Desa? (iv) faktor apa yang mempengaruhi sebuah BUM Desa bisa bertahan dan berkelanjutan? (v) mengapa ada BUM Desa yang sehat dan berkembang, dan pula BUM Desa yang mati suri atau bangkrut?

Gambar 2.6 BUM Desa dan Perekonomian



Sumber: Kementerian Keuangan (2017). Buku Saku Dana Desa.



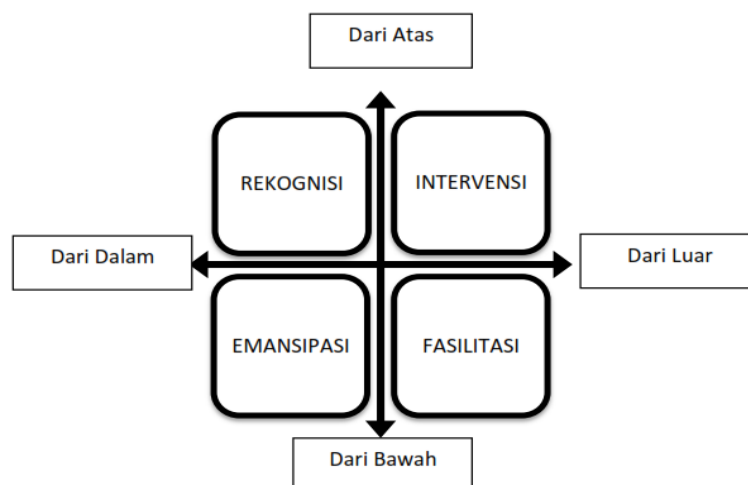


Kendati menawarkan aneka peluang, pengembangan BUM Desa masih menghadapi berbagai macam kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUM Desa yang akuntabel dan berkinerja baik, rendahnya inisiatif untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan warga desa, belum maksimalnya kerjasama antar stakeholders untuk mewujudkan BUM Desa yang mandiri dan berkembang (Sutoro, 2013).

Disamping itu, masih minimnya keterlibatan pemerintah daerah untuk menjadikan BUM Desa sebagai program andalan pemberdayaan desa juga ditengarai sebagai salah faktor lambannya perkembangan BUM Desa. Menurut penelitian dari Pattiro (2016), semangat pendirian BUM Desa belum dibarengi dengan perbaikan atau penguatan kebijakan dan pola pembinaan oleh pemerintah supra desa yakni pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Skala ekonomi (*economic of scale*) juga dianggap sebagai faktor penting dalam upaya pengembangan BUM Desa dan ekspansi pasar (Sutoro, 2013). Hal ini karena desa pada umumnya mempunyai skala ekonomi yang terbatas mengingat kapasitas ekonomi desa yang terlalu kecil. Penelitian Murwadji, Rahardjo, & Hasna (2018) mengenai hambatan dalam mengembangkan BUM Desa menengarai faktor minimnya pengetahuan masyarakat dalam berbisnis secara profesional melalui BUM Desa. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat desa yang tidak terlalu tinggi dan kurang paham dalam menjalankan kegiatan usaha BUM Desa sehari-hari, misalnya dalam hal penyusunan laporan keuangan dan laporan hasil usaha BUM Desa.

**Gambar 2.7 BUM Desa dan Intervensi Pemerintah**



Sumber: Harmiati dan Zulhakim (2017)



Terkait dengan lambannya perkembangan BUM Desa, Harmiati dan Zulkhikim (2017) menjelaskan bahwa pemerintah terlalu menekankan pada model intervensi dalam membangun desa termasuk membangun BUM Desa (lihat Gambar 2.7). Alih-alih menggunakan model emansipasi dan rekognisi yang notabenebenya paralel dengan konsep pembangunan dari dalam (*endogenous development*), yakni pembangunan yang digerakkan oleh desa (*village driven development*), pemerintah lebih memilih model pembangunan yang didorong/digerakkan dari atas (*government driven development*).

## E. Kajian Dana Desa Yang Telah Dilakukan di Indonesia

Alokasi Dana Desa merupakan kebijakan yang diterapkan sejak tahun 2015, dan atas alokasi tersebut telah dilakukan beberapa kali evaluasi. Badan Kebijakan Fiskal melalui Pusat Kebijakan APBN juga telah melakukan kajian evaluasi tersebut pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2016 Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (BKF, 2016) melakukan kajian dengan judul Evaluasi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Evaluasi alokasi Dana Desa dengan mengambil data dari 11 Pemda sebagai sample yang disurvei yang berada di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Berikut ini adalah rincian Pemda dimaksud:

1. Pulau Jawa dan Bali: (1) Kabupaten Mojokerto; (2) Kabupaten Banyuwangi; (3) Kota Batu; (4) Kabupaten Banyumas; (5) Kabupaten Bantul; (6) Kabupaten Cirebon; dan (7) Kabupaten Bangli.
2. Pulau Sumatera: (1) Kabupaten Pesawaran; (2) Kabupaten Pringsewu; (3) Kabupaten Lampung Selatan; dan (4) Kabupaten Karo Sumatera Utara.

Hasil kajian tersebut menemukan beberapa informasi dari kunjungan lapang ke beberapa daerah yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan alokasi Dana Desa dalam APBN diikuti oleh peningkatan jumlah desa. Alokasi Dana Desa sejak tahun 2015 hingga 2017 meningkat sebesar Rp39,23 triliun (188,8%) yaitu dari Rp20,77 triliun menjadi Rp 60,00 triliun, sedangkan jumlah desa bertambah 861 desa (1,2%) dari 74.093 desa menjadi 74.954 desa.
2. Pada tahun 2015, Dana Desa merupakan sumber penerimaan desa terbesar kedua setelah alokasi Dana Desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang dialokasikan paling sedikit 10 persen sebesar Rp32,13 triliun, Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima yang bersumber dari APBN sebesar Rp20,77 triliun, dan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp7,89 triliun.
3. Pengalokasian Dana Desa berdasarkan formula Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) dengan rasio AD : AF = 90% : 10% masih mencerminkan prinsip pemerataan dibandingkan berkeadilan karena porsi AD yang sangat besar. Sedangkan porsi AF yang mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk



miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis (IKG)/indeks kemahalan konstruksi (IKK) sebagai faktor yang menggambarkan kondisi desa sebagai indikasi dalam menghitung kebutuhan Dana Desa, hanya 10 persen dari total Dana Desa dalam APBN.

4. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) masih menghadapi kendala keterlambatan baik dalam penyaluran tahun 2015 maupun tahun 2016. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh:
  - a. Kesiapan dokumen perencanaan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Pemerintah Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa),
  - b. Regulasi mengenai perubahan tahap penyaluran Dana Desa dari 3 tahap menjadi 2 tahap yang mengharuskan Pemda untuk mengubah peraturan kepala daerah mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya,
  - c. Penggunaan Dana Desa tahap I 2016 sebesar minimum 50% sebagai persyaratan penyaluran tahap II, dan
  - d. Dokumen pelaporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (2015).
5. Penggunaan Dana Desa pada sebagian wilayah sudah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa yaitu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun masih terdapat penggunaan Dana Desa yang kurang memiliki efek *multiplier* terhadap ekonomi desa (tembok makam, pembuatan lantai rumah, membayar tunjangan perangkat desa).
6. Pendamping desa belum berfungsi maksimal karena masih belum memenuhi harapan desa dalam membantu desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kompetensi dan kualitas pendamping desa masih belum cukup memadai dalam menjalankan tugasnya, disamping itu jumlah pendamping desa juga masih belum seimbang dengan jumlah desa. Hasil yang ditemukan di lapangan menggambarkan bahwa terdapat pendamping desa yang tidak memiliki jalur koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya pada tahun 2017 Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (BKF, 2017) juga melakukan evaluasi Dana Desa dengan judul Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Desa. Kajian ini mengambil sampel daerah yaitu 13 kabupaten yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Ke-13 kabupaten dimaksud adalah: (1) Kabupaten Ogan Ilir; (2) Kabupaten Bengkulu Tengah; (3) Kabupaten Solok; (4) Kabupaten Cianjur; (5) Kabupaten Sukabumi; (6) Kabupaten Sleman; (7) Kabupaten Gunungkidul; (8)



Kabupaten Klaten; (9) Kabupaten Karanganyar; (10) Kabupaten Malang; (11) Kabupaten Bangkalan; (12) Kabupaten Ketapang; dan (13) Kabupaten Sumba Barat Daya.

Kesimpulan dari hasil kajian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis korelasi distribusi Dana Desa tahun 2015 -2017 dengan jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat desa menunjukkan bahwa distribusi Dana Desa dari APBN dengan formula AD:AF=90:10 hanya memenuhi prinsip pemerataan namun belum berkeadilan karena masih terdapat ketimpangan distribusi Dana Desa. Ketimpangan distribusi Dana Desa tersebut mengakibatkan desa dengan jumlah penduduk miskin tinggi dan tingkat kesulitan geografis tinggi, memiliki kapasitas fiskal yang kurang memadai untuk percepatan pembangunan desa dan mengurangi kemiskinan desanya.
2. Ditinjau dari jumlah penduduk miskin, ketimpangan distribusi Dana Desa di wilayah/pulau Maluku dan Papua sangat tinggi karena terdapat *gap* yang cukup besar antara desa yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dan rendah namun mendapatkan distribusi Dana Desa yang relatif sama. Sedangkan di wilayah/pulau Jawa, sebaran distribusi Dana Desa dilihat dari jumlah penduduk miskin relatif lebih merata dan adil dibandingkan wilayah/pulau lainnya meskipun masih terdapat ketimpangan distribusi.
3. Ditinjau dari tingkat kesulitan geografis, masih terjadi korelasi negatif antara distribusi Dana Desa dengan tingkat kesulitan geografis di tingkat desa (IKG) yang berarti semakin tinggi IKG (tingkat kesulitan geografis yang makin tinggi) justru memperoleh Dana Desa yang kecil. Kondisi idealnya mempunyai korelasi positif, sehingga semakin tinggi tingkat kesulitan geografis suatu desa maka Dana Desa yang diperoleh akan semakin besar. Hal ini diharapkan dapat digunakan untuk percepatan perbaikan infrastruktur yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Ketimpangan yang sangat tinggi terjadi di wilayah/ Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang ditunjukkan oleh korelasi negatif yang paling tajam dibandingkan wilayah/pulau lainnya. Distribusi Dana Desa di wilayah/ Pulau Jawa dilihat dari tingkat kesulitan geografis relatif lebih merata dan adil dibandingkan wilayah/pulau lainnya meskipun masih terdapat ketimpangan distribusi.
4. Berdasarkan survei pada 13 daerah sampel ditemukan beberapa kendala/ permasalahan yang berhasil diidentifikasi dalam implementasi kebijakan Dana Desa selama periode 2015-2017, antara lain:
  - a. Aspek Distribusi Alokasi dan Penyaluran
    - Distribusi alokasi Dana Desa ditinjau dari jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis menunjukkan adanya ketimpangan antar daerah.



Masih terdapat desa dengan tingkat kesulitan geografis dan jumlah penduduk miskin tinggi namun memperoleh distribusi Dana Desa yang relatif sama atau bahkan lebih kecil dibandingkan dengan desa yang memiliki jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis lebih rendah.

- Penyaluran Dana Desa hingga pertengahan tahun 2017 masih terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh keterlambatan desa dalam menyampaikan prasyarat penyaluran Dana Desa pada tiap tahap penyaluran. Prasyarat tersebut berupa dokumen perencanaan (RKPDDes) dan penganggaran (APBDes) serta laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

b. Aspek Penggunaan


- Penggunaan Dana Desa lebih dari 80 persen dimanfaatkan untuk bidang pembangunan desa. Masih ada penetapan pembangunan yang tidak memiliki efek multiplier bagi perbaikan perekonomian desa.
- Prioritas penggunaan Dana Desa sebagian besar ditentukan melalui forum musyawarah desa, namun di beberapa desa masih ada yang ditentukan oleh Kepala Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota sehingga masih ada penggunaan Dana Desa yang belum sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat desa.
- Beberapa desa masih belum mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk pembentukan BUM Desa sebagai wadah dalam mengembangkan kegiatan unit usaha ekonomi di desa.

c. Aspek Monitoring dan Evaluasi.

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Dana Desa oleh masing-masing K/L teknis masih belum berjalan sinergi, masing-masing menjalankan sesuai dengan kewenangannya.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari semakin banyak terjadi penyalahgunaan /penyelewengan yang terkait dengan Dana Desa. Pengawasan yang dilakukan berjenjang oleh mulai dari Pemerintah Provinsi hingga masyarakat desa masih belum berjalan optimal.

d. Aspek Pendamping Desa

- Peran pendamping desa masih belum efektif. Kuantitas dan kualitas pendamping desa masih belum memadai karena masih ada pendamping desa yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan kehadirannya di desa hanya sebatas formalitas. Namun demikian, pada tahun 2017 telah



mulai dilakukan perbaikan melalui penambahan jumlah pendamping desa dan peningkatan kualitasnya.

- Mekanisme rekrutmen pendamping desa dilakukan terpusat melalui Kementerian Desa dan belum mengikutsertakan pemerintah daerah dalam proses rekrutmen.

e. Aspek Pembinaan

- Permasalahan dualisme regulasi dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri yang seringkali dimaknai sebagai “diperbolehkan/sesuai aturan” atau “tidak diperbolehkan/tidak sesuai aturan” dapat berpotensi menjadi masalah hukum sehingga dalam implementasi di tingkat desa sering membuat kegamangan dari pemerintah desa maupun masyarakat desa untuk menentukan penggunaan Dana Desa. Untuk menyamakan persepsi atas regulasi tersebut, diperlukan pembinaan yang berkelanjutan untuk menjaga konsistensi penggunaan Dana Desa.
- Masih banyak desa yang mengalami kesulitan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sehingga diperlukan pembinaan yang lebih intensif untuk membantu desa. Selain itu, desa masih sangat memerlukan pembinaan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan keuangan desa.
- Kegiatan sosialisasi kebijakan Dana Desa dan transparansi penggunaannya kepada masyarakat desa masih belum optimal karena masih ada sebagian masyarakat desa belum mengetahui program kebijakan Dana Desa yang merupakan kebijakan pemerintah untuk percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan desa.

5. Total Dana Desa dari APBN yang dialokasikan selama tahun 2015-2017 mencapai Rp127,75 triliun dan telah menghasilkan output penggunaan Dana Desa berupa penyediaan sarana prasarana infrastruktur dasar, penyediaan layanan dasar publik di desa, serta pengembangan perekonomian desa. Kinerja Dana Desa dinilai telah memberikan manfaat positif bagi pembangunan desa sehingga diharapkan dapat mengatasi kesenjangan maupun mengurangi kemiskinan desa, meskipun demikian optimalisasi pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan.

6. Sejak Dana Desa mulai diimplementasikan tahun 2015, tingkat kemiskinan perdesaan menurun dari 14,2 persen (tahun 2015) menjadi 13,9 persen (tahun 2017). Jumlah penduduk miskin perdesaan turun dari 17,94 juta jiwa (tahun 2015) menjadi 17,10 juta jiwa (tahun 2017). Sementara itu, *gini ratio* perdesaan pada tahun 2015 sebesar 0,334 dan turun menjadi 0,320 di tahun 2017. Seiring dengan membaiknya kinerja indikator kemiskinan desa dan ketimpangan antar



desa tersebut maka mengindikasikan bahwa program/kegiatan Pemerintah salah satunya Dana Desa dinilai memberikan manfaat positif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di tingkat desa walaupun signifikansi dampaknya belum dapat diukur dalam tiga tahun pelaksanaan Dana Desa.

7. Dukungan pendanaan dari Pemerintah terhadap program/kegiatan sampai ke tingkat Desa sangat besar antara lain Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) 10 persen dari Dana Transfer Umum Kabupaten/Kota, 10 persen dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota, dan bantuan dari Provinsi, namun desa belum cukup siap untuk mengelola dana-dana tersebut dengan baik dan bijak karena keterbatasan kapasitas SDM di desa. Di sisi lain, Pemerintah Pusat juga telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui program PKH, Rastra, dan KUR. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan agar upaya pengentasan kemiskinan desa dapat berjalan lebih efektif. Penguatan penggunaan Dana Desa yang disinergikan dengan pelaksanaan program prioritas PKH, Rastra, dan KUR merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh dalam upaya mengentaskan kemiskinan desa.

Pada bulan November 2017, Kementerian Keuangan menerbitkan Buku Saku Dana Desa (Kemenkeu, 2017), dalam buku saku tersebut dipaparkan juga hasil evaluasi terhadap alokasi Dana Desa. Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa dilakukan selama dua tahun yaitu sejak alokasi Dana Desa mulai masuk dalam penganggaran, Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Kesimpulan yang dihasilkan dari hasil evaluasi dalam buku saku tersebut adalah dilakukannya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa. Hal tersebut dapat terwujud dengan menyiapkan regulasi yang baik sehingga menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kajian lainnya dilakukan oleh SMERU (2018) yang melakukan evaluasi atas tiga tahun pelaksanaan Undang-Undang Desa. Adapun hasilnya adalah untuk kualitas tata kelola, baru merupakan langkah awal menuju demokratisasi desa, peran warga belum optimal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dimana hal ini menjadi faktor penting demokratisasi desa, dan penguatan peran harus menjadi perhatian pemangku kebijakan. Demokrasi pada saat pemilihan kepala desa hendaknya melibatkan seluruh warga, sehingga amanah UU Desa bisa tercapai. Demokrasi sejatinya menjadi wadah afirmasi warga marjinal, pada kenyataannya saat ini masih bersifat elitis. Selain itu



revitalisasi demokrasi dapat dicapai melalui delibrasi yang efektif. Delibrasi tidak untuk melemahkan melainkan justru menguatkan legitimasi pemerintah desa. Hal ini sangat cocok dengan roh dari UU Desa dimana semua keputusan di desa berbasis partisipasi warga dalam berbagai ruang publik.





## DATA DAN METODOLOGI

### A. Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk saling melengkapi kebutuhan data yang diperlukan. Sebagai contoh, data sekunder digunakan untuk melihat dampak secara agregat, akan tetapi analisis data sekunder terbatas kepada identifikasi lokasi kabupaten/kota, sedangkan data primer dapat mencakup identifikasi level desa / kelurahan sehingga memberikan strategi identifikasi penelitian yang lebih baik. Namun, data primer mencakup wilayah yang terbatas dibandingkan dengan data sekunder. Tabel 3.1 memaparkan data yang digunakan dalam penelitian:

**Tabel 3.1 Data Penelitian**

Jenis Data	Periode	Unit Sampling	Keterangan
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	2016-2017	Desa	Kementerian Desa dan PDTT
Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)	2012-2017	Individu	Badan Pusat Statistik
Proyeksi Jumlah Penduduk	2012-2017	Kabupaten/Kota	Badan Pusat Statistik
Alokasi Dana Desa	2015-2017	Kabupaten/Kota	Kementerian Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	2012-2017	Kabupaten/Kota	Kementerian Keuangan
Survei Dana Desa (Aparat)	2018	Desa	Data Primer Tim (BKF dan PKN STAN)
Survei Dana Desa (Rumah Tangga)	2018	Rumah Tangga	Data Primer Tim (BKF dan PKN STAN)

Penelitian ini memperoleh data primer dari survei mengenai aktivitas dan demografi masyarakat desa baik ke aparat desa maupun rumah tangga yang dilakukan melalui kerja sama antara Badan Kebijakan Fiskal dan Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan. Kami memanfaatkan domisili mahasiswa STAN yang



berencana kembali ke daerah domisilinya pada saat liburan perkuliahan. Gambar 3.1 memperlihatkan proses pengumpulan data survei Dana Desa.

Survei Dana Desa berhasil mendapatkan data alfanumerik dan foto yang terkait wawancara dan infrastruktur desa. Kuesioner survei terdiri dari 10 blok pertanyaan yang meliputi karakteristik responden dan rumah tangga, sumber pendanaan desa (termasuk Dana Desa), badan usaha milik desa, pekerjaan, program lain sebelum adanya Dana Desa, kesehatan, kesetaraan gender, partisipasi pada program kemiskinan, infrastruktur desa dan pelayanan publik. Detail pertanyaan dalam kuesioner terdapat dalam lampiran 1 dan 2.

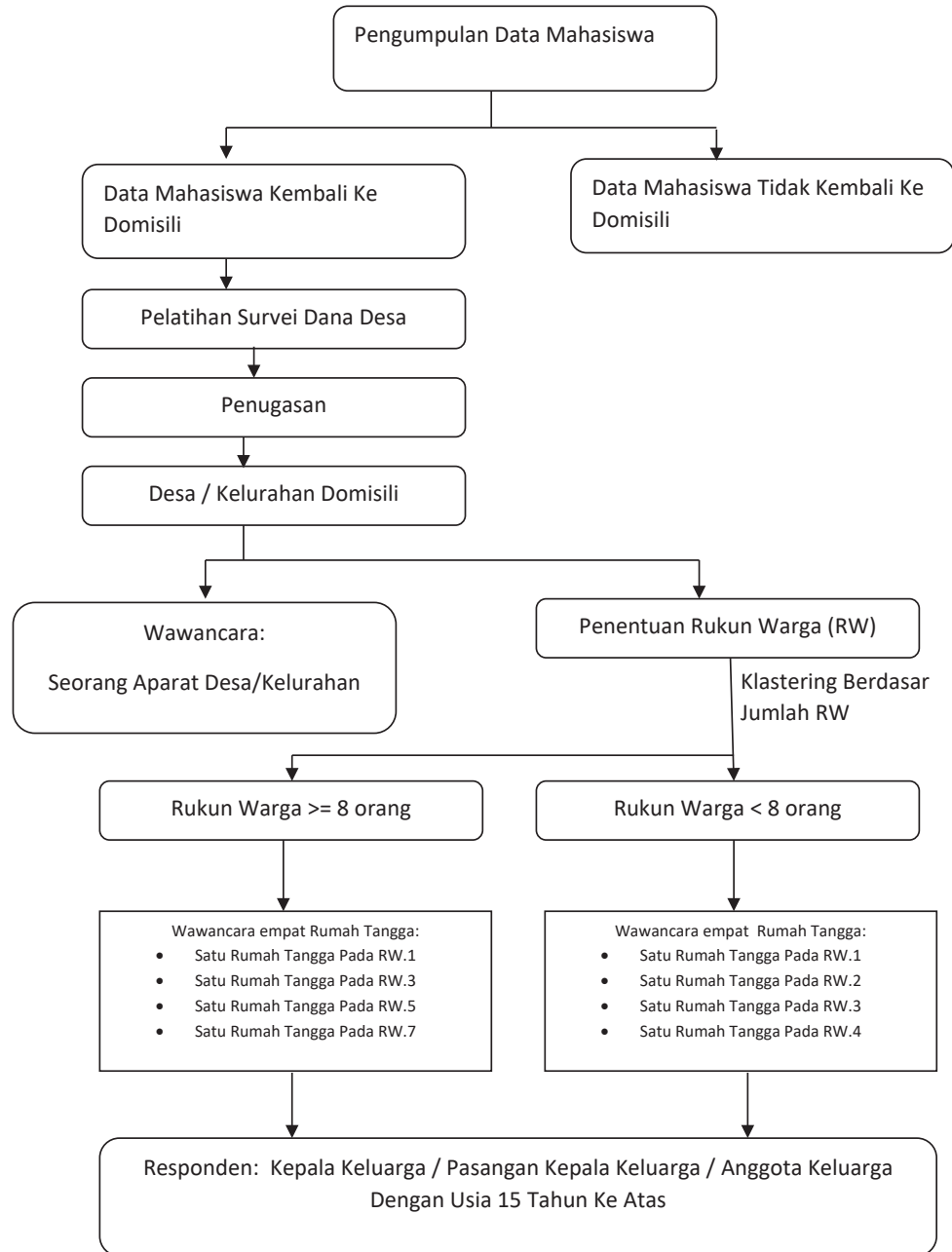
Survei dilakukan pada tanggal 1-20 Agustus 2018, kemudian setiap mahasiswa melakukan pencatatan pada formulir "Google Form" pada tanggal 21-30 Agustus 2018. Data survei Dana Desa mendapatkan 1.111 kuesioner untuk aparat desa dan 904 kuesioner untuk aparat kelurahan. Survei yang sama menghasilkan 6.095 rumah tangga di wilayah administrasi desa dan 8.205 rumah tangga di wilayah administrasi kelurahan. Data pada level rumah tangga lebih besar daripada data pada level aparat disebabkan terdapat aparat desa/kelurahan yang menolak untuk melakukan wawancara karena berbagai alasan.

Gambar 3.2 menyajikan peta sebaran wilayah survei Dana Desa pada tahun 2018 berdasarkan lokasi desa atau kelurahan. Titik berwarna merah adalah wilayah administrasi desa dan titik berwarna biru adalah wilayah administrasi kelurahan. Peta sebaran mensiratkan sebagian besar sampel berada di Pulau Jawa, kemudian sebagian sampel berlokasi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan kepulauan lainnya di Indonesia. Survei Dana Desa 2018 tidak mencakup sampel yang berasal dari Pulau Papua. Peta ini juga memperlihatkan bahwa wilayah sampel yang mendapatkan intervensi berdekatan dengan wilayah sampel kontrol. Hal ini indikasi wilayah yang mendapat intervensi dan wilayah kontrol memiliki karakteristik lokasi geografi yang seimbang.

Tabel 3.2 memperlihatkan sampel unit dan jenis responden Dana Desa. Kami berhasil melakukan wawancara terhadap 2.015 sampel aparat desa/kelurahan dan 14.300 sampel rumah tangga di desa/kelurahan di Indonesia. Sebagian besar responden berasal dari wilayah Sumatera dan Jawa. 90% responden berasal dari wilayah Sumatera dan Jawa dan 10% responden berasal dari Indonesia tengah dan timur. Keterbatasan ini dikarenakan kami tidak dapat menggunakan metode sampling yang dilakukan secara umum dalam penelitian. Pengambilan sampel didasarkan kepada domisili mahasiswa dan rencana kepulangan mahasiswa pada saat liburan perkuliahan. Akan tetapi, besarnya sampel yang didapatkan diharapkan dapat menggambarkan kondisi pelaksanaan Dana Desa dan dampak Dana Desa pada wilayah survei.

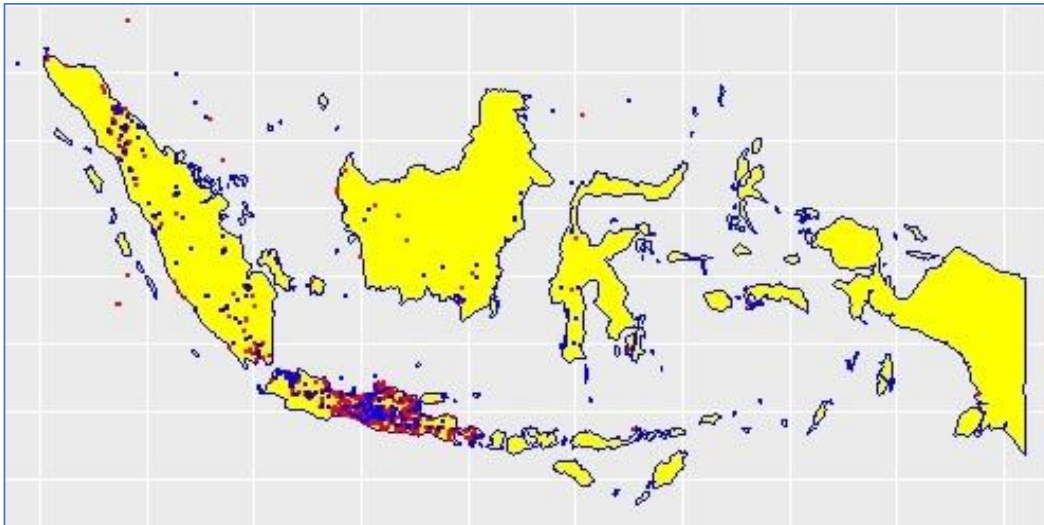


Gambar 3.1 Proses Pengumpulan Data Survei Dana Desa





Gambar 3.2 Peta Sebaran Survei Desa dan Kelurahan



Sumber: Diolah Tim Peneliti

Tabel 3. 2 Sebaran Sampel Unit Survei Dana Desa

Wilayah	Aparat (Obs)			Masyarakat (Obs)		
	Desa	Kelurahan	Jumlah	Desa	Kelurahan	Jumlah
Sumatera	149	259	408	932	2.504	3.436
Jawa	907	565	1.472	4.773	5.018	9.791
Indonesia Tengah dan Timur	55	80	135	390	683	1.073
Jumlah Responden	1.111	904	2.015	6.095	8.205	14.300

## B. Strategi Identifikasi Evaluasi Program

Pada bagian ini kami memaparkan desain metode regresi program evaluasi yang dilakukan serta tes asumsi dalam pelaksanaan metode analisis tersebut. Kami menggunakan dua metode desain sesuai dengan informasi keluaran yang diperlukan, yaitu metode *first-difference* dan *difference-in-difference* (DID) adaptasi intervensi kontinu menggunakan alokasi Dana Desa per kapita.

## C. Desain Regresi

Karena program Dana Desa diimplementasikan pada seluruh daerah administrasi desa di Indonesia, dan daerah administrasi kelurahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemerintahan administrasi desa sehingga tidak seluruh daerah



pembandingan (kelurahan) yang memiliki karakteristik yang serupa dengan daerah yang mendapatkan intervensi (desa). Sebagai contoh, perbedaan struktur keuangan pemerintah desa dan kelurahan. Lokasi kelurahan yang berada jauh dari lokasi desa juga dapat menyebabkan perbedaan karakteristik dari keadaan sosial ekonomi masyarakat. Contohnya, kelurahan di wilayah DKI Jakarta akan memiliki tingkat perekonomian dan infrastruktur yang lebih baik.

Perbedaan jumlah penduduk dan luas wilayah antar setiap wilayah kabupaten/kota yang berbeda-beda menjadikan sulitnya membandingkan dampak rata-rata dari Dana Desa tanpa membuat satuan yang sama untuk seluruh wilayah. Contohnya, daerah di Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang lebih besar daripada jumlah penduduk di Pulau Sumatera ataupun pulau lainnya di Indonesia bagian tengah dan timur. Selain itu, terdapat berbagai faktor lain yang bersama-sama dengan Dana Desa mempengaruhi pekerjaan dan hasil lainnya. Hal tersebut mempersulit dalam melakukan pengukuran dampak Dana Desa.

Untuk mengatasi masalah tersebut, kami membuat alokasi Dana Desa per kapita dengan membagi alokasi Dana Desa per kabupaten/kota atau desa/kelurahan pada dengan proyeksi jumlah penduduk kabupaten/kota atau desa/kelurahan pada tahun yang sama. Hal ini membuat satuan yang sama pada setiap kabupaten/kota dan intervensi yang bersifat kontinu. Daerah administrasi desa adalah kelompok yang memperoleh intervensi dan daerah administrasi kelurahan merupakan kelompok pembandingan. Selanjutnya kami juga melakukan pemilihan kelurahan berdasarkan lokasi geografi kelurahan tersebut dibandingkan dengan lokasi geografi desa sampel.

### 1. Metode *First-Difference* Adaptasi Intervensi Kontinu

Metode *first-difference* dengan adaptasi intervensi kontinu menggunakan alokasi Dana Desa per kapita dilakukan untuk melakukan analisis dampak program Dana Desa terhadap pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan melihat keadaan desa (tidak mengikutsertakan wilayah administrasi pembandingan kelurahan) sebelum dan sesudah implementasi program Dana Desa. Adaptasi intervensi menggunakan alokasi Dana Desa per kapita yang bersifat variabel kontinu dilakukan karena adanya perbedaan intensitas intervensi pada setiap desa sampel disebabkan perbedaan jumlah penduduk. Regresi yang digunakan adalah:

$$Y_{st} = \beta_0 + \beta_1 DD_{st} + \gamma_s + \mu_t + \epsilon_{st} \quad (1)$$

$Y_{ist}$  adalah BUM Desa per kapita untuk desa  $s$  pada tahun  $t$ . Kami mengkonstruksi panel data BUM Desa per kapita berdasarkan survei Dana Desa yang dilakukan pada tahun 2018 dengan memanfaatkan tahun pembuatan BUM Desa di desa sampel. Sebagai contoh, jika tahun pembuatan BUM Desa adalah tahun 2016 maka variabel  $Y_{ist}$  adalah 0 untuk tahun 2015 atau sebelumnya dan nilai BUM Desa per kapita untuk tahun 2016 atau setelahnya.  $DD_{st}$  adalah variabel intervensi, yaitu alokasi Dana Desa



per kapita pada desa  $s$  pada tahun  $t$ . Alokasi Dana Desa adalah 0 untuk seluruh desa sebelum adanya intervensi (2014 atau sebelumnya) dan nilai kontinu alokasi Dana Desa per kapita setelah adanya intervensi (2015 atau setelahnya). Kami memasukkan *fixed effect* desa ( $\gamma_s$ ) untuk menangkap perbedaan tiap wilayah desa sampel yang tidak dapat diobservasi dan tidak berubah selama masa analisis. Kami memasukkan *fixed effect* tahun ( $\mu_t$ ) untuk menangkap dampak waktu yang berkorelasi dengan variabel BUM Desa per kapita secara makro. Kami melakukan klastering pada level propinsi untuk menangkap persamaan karakteristik yang tidak dapat diobservasi di dalam wilayah propinsi yang sama.

## 2. Metode *Difference-In-Difference* (DID) Adaptasi Intervensi Kontinu

Kami menggunakan metode *difference-in-difference* (DID) untuk melakukan analisis dampak program Dana Desa terhadap pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan pekerjaan masyarakat desa. Analisis pertama (BUM Desa) menggunakan data panel yang berasal dari survey Dana Desa. Sementara itu analisis kedua menggunakan data *cross section* “berulang” yang berasal dari SUSENAS 2010-2017.

Pemanfaatan eksperimen natural (*natural experiment*) untuk melakukan evaluasi program mendapatkan penerimaan yang luas dalam penelitian empiris di bidang ekonomi dan sosial. Kendala perbandingan sederhana antara daerah yang mendapatkan intervensi (desa) setelah mendapatkan intervensi (Dana Desa) akan mencampuradukkan dampak dari intervensi dengan efek lainnya seperti efek waktu. DID membandingkan daerah yang mendapatkan intervensi dengan daerah yang tidak mendapatkan intervensi, sehingga mengatasi perbedaan efek waktu antara sebelum dan sesudah intervensi.

Kerangka metode *difference-in-difference* dideskripsikan sebagai berikut (lihat Abadie, 2005; Bhattacharya & Sood, 2006; Puhani, 2012). Misal dampak intervensi (*treatment effect*,  $\delta$ ) dapat didefinisikan dengan perbedaan hasil potensial dengan adanya intervensi ( $Y^1$ ) dan hasil potensi tanpa adanya intervensi ( $Y^0$ ):

$$\delta = E[Y^1|T = 1, I = 1, X] - E[Y^0|T = 1, I = 1, X] \quad (2)$$

dimana  $T$  dan  $I$  adalah variabel binari untuk waktu dan intervensi,  $E[.]$  adalah ekspektasi dari hasil potensial dan  $X$  adalah variabel kontrol yang mempengaruhi variabel hasil yang dianalisis. Kaidah observasi variabel hasil dan ekspektasi hasil potensial  $Y^0$  kondisional  $T$ ,  $I$ , dan  $X$  adalah:

$$Y = TI \times Y^1 + (1 - TI) \times Y^0 \quad (3)$$

$$E[Y^0|T, I, X] = \alpha T + \beta I + \lambda X \quad (4)$$

menggunakan persamaan (2) dan (4) maka dapat diperoleh hasil potensial  $Y^1$  kondisional  $T$ ,  $I$ , dan  $X$ , yaitu:



$$E[Y^1|T, I, X] = \delta + \alpha T + \beta I + \lambda X \quad (5)$$

substitusi persamaan (4), (5) dengan persamaan (3) maka dampak intervensi  $\delta$  dapat diidentifikasi dengan interaksi dampak waktu (T) dan intervensi dampak intervensi (I):

$$Y = TI x [\delta + \alpha T + \beta I + \lambda X] + (1 - TI) x [\alpha T + \beta I + \lambda X]$$

$$Y = \delta TI + \alpha T + \beta I + \lambda X \quad (6)$$

Kami mengembangkan persamaan (6) dengan menggunakan variabel intervensi dengan variabel kontinu daripada menggunakan variabel binari untuk menangkap perbedaan intensitas intervensi pada tiap wilayah yang mendapat intervensi disebabkan perbedaan jumlah penduduk. Regresi dasar *difference-in-difference* yang kami gunakan menjadi sebagai berikut:

$$Y_{ist} = \alpha_0 + \alpha_1 DD_{st} + \alpha_2 DD^2_{st} + \alpha_3 Z'_{st} + \alpha_4 X'_{ist} + \gamma_s + \mu_t + \epsilon_{ist} \quad (7)$$

$Y_{ist}$  adalah indikator variabel dari jumlah BUM Desa per kapita, pekerjaan, dan jam kerja untuk wilayah/individu  $i$  yang tinggal di kabupaten/kota/desa/kelurahan  $s$  pada tahun  $t$ . Untuk estimasi jumlah BUM Desa per kapita di wilayah intervensi, unit analisis adalah desa/kelurahan sehingga  $i = s$ .  $DD_{st}$  adalah variabel intervensi, yaitu alokasi Dana Desa per kapita pada kabupaten/kota/desa/kelurahan  $s$  pada tahun  $t$ . Alokasi Dana Desa adalah 0 untuk seluruh kabupaten/kota sebelum adanya intervensi (2014 atau sebelumnya) dan nilai kontinu untuk daerah yang mendapatkan intervensi (desa) setelah adanya intervensi (2015 atau setelahnya).  $DD^2$  adalah alokasi Dana Desa per kapita kuadrat untuk melihat dampak Dana Desa yang tidak linear.

Pendapatan asli daerah per kapita, pajak daerah per kapita, retribusi daerah per kapita, hasil pengelolaan kekayaan daerah per kapita, dana bagi hasil per kapita, dana alokasi umum per kapita, dana alokasi khusus per kapita, hibah per kapita, dana darurat per kapita, dana otonomi khusus per kapita adalah vektor variabel kontrol yang terdapat di  $Z'_{st}$  pada tingkat kabupaten/kota. Variabel ini sangat bermanfaat untuk memisahkan dampak Dana Desa dan penghasilan lainnya yang diterima oleh wilayah intervensi dan wilayah kontrol.  $X'_{ist}$  adalah vektor variabel kontrol di level individu unit sampel, mencakup jenis kelamin, usia, status pernikahan, kedudukan di dalam rumah tangga, pendidikan (tahun), dan apakah seorang individu tinggal di daerah pedesaan atau perkotaan.

Kami memasukkan *fixed effect* kabupaten/kota/desa/kelurahan ( $\gamma_s$ ) untuk menangkap perbedaan tiap wilayah sampel yang tidak dapat diobservasi dan tidak berubah selama masa analisis. Selain hal itu, dengan memberikan satu variabel pada tiap kabupaten/kota melalui *fixed effect* kabupaten/kota/desa/kelurahan, maka



*fixed effect* kabupaten/kota/desa/kelurahan menangkap lebih baik perbedaan antara daerah daripada satu variabel intervensi (I) pada persamaan (6) yang digunakan dalam standar metode *difference-in-differences* (DID). Sebagai contoh, perkembangan kabupaten/kota di wilayah pulau Jawa lebih baik di bandingkan perkembangan kabupaten/kota di luar Jawa sehingga kesempatan bekerja yang lebih besar di wilayah yang berada di Pulau Jawa baik sebelum dan sesudah adanya Dana Desa.

Kami juga memasukkan *fixed effect* tahun ( $\mu_t$ ) untuk menangkap perbedaan yang tidak dapat diobservasi dan berhubungan dengan waktu. Variabel tersebut juga mengganti variabel waktu (T) pada persamaan (6) dalam standar metode *difference-in-differences* (DID) karena perubahan makro ditangkap tidak hanya berdasarkan perubahan sebelum dan sesudah tetapi juga perubahan setiap tahunnya; dan  $\epsilon_{ist}$  adalah kesalahan *idiosinkratik*. Kami melakukan klustering pada level rumah tangga untuk menangkap persamaan karakteristik yang tidak dapat di observasi di dalam keluarga.

### **Tes Hipotesis Tren Paralel**

Kunci asumsi identifikasi dalam metode evaluasi yang digunakan yaitu adanya tren yang paralel variabel hasil yang dilakukan penelitian antara wilayah yang mendapat intervensi dan wilayah kontrol tanpa adanya intervensi. Meskipun tes secara langsung tren paralel kedua jenis wilayah tersebut tanpa adanya intervensi untuk seluruh waktu penelitian tidak dapat dilakukan, namun tes tren paralel untuk waktu sebelum adanya intervensi dapat dilakukan untuk memahami tren kedua grup wilayah tersebut (lihat Bertrand, Duflo, & Mullainathan, 2004; Labonne, 2013).

Untuk keperluan ini, kami melakukan uji placebo dengan menggunakan data sebelum adanya intervensi (2014 dan sebelumnya) dan membuat intervensi buatan seperti menggunakan Dana Desa per kapita tahun 2017 yang diberikan pada tahun 2013 atau 2014. Jika terdapat perbedaan tren sebelum adanya intervensi dan atau hasil regresi palsu dari yang diperoleh dari persamaan (7) kita akan mendapatkan hasil substansial pada uji placebo. Kami menggunakan persamaan yang sama dengan persamaan (7) untuk melakukan uji plasebo namun kami batasi sampai tahun 2014 dan mengganti intervensi pada tahun 2013 atau 2014.





## HASIL DAN DISKUSI

### A. Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Pada bagian ini, kami menyediakan statistik deskriptif, dan hasil analisis empiris terhadap dampak Dana Desa terhadap eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Analisis kami mencakup dampak rata-rata dari Dana Desa, dan heterogenitas dari Pulau Jawa dan Luar Jawa. Tabel 4.1 memperlihatkan nilai rata-rata dan standar deviasi untuk alokasi Dana Desa, dan BUM Desa per kapita. Dana Desa adalah nilai kontinu dari alokasi nominal Dana Desa per kapita (dalam jutaan rupiah) dalam satu tahun. BUM Desa per kapita adalah variabel kontinu dari jumlah BUM Desa per kapita tiap desa / kelurahan dalam satu tahun.

Estimasi rata-rata Dana Desa per kapita yang diperoleh adalah Rp375.100 untuk tiap desa sampel pada tahun 2015-2017. Jumlah badan usaha lokal di desa dan kelurahan per kapita sekitar 1%-2% sebelum adanya intervensi. BUM Desa per kapita meningkat secara substansial menjadi sekitar 8% sedangkan kelurahan hanya meningkat sekitar 0.4% setelah periode pelaksanaan program Dana Desa. Peningkatan di desa terjadi pada seluruh jenis usaha BUM Desa. Peningkatan bentuk usaha lembaga keuangan dan perdagangan/distribusi sebagai unit usaha utama BUM Desa pada periode setelah adanya Dana Desa banyak dilakukan oleh pemerintah desa. BUM Desa per kapita dengan jenis usaha lembaga keuangan meningkat 200% dan badan usaha yang sama dengan jenis perdagangan/distribusi meningkat 400% jika dibandingkan periode sebelum adanya program Dana Desa. Bentuk usaha penyewaan seperti penyewaan alat-alat pertanian, gedung pertemuan dan kendaraan yang paling besar pertumbuhannya setelah program Dana Desa, yaitu sekitar 6 kali lipat dari periode sebelum adanya Dana Desa.

Gambar 4.1 menyajikan tren jumlah BUM Desa pada tiap wilayah sampel desa dan Badan Usaha Ekonomi Kelurahan pada tiap wilayah sampel kelurahan baik sebelum pelaksanaan program Dana Desa (2000-2014) dan setelahnya (2015-2017). Kami membentuk data panel dari survei Dana Desa 2018 dengan memanfaatkan tahun pendirian BUM Desa / Badan Usaha Ekonomi Kelurahan. Desa adalah tren jumlah



BUM Desa di wilayah administrasi desa dan Kelurahan adalah tren jumlah Badan Usaha Ekonomi Kelurahan di wilayah administrasi kelurahan.

**Tabel 4.1 Nilai Rata-rata dan Standar Deviasi**

Intervensi dan Hasil Variabel	Sebelum (2010-2014)		Setelah (2015-2017)	
	Intervensi	Kontrol	Intervensi	Kontrol
Dana Desa / Kapita (Juta)	0.000 (0.0000)	0.000 (0.0000)	0.3751 (3.9725)	0.000 (0.0000)
BUM Desa / Kapita	0.0190 (0.1065)	0.0108 (0.0541)	0.0840 (0.2624)	0.0146 (0.0607)
BUM Desa / Kapita (Lembaga Keuangan)	0.0127 (0.0930)	0.0072 (0.0337)	0.0406 (0.1333)	0.0090 (0.0368)
BUM Desa / Kapita (Perdagangan/Distribusi)	0.0055 (0.0567)	0.0012 (0.0158)	0.0278 (0.1240)	0.0020 (0.0257)
BUM Desa / Kapita (Penyewaan)	0.0032 (0.0347)	0.0010 (0.0157)	0.0197 (0.2074)	0.0011 (0.0154)
BUM Desa / Kapita (Pelatihan)	0.0014 (0.0214)	0.0033 (0.0260)	0.0110 (0.0970)	0.0039 (0.0263)
BUM Desa / Kapita (Pariwisata)	0.0014 (0.0210)	0.0002 (0.0044)	0.0071 (0.0461)	0.0004 (0.0064)
BUM Desa / Kapita (Air Bersih)	0.0026 (0.0363)	0.0014 (0.0152)	0.0156 (0.0744)	0.0021 (0.0250)
BUM Desa / Kapita (Konstruksi)	0.0014 (0.0263)	0.0009 (0.0166)	0.0067 (0.0475)	0.0011 (0.0166)
N	5.555	4.520	4.444	3.616

Sumber: Diolah Tim Peneliti

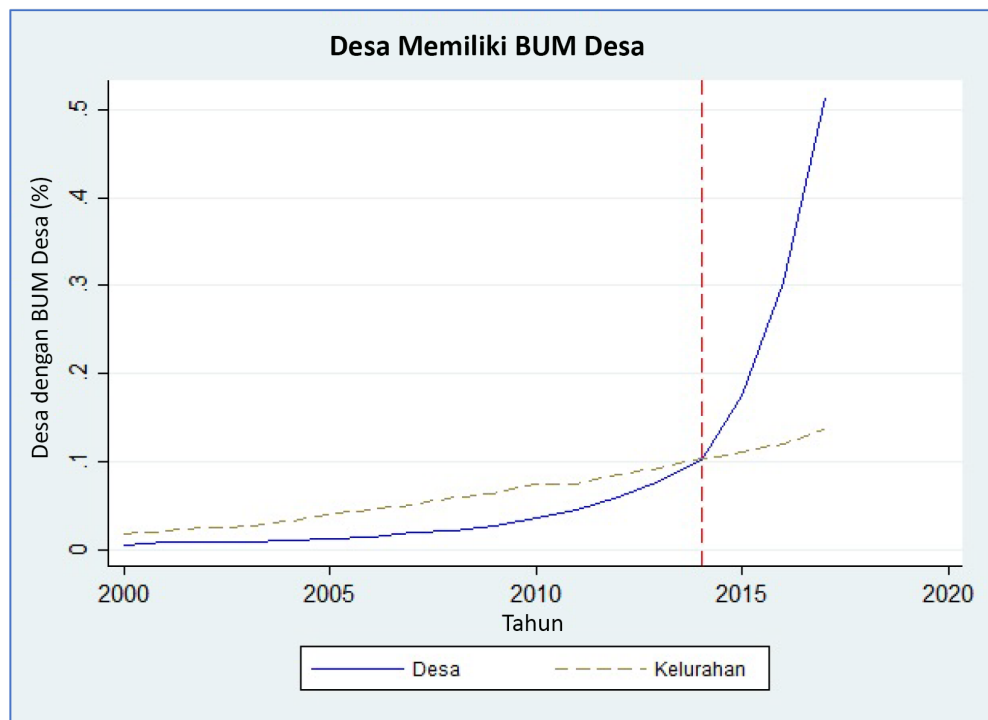
Pada tahun 2000, kurang dari 5% desa dan kelurahan yang memiliki BUM Desa / Badan Usaha Ekonomi Kelurahan. Kepemilikan badan usaha lokal di wilayah desa atau kelurahan berkembang hingga meningkat mencapai sekitar 10% selama periode tahun 2000-2014. Wilayah administrasi perdesaan pada umumnya memiliki lebih sedikit badan usaha lokal dibandingkan wilayah administrasi kelurahan sebelum adanya program Dana Desa. Hal ini seperti yang diprediksikan karena wilayah administrasi kelurahan lebih maju dalam hal struktur ekonomi sehingga diharapkan memiliki infrastruktur pengembangan ekonomi yang lebih baik.

Akan tetapi, walaupun tren pertumbuhan Badan Usaha Ekonomi Kelurahan mengalami tingkat pertumbuhan yang tidak mengalami perubahan substansial, BUM Desa meningkat sangat pesat pada wilayah administrasi desa setelah periode adanya Dana Desa. Lebih dari 50% wilayah administrasi perdesaan memiliki BUM Desa pada



tahun 2017 sedangkan wilayah administrasi kelurahan hanya memiliki kurang dari 15% Badan Usaha Ekonomi Kelurahan pada tahun yang sama. Hal ini memberi indikasi program Dana Desa meningkatkan pertumbuhan pendirian BUM Desa di wilayah perdesaan dibandingkan dengan wilayah administrasi kelurahan.

**Gambar 4.1 Tren Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Ekonomi Kelurahan**



Sumber: Diolah Tim Peneliti

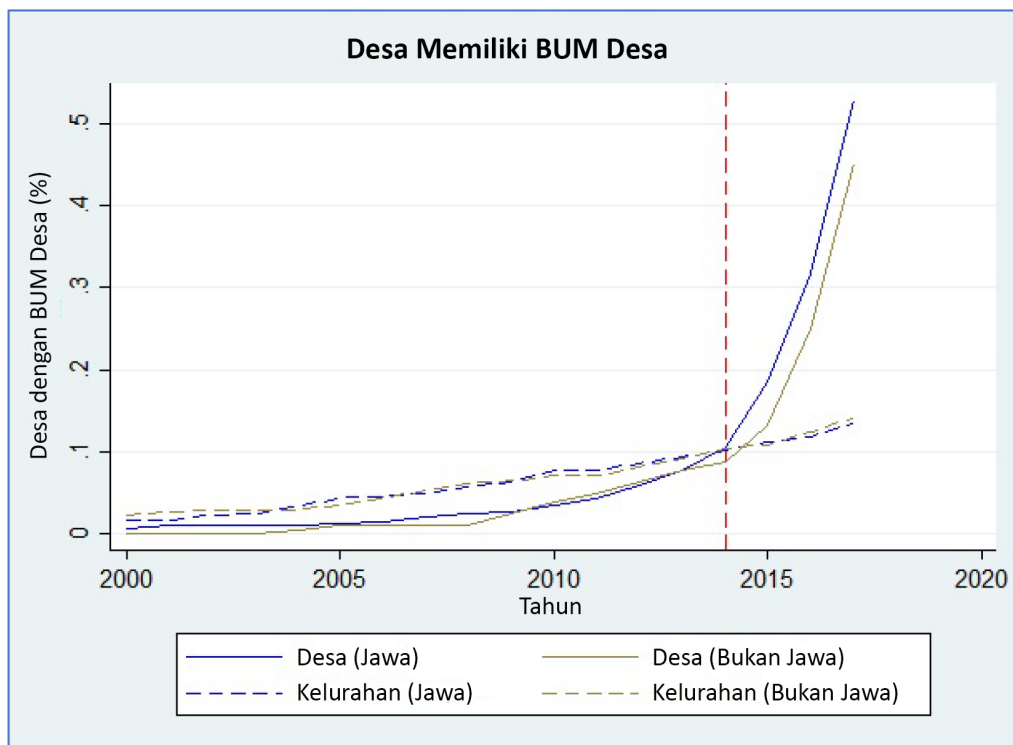
Pesan yang sama diberikan oleh estimasi pengaruh Dana Desa per kapita dengan pertumbuhan BUM Desa per kapita selama periode 2010-2015 dengan model *difference-in-difference* yang kami gunakan pada tabel 3a di lampiran 3. Model yang digunakan mengatakan bahwa setiap penambahan satu juta rupiah Dana Desa per kapita yang diberikan kepada pemerintah desa meningkatkan kemungkinan adanya 0.3 BUM Desa per kapita di wilayah administrasi desa. Dengan rata-rata Dana Desa per kapita sebesar 375 ribu rupiah, maka diestimasikan meningkatkan kemungkinan ketersediaan sekitar 0.1 BUM Desa per kapita.

Estimasi pada lampiran 3 menggunakan *fixed effect* desa / kelurahan untuk mengendalikan tiap perbedaan inheren yang tidak dapat diobservasi oleh peneliti dan tidak berubah selama periode penelitian. Sebagai contoh, struktur ekonomi yang lebih maju di tingkat kelurahan menyebabkan lebih banyak ketersediaan infrastruktur ekonomi. Kemudian, karena kami membentuk panel data dari survei yang dilaksanakan pada satu waktu, setiap perbedaan karakteristik desa / kelurahan yang tidak berubah selama periode penelitian yang dapat diperoleh oleh survei dana desa



2018 telah diperhitungkan dalam *fixed effect* desa / kelurahan. Karena hal tersebut, nilai estimasi pengaruh dana desa per kapita terhadap BUM Desa per kapita tidak bias jika perbedaan karakteristik desa / kelurahan yang diobservasi tersebut tidak mengalami perubahan tren selama periode penelitian dan karakteristik lainnya yang tidak dapat diobservasi dan berubah selama periode penelitian tidak merubah hasil estimasi. Sebagai contoh, jika tren pendapatan kelurahan selain dari dana desa selalu lebih besar daripada trend pendapatan desa selain dana desa selama periode 2010-2015, maka perbedaan pendapatan tersebut telah diperhitungkan dalam perhitungan metode yang digunakan. Kami juga menggunakan *fixed effect* tahun untuk menangkap setiap dampak perubahan yang tidak dapat diobservasi dan berubah setiap tahunnya pada tingkat makro. Misalkan, perubahan inflasi dan keadaan ekonomi makro lainnya yang berubah setiap tahunnya.

**Gambar 4.2 Tren BUM Desa/Badan Usaha Ekonomi Kelurahan, Jawa dan Luar Jawa**



Sumber: Diolah Tim Peneliti

Setelah melihat dampak rata-rata BUM Desa untuk seluruh wilayah sampel di Indonesia. Gambar 4.2 memperlihatkan tren peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Ekonomi Kelurahan di pulau Jawa dan pulau lainnya di luar Jawa. Keterangan Gambar 4.2. analog dengan Gambar 4.1. Tren serupa diperoleh baik di Pulau Jawa dan luar Jawa, ketika peningkatan Badan Usaha Milik Kelurahan yang relatif tidak berubah baik sebelum dan sesudah adanya program Dana Desa, wilayah administrasi desa mengalami peningkatan tren yang substansial setelah adanya



program Dana Desa. Hal ini mengindikasikan peningkatan jumlah BUM Desa merata tidak hanya terjadi di pulau Jawa tetapi juga terjadi di luar pulau Jawa. Hal ini juga dikonfirmasi melalui estimasi pengaruh Dana Desa per kapita dengan pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa per kapita selama periode 2010-2015 dengan model *difference-in-difference* yang kami gunakan pada tabel 3b di lampiran 3 bahwa peningkatan alokasi Dana Desa per kapita meningkatkan BUM Desa per kapita baik di pulau Jawa maupun luar Jawa.

**Gambar 4.3** Badan Usaha Milik Desa



Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti

Setelah melihat kuantitas BUM Desa, kami menyediakan analisis untuk memprediksi kualitas dari BUM Desa yang didirikan. BUM Desa yang dibentuk rata-rata masih bersifat tradisional. Berdasarkan foto BUM Desa yang dikumpulkan melalui survei Dana Desa dan pengamatan di lapangan, rata-rata BUM Desa dengan usaha perdagangan seperti layaknya toko sederhana yang berada di rumah penduduk serta jenis produk yang terbatas seperti peralatan rumah tangga, dan bahan bakar. Pengelolaan yang tradisional ini dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan BUM Desa. Sebagai contoh, tenaga kerja yang dapat diserap dengan BUM Desa yang bergerak sebagai toko kelontong mungkin hanya terbatas pada penjaga toko dan pengantar barang tersebut. Pengelolaan yang lebih profesional seperti kerjasama antara desa dengan swasta yang memiliki kompetensi dapat meningkatkan kinerja BUM Desa tersebut.

Kami melakukan beberapa uji plasebo untuk memastikan bahwa regresi yang kami lakukan bukanlah hasil regresi palsu (*spurious regression*). Lampiran 4 menyajikan hasil uji plasebo yang prosedurnya telah disebutkan pada bab sebelumnya. Hasil plasebo menunjukkan estimasi yang tidak signifikan berdasarkan uji plasebo dan koefisien yang menurun besar. Hal ini mendukung gagasan bahwa peningkatan BUM Desa disebabkan karena adanya intervensi Dana Desa.



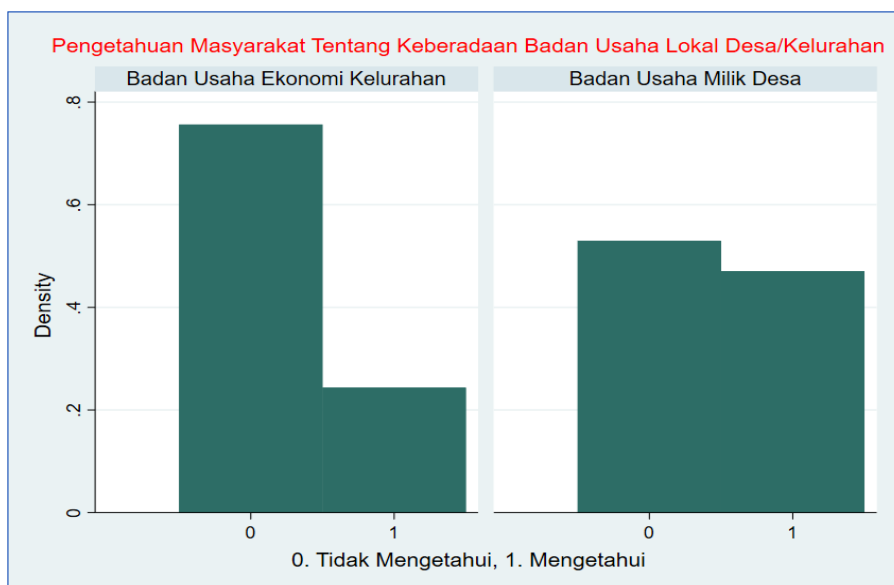
## B. Dana Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Lapangan Pekerjaan

Peningkatan infrastruktur ekonomi di desa / kelurahan seperti BUM Desa dan Badan Ekonomi Kelurahan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa jika dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Manajemen pengelolaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan luasnya sebaran informasi merupakan beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap manfaat infrastruktur tersebut. Pada bagian ini kami mengestimasi dampak Dana Desa per kapita, BUM Desa per kapita terhadap lapangan pekerjaan masyarakat desa. Untuk dapat mengetahui dampak BUM Desa terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, perlu diketahui keluasan informasi yang diperoleh masyarakat tentang badan usaha lokal desa, dan pemanfaatan badan usaha lokal tersebut.

### 1. Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa

Gambar 4.4 menyajikan proporsi rumah tangga sampel yang mengetahui keberadaan Badan Usaha Lokal di desa / kelurahannya untuk wilayah yang terdapat BUM Desa atau Badan Usaha Ekonomi Kelurahan. Secara umum, luasnya sebaran informasi tentang keberadaan badan usaha lokal di wilayah perdesaan lebih baik daripada di wilayah kelurahan. Sekitar 50% rumah tangga di perdesaan mengetahui adanya informasi BUM Desa, lebih besar jika dibandingkan dengan 30% rumah tangga sampel di wilayah administrasi kelurahan yang mengetahui informasi Badan Usaha Ekonomi Kelurahan. Hal ini mengindikasikan program-program desa seperti kegiatan musyawarah desa, spanduk pemanfaatan dana atau papan pengumuman desa dapat memberikan informasi bermanfaat kepada masyarakat desa.

**Gambar 4.4 Informasi Eksistensi Badan Usaha Lokal Desa/Kelurahan**



Sumber: Diolah Tim Peneliti



Tujuan pendirian dari Tujuan pendirian dari Badan Usaha Milik Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama untuk masyarakat kurang mampu. Semakin besarnya rumah tangga kurang mampu yang mengetahui informasi keberadaan badan usaha lokal memberikan indikasi desiminasi informasi tentang manfaat badan usaha lokal yang lebih tertarget untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin. Kemudian, apakah informasi tersebut hanya terbatas kepada grup tertentu seperti keluarga aparat kelurahan atau informasi badan usaha lokal diketahui oleh seluruh masyarakat di desa/kelurahan tersebut.

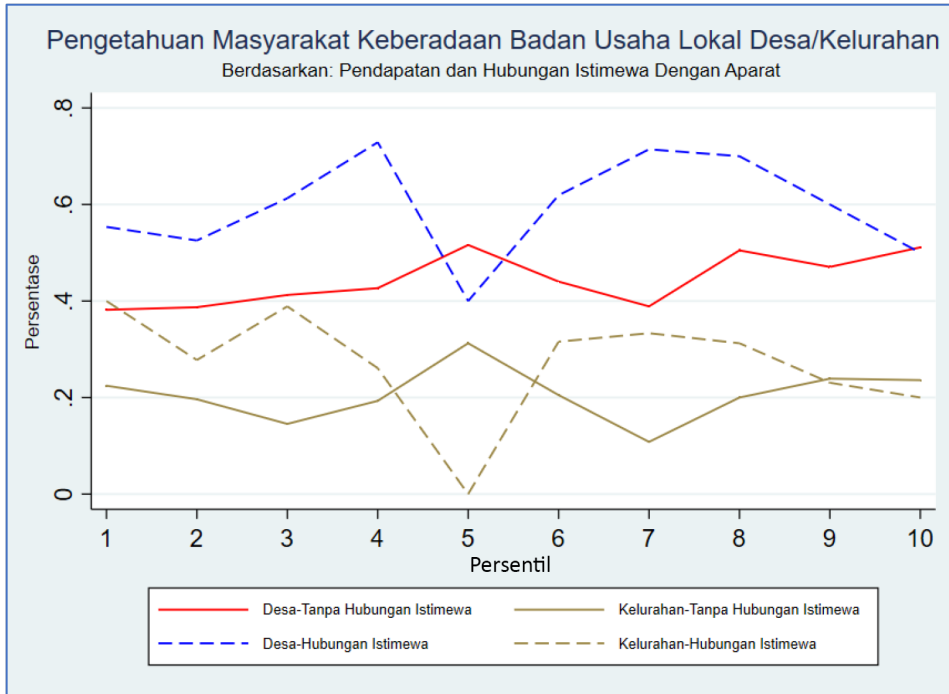
Gambar 4.5 memperlihatkan proporsi rumah tangga sampel yang mengetahui keberadaan badan usaha lokal desa/kelurahan berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga per kapita dan hubungan istimewa dengan aparat kelurahan. Pendapatan rumah tangga per kapita dibedakan menjadi 10 tingkat pendapatan mulai dari grup dengan rumah tangga pendapatan terendah (1) ke grup rumah tangga pendapatan terbesar (10). Hubungan istimewa didefinisikan adanya hubungan keluarga antara rumah tangga sampel dengan aparat desa atau kelurahan ataupun tokoh masyarakat seperti Ketua Rukun Tetangga atau Kepala Dusun yang memang rutin berinteraksi dengan aparat desa / kelurahan.

Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama untuk masyarakat kurang mampu. Semakin besarnya rumah tangga kurang mampu yang mengetahui informasi keberadaan badan usaha lokal memberikan indikasi desiminasi informasi tentang manfaat badan usaha lokal yang lebih tertarget untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin. Kemudian, apakah informasi tersebut hanya terbatas kepada grup tertentu seperti keluarga aparat kelurahan atau informasi badan usaha lokal diketahui oleh seluruh masyarakat di desa/kelurahan tersebut.

Gambar 4.5 memperlihatkan proporsi rumah tangga sampel yang mengetahui keberadaan badan usaha lokal desa/kelurahan berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga per kapita dan hubungan istimewa dengan aparat kelurahan. Pendapatan rumah tangga per kapita dibedakan menjadi 10 tingkat pendapatan mulai dari grup dengan rumah tangga pendapatan terendah (1) ke grup rumah tangga pendapatan terbesar (10). Hubungan istimewa didefinisikan adanya hubungan keluarga antara rumah tangga sampel dengan aparat desa atau kelurahan ataupun tokoh masyarakat seperti Ketua Rukun Tetangga atau Kepala Dusun yang memang rutin berinteraksi dengan aparat desa / kelurahan.



**Gambar 4.5 Informasi Pengetahuan Badan Usaha Lokal Berdasarkan Pendapatan Per Kapita dan Hubungan Istimewa**



Sumber: Diolah Tim Peneliti

Gambar 4.4 dan 4.5 juga mengindikasikan diseminasi informasi badan usaha lokal di wilayah perdesaan lebih baik jika dibandingkan badan usaha sejenis di wilayah kelurahan. Namun, penerima manfaat informasi keberadaan badan usaha lokal desa / kelurahan lebih besar diterima oleh rumah tangga yang merupakan keluarga dari aparat desa atau tokoh masyarakat dan penerimanya regresif terhadap pendapatan per kapita keluarga. Hal ini mengindikasikan masih terbatasnya akses informasi badan usaha lokal desa/kelurahan oleh rumah tangga miskin dan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Peluang perbaikan manajemen diseminasi informasi BUM Desa dapat dilakukan, seperti musyawarah desa yang melibatkan BUM Desa tidak hanya mengundang pihak-pihak dengan hubungan istimewa tetapi lebih ditekankan kepada masyarakat menengah ke bawah sehingga mereka mengetahui manfaat BUM Desa untuk mengembangkan taraf hidup mereka seperti program inklusi keuangan, pelatihan, penyaluran produk dan jasa masyarakat serta penyaluran produk pertanian atau pinjam sewa alat-alat pertanian.

## 2. Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa

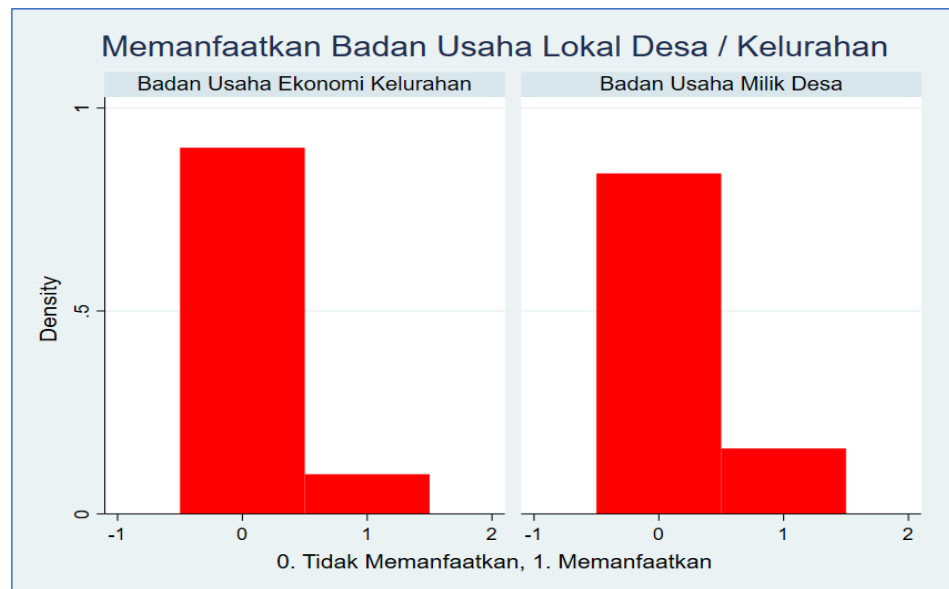
Keberadaan badan usaha milik desa/kelurahan akan membawa pengaruh positif pada perekonomian masyarakat apabila pemanfaatan masyarakat terhadap badan usaha tersebut optimal. Gambar 4.6 menunjukkan bagaimana pemanfaatan masyarakat





terhadap badan usaha yang ada di desa/kelurahan tempat mereka tinggal. Terlihat bahwa relatif sangat sedikit masyarakat yang pernah memanfaatkan keberadaan badan usaha di lingkungan mereka, walaupun tingkat pemanfaatan badan usaha di desa lebih tinggi (sekitar 15%) dari pada tingkat pemanfaatan badan usaha di kelurahan (sekitar 10%). Rendahnya tingkat pemanfaatan tersebut perlu menjadi perhatian mengingat keberadaan badan usaha tidak optimal membawa manfaat ekonomi pada masyarakat apabila tingkat pemanfaatan masyarakat rendah.

**Gambar 4.6 Pemanfaatan Badan Usaha Lokal oleh Masyarakat**

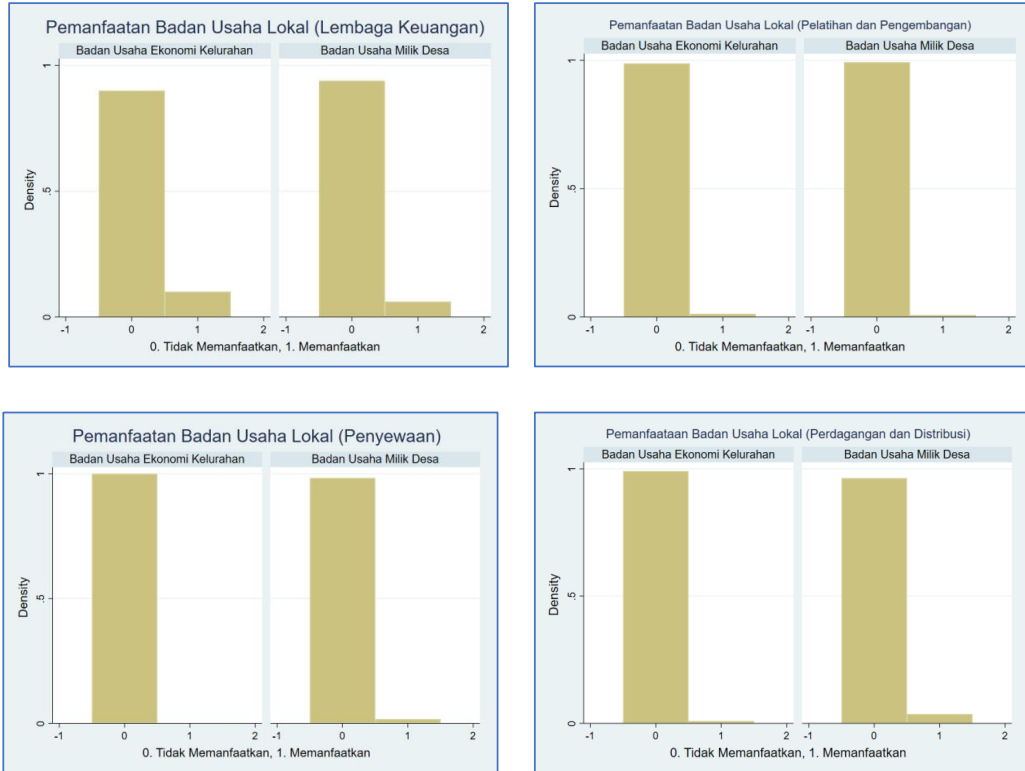


Sumber: Diolah Tim Peneliti

Selanjutnya, Gambar 4.7 memberikan pemanfaatan berdasarkan jenis layanan yang diberikan. Apabila dilihat berdasarkan jenis layanan yang disediakan, layanan jasa lembaga keuangan merupakan jenis layanan yang lebih cenderung dimanfaatkan oleh masyarakat desa/kelurahan. Meskipun penggunaan layanan keuangan di desa lebih rendah, namun penggunaan layanan perdagangan dan distribusi di perdesaan jauh lebih tinggi dari pada di kelurahan. Hal ini mengindikasikan layanan keuangan dan layanan perdagangan adalah dua jenis layanan yang lebih cenderung diakses oleh masyarakat desa, sedangkan di kelurahan, hanya layanan keuangan yang lebih cenderung untuk diakses oleh masyarakat. Sementara itu, pemanfaatan badan usaha lokal untuk pelatihan/pengembangan dan penyewaan sangat kecil sekali apabila dibandingkan dengan jenis layanan lainnya.



**Gambar 4.7 Pemanfaatan Badan Usaha Lokal oleh Masyarakat Berdasarkan Jenis Layanan**

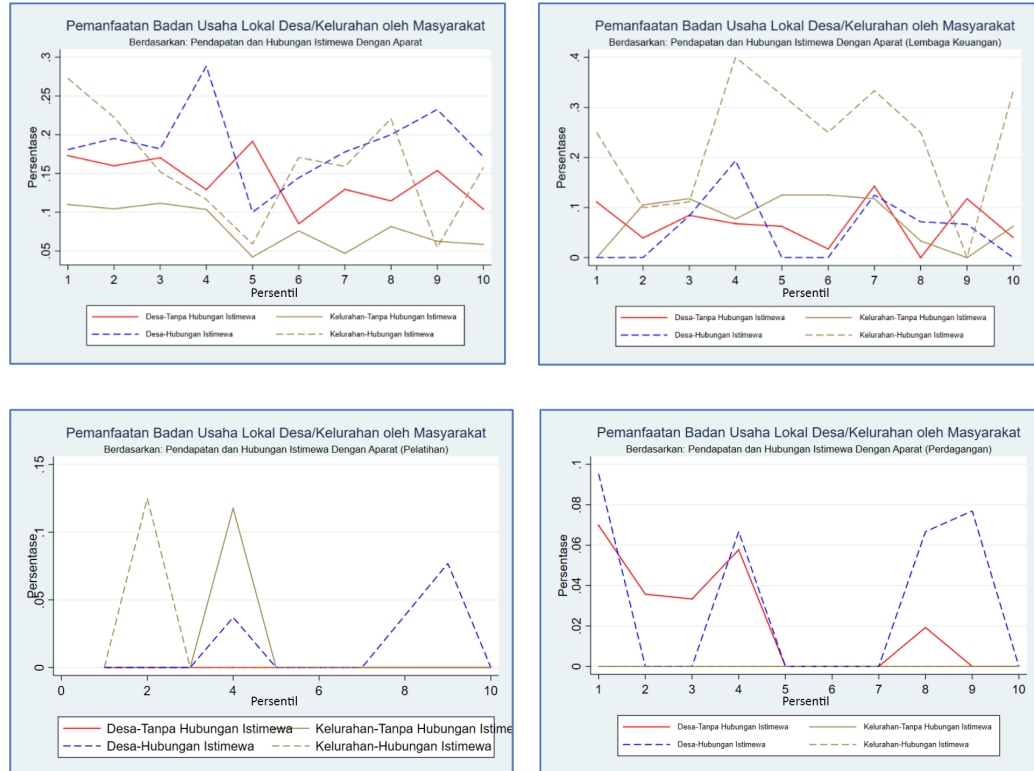


Sumber: Diolah Tim Peneliti

Jika lebih didalami dengan melihat komposisi masyarakat berdasarkan hubungan istimewa dan pendapatannya. Masyarakat yang memiliki hubungan istimewa dengan aparat desa memiliki kemungkinan lebih besar untuk memanfaatkan layanan badan usaha ekonomi lokal. Pemanfaatan BUM Desa oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah juga terbatas. Hal ini sejalan dengan terbatasnya informasi atas BUM Desa terhadap masyarakat tersebut. Pesatnya pendirian BUM Desa yang tidak diiringi dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatannya merupakan tantangan pemerintah desa karena hal ini menghambat optimalnya pemanfaatan badan usaha lokal tersebut.



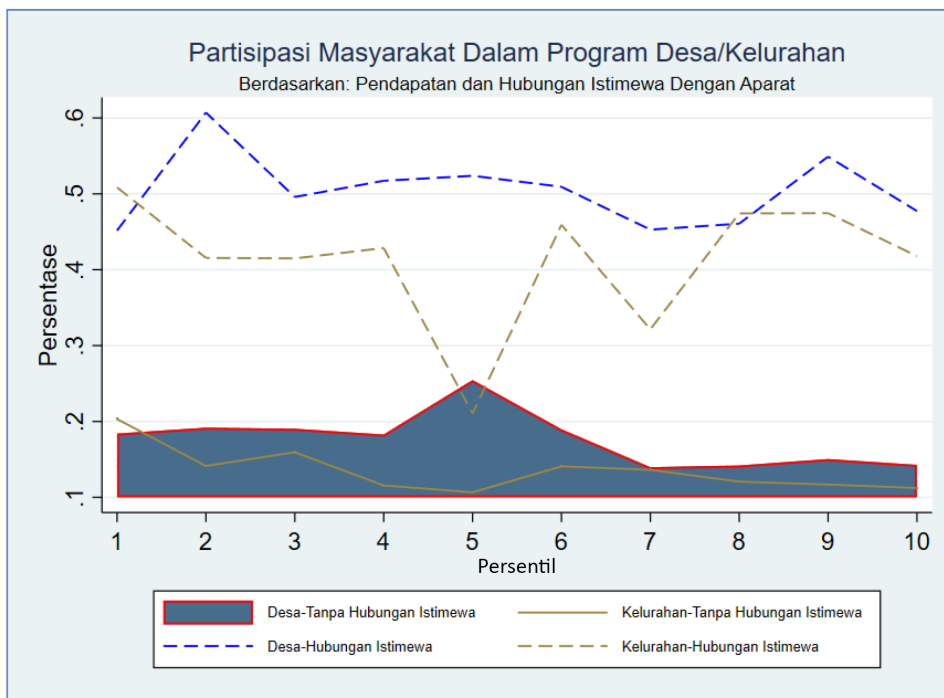
**Gambar 4.8 Pemanfaatan Badan Usaha Lokal oleh Masyarakat berdasarkan Hubungan Istimewa dengan Aparat**



Sumber: Diolah Tim Peneliti

Keselarasan jenis Badan Usaha Lokal desa / kelurahan dan kebutuhan masyarakat juga merupakan faktor yang dapat berkontribusi meningkatkan pemanfaatan badan usaha lokal tersebut. Pertumbuhan BUM Desa untuk usaha penyewaan mencapai 600% dibandingkan dengan periode sebelum adanya Dana Desa, tetapi di pihak lain masyarakat yang memanfaatkan badan usaha untuk penyewaan tersebut sangatlah terbatas. Masyarakat lebih memanfaatkan badan usaha lokal yang bergerak di bidang pendanaan dan perdagangan. Hal ini mengindikasikan masih adanya ketidaksielarasan antara infrastruktur ekonomi yang dibangun dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain penyebaran informasi yang merata, penyesuaian kebutuhan masyarakat dengan rencana pembangunan infrastruktur ekonomi desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemanfaatan badan usaha lokal tersebut.

**Gambar 4.9 Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa**



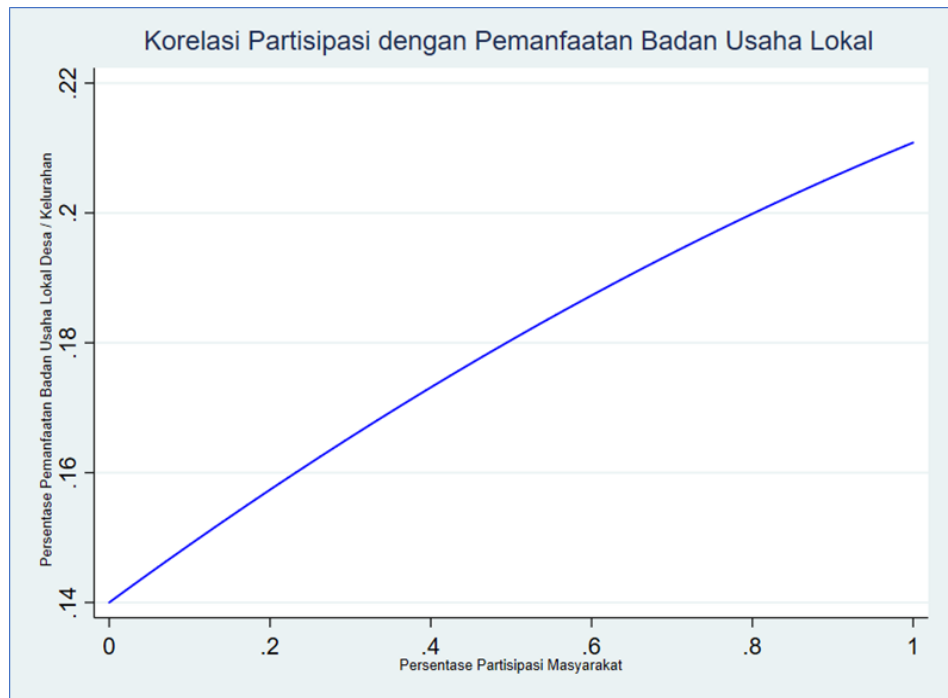
Sumber: Diolah Tim Peneliti

Survei Dana Desa memiliki pertanyaan tentang keterlibatan masyarakat dalam penentuan sasaran program kemiskinan untuk melihat gambaran partisipasi masyarakat dalam program-program desa terutama program yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Gambar 4.9 menyajikan proporsi partisipasi masyarakat dalam program desa untuk pengentasan kemiskinan pada rumah tangga sampel. Garis merah dengan area biru adalah masyarakat umum desa yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan aparat desa. Garis biru putus-putus adalah tokoh masyarakat ataupun rumah tangga yang memiliki hubungan keluarga dengan aparat desa.

Gambar 4.9 mengindikasikan kurang dari 20% masyarakat umum desa pada tiap level pendapatan yang merasa dilibatkan untuk pengambilan keputusan program desa (dalam hal ini program kemiskinan). Partisipasi yang lebih besar untuk tokoh masyarakat ataupun rumah tangga yang memiliki hubungan istimewa dengan aparat desa. Hal ini menggambarkan terbatasnya masyarakat umum yang ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa.



**Gambar 4.10 Korelasi antara Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan BUM Desa**



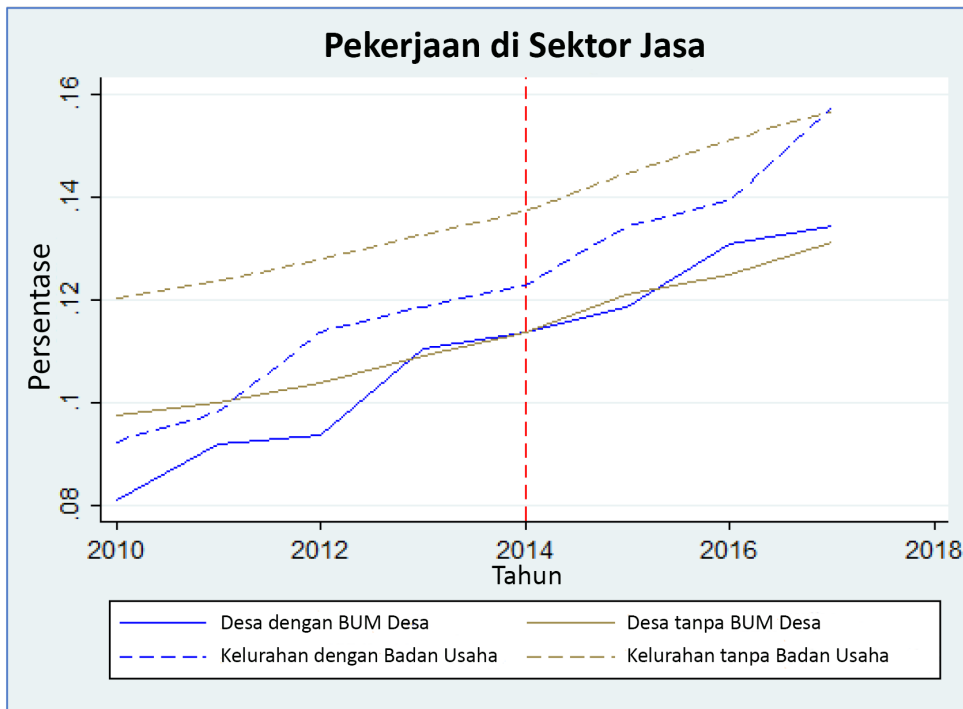
Sumber: Diolah Tim Peneliti

Gambar 4.10 memperlihatkan grafik korelasi antara partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam proses pengambilan keputusan program desa dengan pemanfaatan badan usaha lokal di desa/kelurahan. Desa/kelurahan yang memiliki persentase partisipasi masyarakat semakin besar berhubungan dengan pemanfaatan badan usaha lokal desa/kelurahan oleh masyarakat dalam sampel. Grafik ini mengindikasikan krusialnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pemanfaatan badan usaha lokal desa/kelurahan dan mungkin infrastuktur ekonomi desa/kelurahan lainnya.

### C. Badan Usaha Milik Desa dan Kesempatan Kerja

Pemanfaatan badan usaha ekonomi lokal dapat memberikan dampak terhadap kesempatan pekerjaan masyarakat di sekitarnya. Pada bagian sebelumnya, kami memperlihatkan bahwa masyarakat memanfaatkan badan usaha lokal sebagai akses terhadap keuangan serta akses perdagangan. Jika pemanfaatan ini memberikan kesempatan untuk masyarakat melakukan wiraswasta, perdagangan, distribusi hasil pertanian atau aktifitas ekonomi lainnya, maka badan usaha lokal dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar.

Gambar 4.11 Rata-Rata Proporsi Jumlah Pekerja Di Sektor Jasa



Sumber: Diolah Tim Peneliti

Gambar 4.11 memberikan tren proporsi rumah tangga yang bekerja pada sektor jasa. Kami membedakan rumah tangga sampel yang tinggal di desa/kelurahan berdasarkan keberadaan badan usaha lokal dan rumah tangga sampel yang berdasarkan wilayah administrasi desa atau wilayah administrasi kelurahan. Sehingga garis tidak putus memperlihatkan tren pekerjaan masyarakat di bidang jasa antara desa yang memiliki BUM Desa dengan desa yang tidak memiliki badan usaha lokal tersebut. Garis putus-putus menggambarkan hal serupa untuk wilayah administrasi kelurahan. Gambar 6a-6b pada lampiran 6 menyajikan grafik serupa untuk jenis pekerjaan pertanian dan manufaktur. Gambar 4.11, gambar 6a dan gambar 6b memberikan indikasi pekerjaan utama masyarakat di perdesaan adalah pertanian, sedangkan proporsi masyarakat yang bekerja di bidang jasa dan manufaktur lebih kecil untuk masyarakat desa dibandingkan masyarakat yang tinggal di wilayah administrasi kelurahan. Seiring dengan waktu, semakin besar proporsi orang yang bekerja di sektor jasa, baik masyarakat yang berada di wilayah administrasi kelurahan maupun wilayah administrasi desa.



**Tabel 4.2 Badan Usaha Milik Desa dan Kesempatan Pekerjaan**

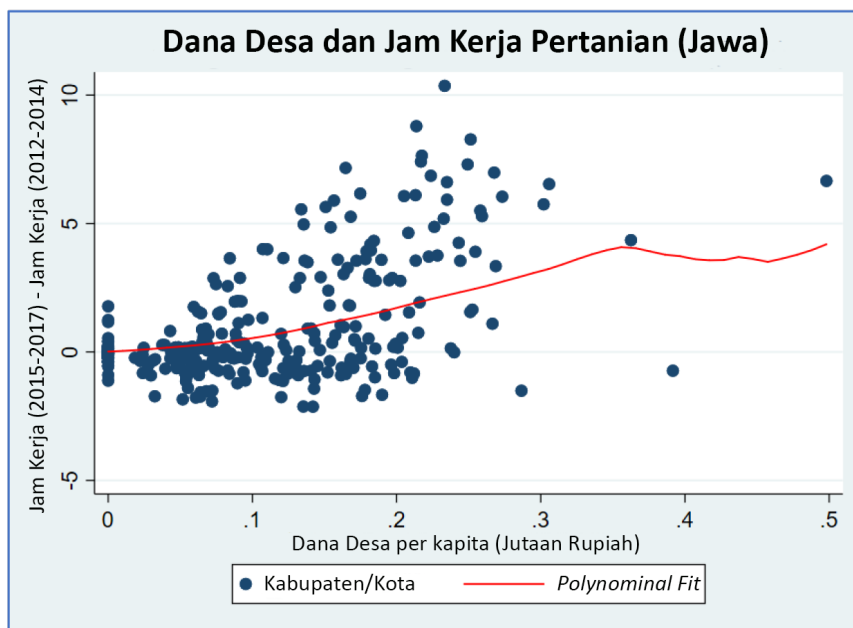
Pekerjaan	Seluruh Sampel
Pertanian	X
Manufaktur	X
Jasa	↗

Menggunakan metode *difference-in-difference*, kami melakukan estimasi pengaruh badan usaha ekonomi lokal tersebut terhadap kesempatan kerja. Ringkasan estimasi ditunjukkan pada Tabel 4.2 sedangkan nilai estimasi diberikan pada lampiran 5. Kami membagi menjadi 3 jenis pekerjaan: pertanian, manufaktur dan jasa. Metode yang digunakan memberikan indikasi BUM Desa memberikan kesempatan bekerja masyarakat desa di bidang jasa. Namun, kami tidak menemukan indikasi meningkatnya kesempatan kerja di bidang lainnya yang disebabkan karena adanya BUM Desa di wilayah administrasidesa tersebut. Hal ini mendukung ide pemanfaatan BUM Desa yang lebih banyak dimanfaatkan sebagai akses keuangan dan perdagangan dapat membuka peluang untuk masyarakat melakukan usaha di bidang jasa. Hasil ini perlu dicermati karena sebagian besar sampel merupakan rumah tangga yang berada di Pulau Jawa. Kami juga tidak memiliki sampel yang berada di Pulau Papua untuk sampel yang berada di Luar Jawa. Sehingga estimasi yang dilakukan mungkin akan memberikan hasil berbeda jika terdapat distribusi sampel yang berbeda.

#### **Dana Desa dan Jam Kerja**

Pengaruh Dana Desa terhadap pekerjaan tidak hanya melalui BUM Desa. Pemerintah desa dapat memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat desa, pembangunan infrastruktur yang memerlukan tenaga kerja serta kegiatan-kegiatan lainnya baik melibatkan BUM Desa ataupun dilakukan langsung oleh aparat desa. Kemudian, jika terdapat dampak Dana Desa terhadap lapangan pekerjaan, berapa besar perubahan jam kerja yang diberikan oleh Dana Desa. Walaupun kelebihan data primer dapat mengidentifikasi geografi lokasi hingga tingkat kelurahan serta adanya topik khusus menyangkut Dana Desa, tetapi hanya 10% sampel berada di wilayah luar Pulau Jawa. Padahal alokasi Dana Desa per kapita diluar Pulau Jawa dapat mencapai lebih dari 400% dari wilayah Pulau Jawa. Selain itu, data primer tidak menyediakan jumlah jam kerja yang dilakukan oleh responden. Pentingnya melihat perbedaan dampak di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa karena perbedaan nilai alokasi dana per kapita, namun terbatasnya data primer di wilayah luar pulau Jawa serta diperlukannya jumlah jam kerja dalam analisis pekerjaan, maka kami melengkapi penelitian ini dengan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) untuk melihat perbedaan dampak Dana Desa terhadap lapangan pekerjaan baik di pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa.

Gambar 4.12 Alokasi Dana Desa Per Kapita dan Pekerjaan Pertanian (Jawa)



Sumber: Diolah Tim Peneliti

Gambar 4.12 menyajikan sebaran alokasi Dana Desa per kapita pada tiap kabupaten yang menerima Dana Desa dan perubahan proporsi masyarakat desa yang bekerja di bidang pertanian di pulau Jawa. Perubahan proporsi masyarakat yang bekerja adalah rata-rata jumlah jam kerja masyarakat yang bekerja pada tingkat kabupaten selama tahun 2015, 2016 dan 2017 dikurangi rata-rata jumlah jam kerja masyarakat yang bekerja pada tingkat kabupaten selama selama tahun 2012-2014. Jam kerja adalah jumlah jam kerja selama satu minggu terakhir yang dilakukan oleh responden. Alokasi Dana Desa (dalam jutaan rupiah) per kapita adalah alokasi Dana Desa per kapita tiap kabupaten yang menerima Dana Desa pada tahun 2015, 2016 dan 2017.

Gambar 4.12 menunjukkan jam kerja masyarakat meningkat sampai 10 jam dalam satu minggu atau sebesar 40 jam dalam satu bulannya selama periode 2015-2017 jika dibandingkan periode 2012-2014. Rata-rata peningkatan jam kerja di pulau Jawa sebesar 2-3 jam dalam satu minggu pada periode 2015-2017. Meningkatnya alokasi Dana Desa per kapita memberikan kemungkinan peningkatan jam kerja individu di sektor pertanian di pulau Jawa. Dampaknya akan menurun setelah peningkatan alokasi Dana Desa per kapita melebihi tiga ratus lima puluh ribu rupiah. Namun, proporsi Dana Desa yang diterima per kapita lebih dari tiga ratus ribu rupiah menjadi lima ratus ribu rupiah hanya terdiri dari tiga kota. Mayoritas kabupaten menerima Dana Desa per kapita di bawah tiga ratus ribu rupiah dengan rata-rata 103 ribu rupiah per kapita.

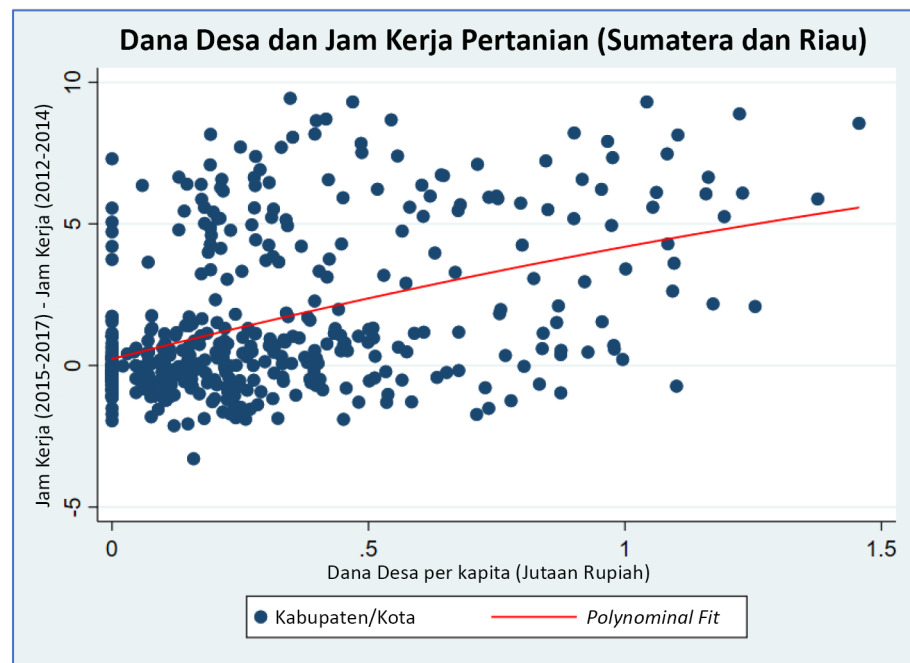
Gambar 4.13 memberikan alokasi Dana Desa per kapita dan perubahan jam kerja di pulau Sumatera dan Kepulauan Riau. Gambar 4.13 memiliki spesifikasi yang sama





dengan gambar 4.12. Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau mendapatkan alokasi Dana Desa per kapita yang lebih besar dibandingkan dengan Pulau Jawa. Hal ini disebabkan besarnya formula dasar alokasi Dana Desa sehingga perbedaan jumlah populasi antara pulau Jawa dan pulau-pulau di luar Jawa tidak menempati proporsi yang substansial dalam penentuan alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa per kapita yang lebih besar memberi kemungkinan peningkatan jam kerja di Sumatera dan Kepulauan Riau di bidang pertanian yang lebih besar. Sementara meningkatnya alokasi Dana Desa per kapita di Pulau Jawa memberi kemungkinan peningkatan rata-rata jumlah jam kerja dua sampai tiga jam kerja dalam periode satu minggu dan dampaknya menurun setelah meningkat sampai dengan 5 jam kerja. Alokasi Dana Desa per kapita yang lebih besar di pulau Sumatra dibandingkan dengan alokasi di Pulau Jawa menyebabkan peningkatan jumlah jam kerja lebih dari lima jam pada periode yang sama. Berbeda dengan tren di Jawa, semakin besar alokasi Dana Desa per kapita di Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau Indonesia menunjukkan kurva yang cenderung meningkat dengan peningkatan alokasi Dana Desa per kapita.

**Gambar 4.13 Alokasi Dana Desa Per Kapita Dan Jam Kerja Di Pertanian (Pulau Sumatera dan Riau)**



Sumber: Diolah Tim Peneliti

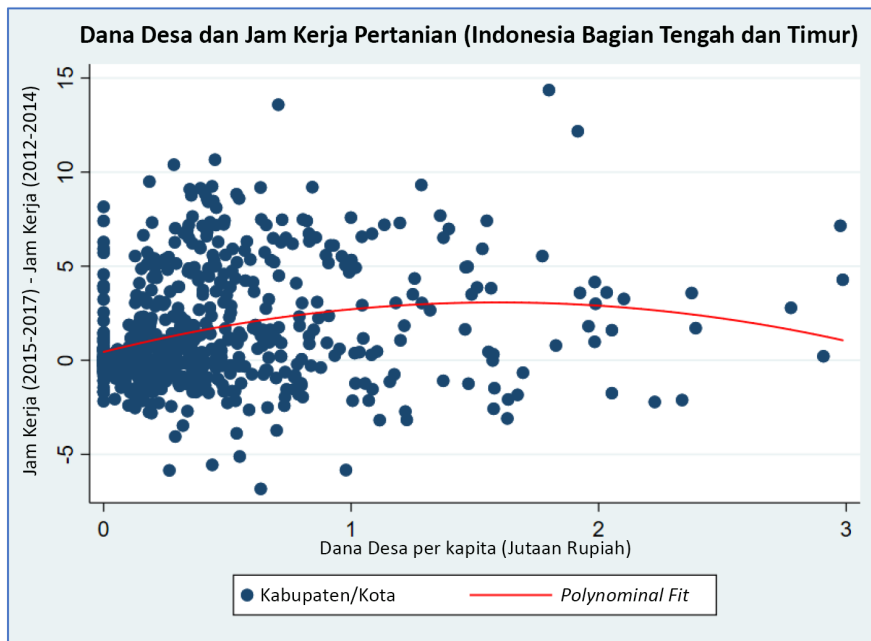
Gambar 4.14 memperlihatkan alokasi Dana Desa per kapita dan jam kerja pada bidang pertanian di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur. Keterangan pada gambar 4.14 analog seperti gambar 4.12. Alokasi Dana Desa per kapita di Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur dapat mencapai 3 juta rupiah per kapita. Hal ini berarti dua kali besaran maksimal di Pulau Sumatera serta kepulauan Riau dan enam kali besaran maksimal di Pulau Jawa. Walaupun alokasi



Dana Desa per kapita di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur jauh lebih besar daripada alokasi di Pulau Jawa, peningkatan jam kerja di wilayah ini tidak terdapat perbedaan substansial dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Peningkatan alokasi Dana Desa per kapita meningkatkan sampai dengan 3 jam kerja dalam satu minggu. Dampaknya akan menurun di bawah 3 jam kerja setelah alokasi Dana Desa per kapita sebesar 1,5 juta rupiah.

Gambar 4.12-4.14 memberi indikasi adanya perbedaan substansial alokasi antar wilayah dikarenakan perbedaan jumlah penduduk di wilayah-wilayah tersebut. Pulau Jawa mendapatkan alokasi Dana Desa per kapita sampai dengan 500 ribu rupiah, Pulau Sumatera mendapatkan alokasi yang sama sampai dengan 1,5 juta rupiah dan Indonesia wilayah Tengah dan Timur bisa mendapatkan sampai dengan 3 juta rupiah. Munculnya kurva U-terbalik menunjukkan bahwa semakin besar Dana Desa per kapita tidak selalu meningkatkan dampak Dana Desa. Misalnya, walaupun meningkatkan Dana Desa per kapita lebih besar dapat memberikan kemungkinan lebih besar untuk meningkatkan jam kerja, terlalu banyak dana membuat manajemen semakin kesulitan untuk menggunakan dana yang tidak digunakan untuk kegiatan produktif. Selanjutnya, ada alokasi per kapita yang sangat kecil di Wilayah Jawa. 103 ribu per kapita per tahun berarti kurang dari satu dolar (Rp8.500) per kapita per tahun yang merupakan alokasi per kapita yang cukup kecil. Kemudian, dengan rata-rata peningkatan jumlah jam kerja sekitar 2-5 jam kerja dalam satu mengindikasikan alokasi Dana Desa per kapita memberikan peningkatan jenis pekerjaan paruh waktu daripada jenis pekerjaan tetap.

**Gambar 4.14 Alokasi Dana Desa Per Kapita Dan Jam Kerja Di Pertanian (Indonesia Tengah dan Timur)**



Sumber: Diolah Tim Peneliti



Gambar 7a-Gambar 7f dalam lampiran 7 menunjukkan tren yang sama untuk industri manufaktur dan jasa. Singkatnya, meningkatkan Dana Desa per kapita lebih mungkin meningkatkan jam kerja di industri manufaktur dan jasa.

Gambar 4.13 - 4.14 dan gambar 7a-7f melihat korelasi alokasi Dana Desa per kapita terhadap peningkatan jam kerja tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan jam kerja masyarakat. Sebagai contoh, pendapatan asli daerah dan transfer dana lainnya yang digunakan untuk pemberian lapangan pekerjaan dapat mempengaruhi peningkatan kesempatan kerja dan jumlah jam kerja masyarakat di daerah tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, tabel 4.3 memperlihatkan dampak Dana Desa per kapita terhadap jam kerja di bidang pertanian, manufaktur dan jasa menggunakan model DID yang diringkas dari lampiran 8-10. Manufaktur mencakup lapangan pekerjaan di bidang pembangunan infrastruktur. Kami membagi estimasi menjadi Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur.

**Tabel 4.3 Dana Desa dan Kesempatan Pekerjaan**

Jam Kerja Pekerjaan / Pulau	Jawa	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur
Pertanian	X	↗	↗
Manufaktur	X	X	X
Jasa	X	X	↗

Variabel pengendali pada estimasi DID mencakup perubahan pada tingkat wilayah kabupaten dan individu. Variabel pengendali tingkat kabupaten kota mencakup pendapatan asli daerah per kapita, pajak daerah per kapita, retribusi daerah per kapita, hasil pengelolaan kekayaan daerah per kapita, dana bagi hasil per kapita, dana alokasi umum per kapita, dana alokasi khusus per kapita, hibah per kapita, dana darurat per kapita, dana otonomi khusus per kapita. Variabel pengendali tingkat individu mencakup jenis kelamin, usia, status pernikahan, kedudukan di dalam rumah tangga, pendidikan (tahun), dan apakah seorang individu tinggal di daerah perdesaan atau perkotaan. Kami mengikutsertakan *fixed effect* kabupaten untuk mengendalikan perbedaan mendasar yang tidak dapat diobservasi pada tiap kabupaten yang tidak berubah selama periode penelitian (2012-2017). Kami juga mengikutsertakan interaksi antara *fixed effect* propinsi dan tahun untuk menangkap perubahan kebijakan yang tidak dapat diobservasi dan berubah setiap tahunnya yang diterapkan pada level propinsi.

Model yang digunakan menunjukkan bahwa orang yang tinggal di kabupaten yang memiliki alokasi Dana Desa per kapita yang lebih besar akan memberikan kemungkinan jam kerja yang lebih besar. Meningkatkan satu juta rupiah Dana Desa per kapita memberi kemungkinan meningkatkan 2,5 jam kerja pertanian di pulau Jawa meskipun tidak signifikan secara statistik, 2,8 jam kerja pertanian di Sumatera dan 1,2



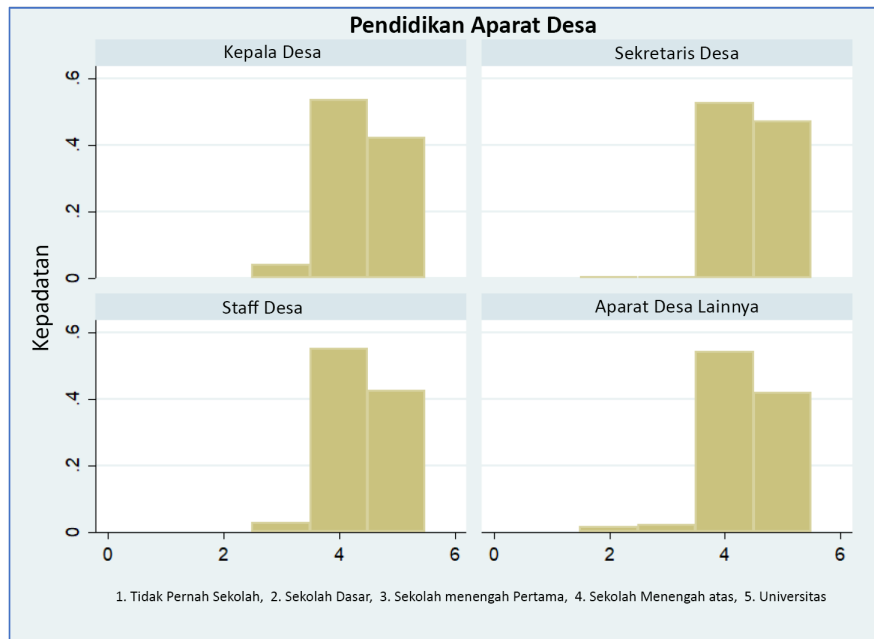
jam kerja pertanian di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Intervensi yang sama lebih mungkin meningkatkan 1 jam kerja pada sektor jasa untuk Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Meskipun tidak signifikan, kami menemukan bahwa meningkatkan Dana Desa satu juta rupiah meningkatkan 4,2 jam kerja pada bagian layanan di pulau Jawa. Penulis tidak menemukan dampak statistik yang signifikan dari Dana Desa per kapita pada peningkatan jam kerja di semua sektor di Pulau Jawa. Sementara Dana Desa berdampak pada peningkatan jam kerja di sektor pertanian di Pulau Sumatra dan Indonesia Bagian Tengah dan Timur. Peningkatan jumlah jam kerja di sektor jasa juga terjadi di Indonesia Tengah dan Timur. Terbatasnya peningkatan jam kerja karena adanya program Dana Desa menunjukkan bahwa Dana Desa lebih memungkinkan menyediakan pekerjaan paruh waktu daripada jenis pekerjaan tetap bagi masyarakat.

Meskipun semakin besar alokasi Dana Desa per kapita berdampak kepada semakin besar peluang kesempatan kerja, semakin besar Dana Desa per kapita tidak selalu meningkatkan lapangan kerja (lihat lampiran 8-10). Kami menemukan bahwa ketika alokasi Dana Desa per kapita sangat kecil, Dana Desa tidak dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat desa. Hal ini disebabkan minimnya Dana Desa per kapita dan proporsi minimum untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Karena lebih dari 50% proporsi Dana Desa digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, maka jumlah Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan ekonomi di masyarakat perdesaan sangat terbatas.

Meningkatnya alokasi Dana Desa per kapita akan meningkatkan kesempatan kerja, seperti yang dirasakan di Sumatera dan Indonesia Tengah dan Timur. Ini mendukung gagasan bahwa semakin besar Dana Desa per kapita, semakin besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Namun, ketika Dana Desa per kapita sangat besar, dampaknya terhadap lapangan kerja akan berkurang, seperti yang ditunjukkan oleh Indonesia di Indonesia Tengah dan Timur. Penulis juga menemukan hal yang sama di Pulau Sumatera meskipun tidak substansial. Penjelasan yang mungkin untuk ini adalah teori manajemen yang tidak efektif tentang perubahan organisasi, yaitu kapasitas sumber daya organisasi yang terbatas seperti pendidikan, yang mempengaruhi kinerja organisasi. Gambar 4.15 menggambarkan kondisi pendidikan aparat desa sampel dari data survei Dana Desa. Sekitar 50% pendidikan aparat desa adalah setingkat SMU.



Gambar 4.15 Pendidikan Aparat Desa



Sumber: Diolah Tim Peneliti

Kami tidak menemukan adanya dampak Dana Desa terhadap peningkatan kesempatan kerja di bidang manufaktur. Lapangan kerja manufaktur termasuk manufaktur pembuatan infrastruktur. Jika masifnya pembangunan infrastruktur karena besarnya pemanfaatan Dana Desa untuk infrastruktur dapat mempekerjakan masyarakat desa, maka akan adanya dampak alokasi Dana Desa terhadap manufaktur. Akan tetapi, hasil ini juga mengindikasikan program-program pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan pembangunan jalan lainnya belum dapat memberikan peningkatan lapangan pekerjaan di bidang manufaktur (termasuk infrastruktur) yang substansial dibandingkan wilayah di kelurahan.

Untuk meyakinkan bahwa estimasi yang dilakukan karena adanya intervensi Dana Desa, kami juga melakukan uji plasebo seperti yang dilakukan pada bagian sebelumnya. Lampiran 11-13 menampilkan uji plasebo dampak Dana Desa dengan tahun artifisial 2013 dan 2014 dengan total mencapai 24 uji plasebo. Secara umum, seluruh koefisien alokasi Dana Desa per kapita tidaklah substansial mempengaruhi kesempatan kerja di bidang pertanian, manufaktur ataupun jasa. Hal ini mendukung keyakinan bahwa dampak karena adanya intervensi Dana Desa oleh pemerintah.



## D. Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur

Dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antara desa dan kota, salah satu fokus penggunaan Dana Desa adalah untuk pembangunan infrastruktur perdesaan. Hingga tahun 2018 porsi signifikan penggunaan Dana Desa adalah untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun nonfisik, perlu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi (Ghosal, 2013). Pembangunan infrastruktur di perdesaan, jika ditargetkan dengan jelas, juga akan mendukung pembangunan yang inklusif (Kanbur dan Rauniyar, 2010).

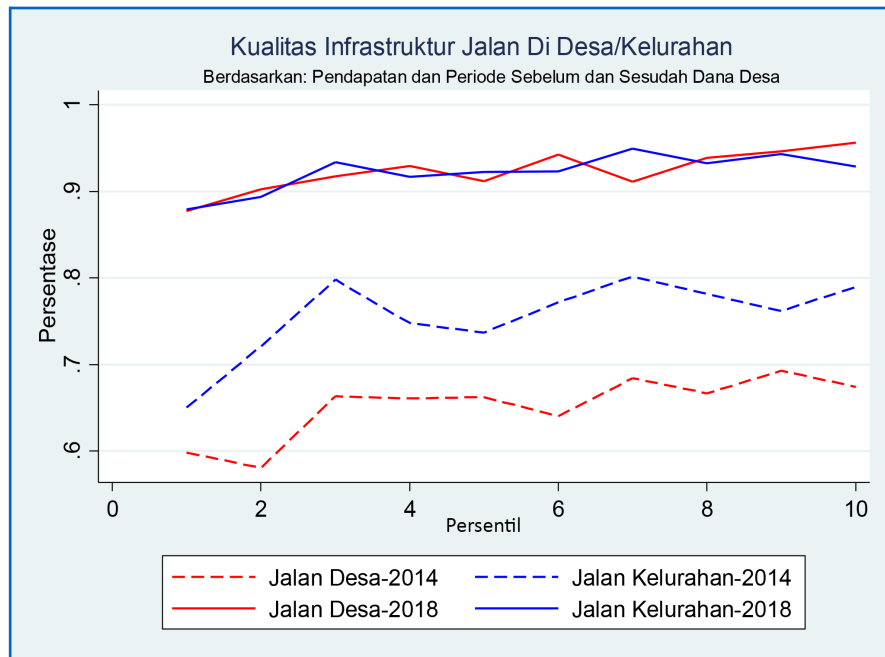
Pada bagian ini, akan dibahas persepsi kepuasan masyarakat atas 4 (empat) jenis infrastruktur, yakni infrastruktur transportasi, penerangan, kesehatan, dan pertanian dengan melihat proporsi rumah tangga sampel yang menganggap bahwa infrastruktur di desa/kelurahan sudah memadai berdasarkan pendapatan rumah tangga per kapita dan kondisi sebelum dan sesudah adanya Dana Desa. Jangka waktu pada penelitian ini didefinisikan dengan kondisi infrastruktur lima tahun lalu (2014) ketika program Dana Desa belum ada dan saat ini (2018) ketika program Dana Desa sudah berjalan lebih dari tiga tahun.

Hasil survei menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga kurang mampu yang puas atas pelayanan keempat jenis infrastruktur tersebut semakin meningkat. Semakin besarnya persepsi rumah tangga kurang mampu yang puas terhadap kualitas infrastruktur ini memberikan indikasi bahwa kemanfaatan infrastruktur relatif telah dinikmati oleh sebagian besar lapisan masyarakat di desa.

Garis merah putus-putus menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat desa terhadap infrastruktur tertentu lima tahun lalu (2014), sedangkan garis biru putus-putus menginformasikan tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap infrastruktur pada lima tahun lalu (2014). Sementara itu, garis merah dan biru, masing-masing menunjukkan kepuasan masyarakat desa dan kota terhadap kondisi infrastruktur setelah lebih dari 3 tahun pelaksanaan kebijakan Dana Desa (2018)



Gambar 4.16 Persepsi Kualitas Infrastruktur Jalan



Sumber: Diolah Tim Peneliti

### Pembangunan Infrastruktur Transportasi

Pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk mempercepat dan memperlancar akses transportasi manusia dan barang di daerah bersangkutan sehingga aktifitas ekonomi di wilayah tersebut bisa berjalan dengan lebih baik. Akses dan kualitas jalan dapat meningkatkan perkembangan usaha non-pertanian (nonfarm enterprises) di perdesaan sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan (Gibson dan Oliva, 2010). Gambar 4.16 menunjukkan proporsi rumah tangga sampel yang puas dengan kondisi jalan di daerah masing-masing berdasarkan jangka waktu serta tingkat pendapatan rumah tangga per kapita. Pendapatan rumah tangga per kapita dikelompokkan ke dalam 10 tingkat pendapatan mulai dari kelompok dengan rumah tangga pendapatan terendah (1) ke kelompok rumah tangga pendapatan terbesar (10).

Lima tahun lalu, kurang lebih 40% rumah tangga dengan pendapatan per kapita rendah merasa tidak puas dengan kualitas infrastruktur jalan, sedangkan 30% rumah tangga dengan pendapatan besar menganggap bahwa kualitas jalan di desa mereka kurang memadai. Selain itu, jalan di desa terindikasi jauh tertinggal dari jalan di kelurahan. Pada saat ini, terjadi peningkatan kepuasan masyarakat desa terhadap kualitas



infrastruktur jalan sebesar kurang lebih 30% sehingga menyamai tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap jalan dengan perbedaan tingkat kepuasan masyarakat berpendapatan kecil dengan besar yang tidak terlalu signifikan. Grafik tersebut mengindikasikan bahwa setelah adanya Dana Desa, infrastruktur jalan di desa sudah setara dengan jalan di kelurahan serta pemanfaatan jalan juga dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

Lima tahun lalu (2014), masyarakat kelurahan menikmati layanan infrastruktur yang lebih baik jika dibandingkan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari proporsi persepsi kepuasan masyarakat kelurahan yang secara rata-rata lebih tinggi dari masyarakat desa pada berbagai level pendapatan per kapita. Situasi ini berubah sangat signifikan setelah penerapan kebijakan Dana Desa. Setelah hampir 4 (empat) tahun penerapan kebijakan Dana Desa, kesenjangan tingkat kepuasan atas kualitas infrastruktur jalan antara masyarakat kelurahan dan desa sudah relatif tidak berbeda secara signifikan. Bahkan, pada beberapa level pendapatan per kapita, masyarakat desa memiliki persepsi kepuasan yang relatif lebih tinggi dari masyarakat kelurahan.

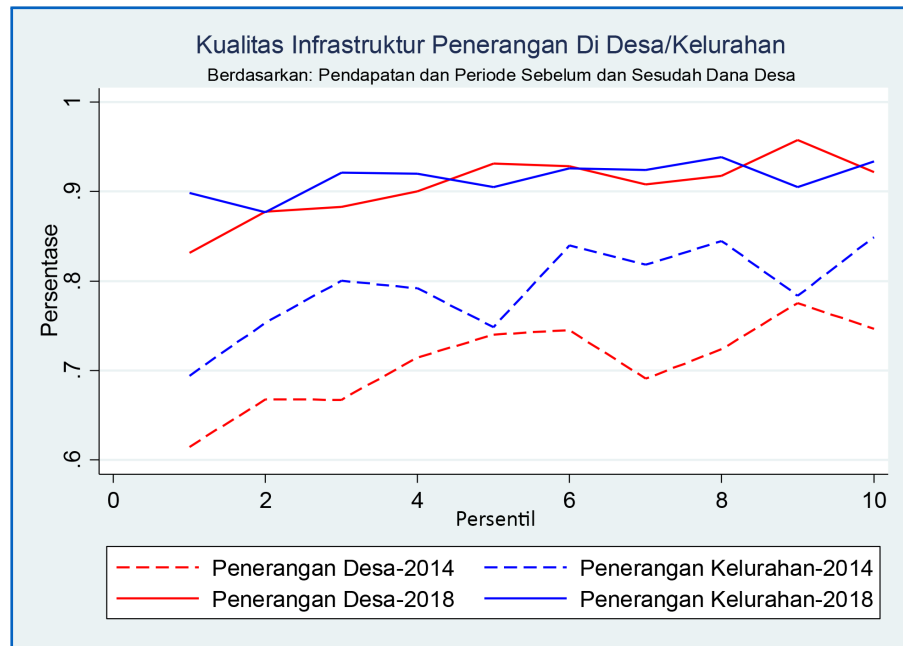
#### **Infrastruktur Penerangan**

Sebagaimana halnya dengan infrastruktur jalan, akses dan kualitas infrastruktur penerangan dapat meningkatkan perkembangan usaha non-pertanian (*nonfarm enterprises*) di perdesaan sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan (Gibson dan Oliva, 2010). Persepsi kepuasan atas kualitas infrastruktur penerangan antara desa dan kelurahan 5 (lima) tahun lalu (2014) masih relatif berbeda secara signifikan jika dibandingkan persepsi kepuasan saat ini (2018). Lima tahun lalu pada berbagai tingkat pendapatan, persepsi kualitas masyarakat kelurahan masih di atas rata-rata masyarakat desa. Kondisi perbedaan ini mengalami perubahan setelah lebih dari 3 (tiga) tahun kebijakan Dana Desa digulirkan. Pada Gambar 4.19 dapat kita amati perubahan ini. Secara rata-rata proporsi persepsi kepuasan masyarakat desa sudah tidak lagi jauh berbeda dari masyarakat kelurahan. Pada beberapa level pendapatan per kapita, dapat kita lihat bahwa persepsi kepuasan masyarakat desa atas kualitas infrastruktur penerangan berada di atas masyarakat kelurahan. Walau memang dapat juga kita lihat bahwa pada level pendapatan masyarakat paling bawah bahwa persepsi kepuasan masyarakat desa masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat kelurahan.





**Gambar 4.17 Persepsi Kualitas Infrastruktur Penerangan**



Sumber: Diolah Tim Peneliti

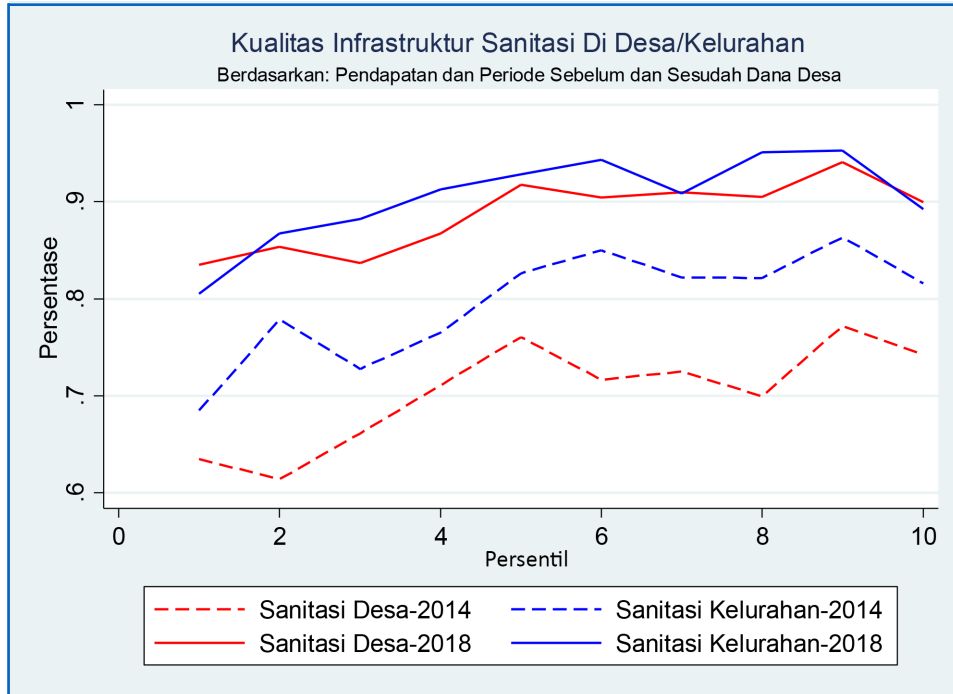
Perbaikan persepsi atas kualitas infrastruktur penerangan ini dapat pula dijelaskan melalui peningkatan elektrifikasi yang semakin baik untuk Pulau Jawa hal mana responden survei kebanyakan merupakan penduduk di Pulau Jawa. Pemerintah sejak beberapa tahun lalu gencar dalam mengejar target elektrifikasi nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### **Pembangunan Infrastruktur Kesehatan**

Infrastruktur kesehatan dalam studi ini diwakili dengan infrastruktur sanitasi (Gambar 4.18a), air bersih (Gambar 4.18b), dan selokan (Gambar 4.18c). Dengan membandingkan antara (1) rata-rata persepsi kualitas antara desa dan kelurahan, (2) persepsi kualitas tahun 2014 dengan tahun 2018 sebagai proxy kualitas infrastruktur sebelum dan sesudah adanya Dana Desa, serta (3) jarak (*gap*) antara persepsi kualitas masyarakat desa versus masyarakat kelurahan, secara umum dari gambar-gambar tersebut dapat diamati adanya tiga kecenderungan.



**Gambar 4.18a Persepsi Kualitas Infrastruktur Sanitasi**

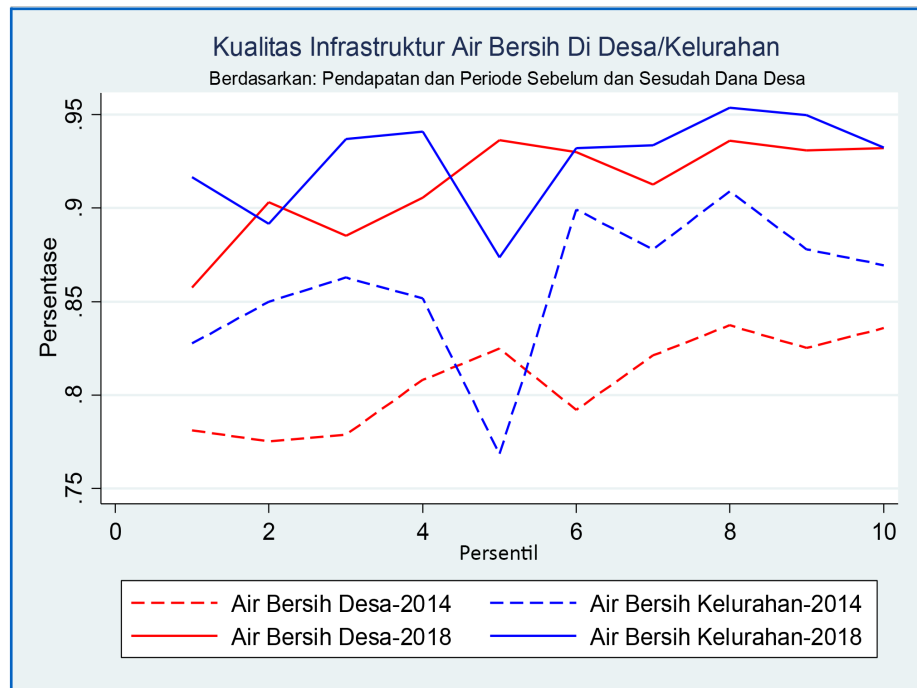


Sumber: Diolah Tim Peneliti

Pertama, persepsi masyarakat desa atas kualitas infrastruktur kesehatan (garis warna merah) lebih rendah daripada persepsi masyarakat kota (garis warna biru) atas kualitas infrastruktur kesehatan yang sejenis. Pola tersebut dapat dilihat pada semua infrastruktur kesehatan, baik sanitasi (Gambar 4.18a), air bersih (Gambar 4.18b), maupun selokan (Gambar 4.18c). Sebagai contoh, pada Gambar 4.18a dapat dilihat bahwa kualitas infrastruktur sanitasi di perdesaan lebih buruk daripada kualitas infrastruktur sanitasi di perkotaan. Kecenderungan tersebut wajar mengingat bahwa fasilitas kesehatan di perkotaan pada umumnya lebih baik daripada di perdesaan.



Gambar 4.18b Persepsi Kualitas Infrastruktur Air Bersih

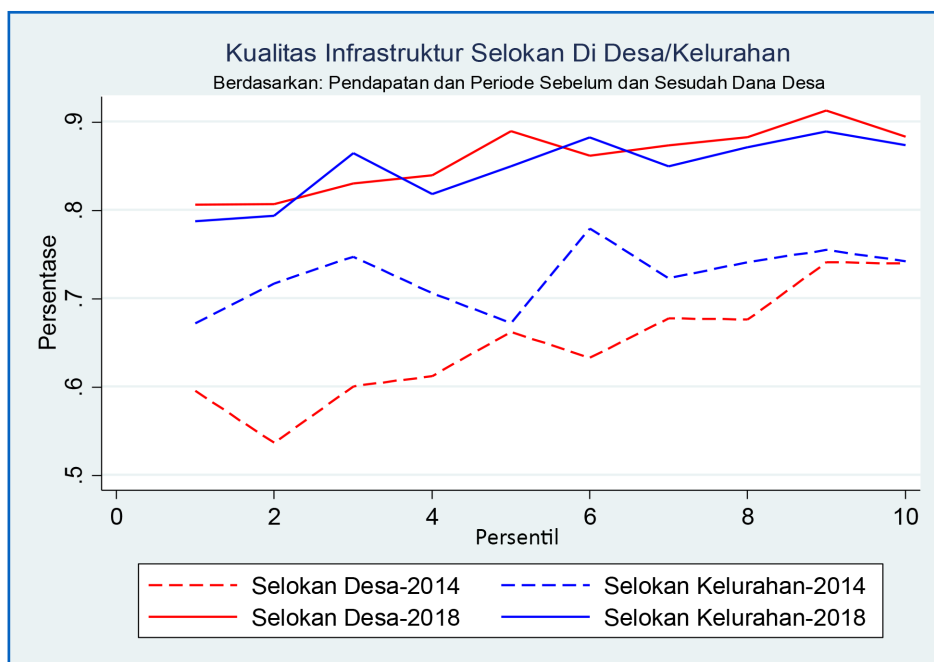


Sumber: Diolah Tim Peneliti

Kedua, masyarakat mempersepsikan bahwa kualitas infrastruktur kesehatan tahun 2018 jauh lebih baik dibandingkan tahun 2014. Kecenderungan umum tersebut dapat diamati di perdesaan maupun di perkotaan, berlaku pada semua jenis infrastruktur kesehatan yang dibahas dalam studi ini, serta secara umum berlaku pada semua kelompok pendapatan. Sebagai contoh, pada Gambar 4.18b terlihat bahwa kualitas infrastruktur air bersih tahun 2018 (digambarkan dengan garis solid) lebih tinggi daripada kualitas infrastruktur air bersih tahun 2014 (yang digambarkan dengan garis putus-putus) baik di perdesaan (warna garis merah) maupun di perkotaan (warna garis biru). Kualitas infrastruktur tahun 2018 yang lebih tinggi daripada tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat perkembangan kualitas infrastruktur baik di perdesaan maupun perkotaan. Perkembangan kepuasan terhadap akses air bersih sangat penting karena akses terhadap air bersih sangat terkait dengan kemiskinan (Putra dan Rianto, 2013).

Ketiga, jarak antara persepsi kualitas infrastruktur antara perdesaan dan perkotaan semakin menipis. Sebagai contoh dapat dilihat bahwa pada Gambar 4.18c, sebelum adanya Dana Desa (yaitu tahun 2014) terdapat perbedaan kualitas infrastruktur selokan antara desa (garis merah putus-putus) dengan perkotaan (garis biru putus-putus). Di lain pihak, setelah adanya Dana Desa (yaitu tahun 2018) kualitas infrastruktur selokan di perdesaan dan perkotaan relatif sama yang ditunjukkan dengan jarak antara garis merah solid dan garis biru solid yang sangat dekat.

Gambar 4.18c Persepsi Kualitas Infrastruktur Selokan



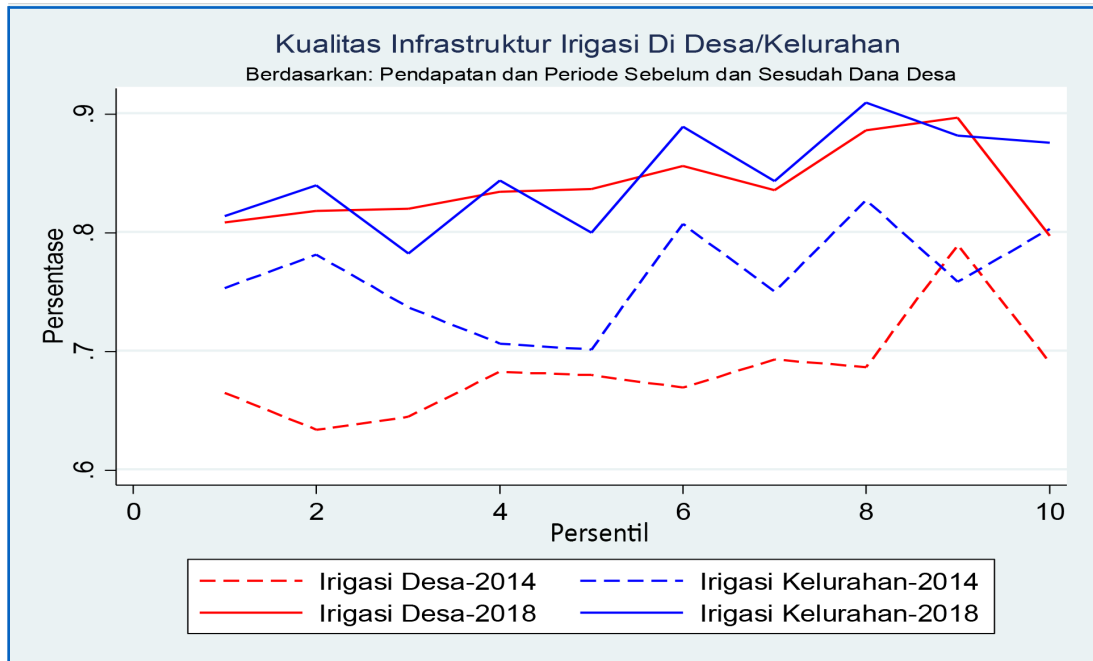
Sumber: Diolah Tim Peneliti

## Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Terkait dengan infrastruktur pertanian, khususnya irigasi, tiga kecenderungan yang diuraikan sebelumnya juga dapat diamati. Pertama, persepsi kualitas infrastruktur irigasi lebih tinggi menurut masyarakat kota daripada masyarakat desa. Kedua, masyarakat baik kota maupun desa menganggap bahwa kualitas infrastruktur irigasi setelah adanya Dana Desa (tahun 2018) lebih baik daripada sebelum adanya Dana Desa (2014). Ketiga, setelah adanya Dana Desa, beda persepsi masyarakat desa dan masyarakat kota tentang kualitas infrastruktur relatif tidak signifikan, bahkan kelompok masyarakat menengah perdesaan berpendapat bahwa kualitas infrastruktur setelah adanya Dana Desa lebih tinggi daripada persepsi kelompok masyarakat kota pada level pendapatan yang sama (lihat Gambar 4.19). Hal tersebut mengindikasikan perbaikan kualitas infrastruktur pertanian, khususnya irigasi, setelah adanya Dana Desa. Perbaikan irigasi kecil dapat meningkatkan produksi pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja pertanian, dan memengaruhi aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian (Purwantini dan Suhaeti, 2017).



Gambar 4.19 Persepsi Kualitas Infrastruktur Irigasi



Sumber: Diolah Tim Peneliti





## **KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN PENELITIAN LANJUTAN**

Tujuan penyaluran Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi komunitas desa. Dana Desa yang berasal dari APBN dialokasikan guna mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan melalui pemberian kesempatan untuk pemerintah desa mengelola dan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu bentuk pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan ekonomi perdesaan adalah melalui pendirian BUM Desa. Penelitian ini menganalisis apakah keberadaan BUM Desa telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

Untuk mengatasi masalah perbedaan karakteristik antar daerah yang membuat satu daerah tidak bisa dibandingkan dengan daerah yang lain, kami menggunakan variabel alokasi Dana Desa per kapita dengan membagi alokasi Dana Desa per kabupaten/kota atau desa/kelurahan dengan proyeksi jumlah penduduk kabupaten/kota atau desa/kelurahan pada tahun yang sama. Hal ini membuat satuan yang sama pada setiap kabupaten/kota/desa/kelurahan dan intervensi yang bersifat kontinu. Daerah administrasi desa adalah kelompok yang memperoleh intervensi dan daerah administrasi kelurahan merupakan kelompok kontrol. Adapun untuk meyakinkan bahwa estimasi yang dilakukan adalah karena adanya intervensi Dana Desa, maka dilakukan serangkaian uji plasebo.

Beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis menggunakan statistik deskriptif dan ekonometrika program evaluasi, yaitu metode *difference-in-difference* (DID) dan *triple difference* (DDD), adalah sebagai berikut:

### **Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)**

1. Estimasi rata-rata Dana Desa per kapita yang diperoleh setiap desa sampel pada tahun 2015-2017 adalah sebesar Rp375.100. Jumlah badan usaha lokal di desa dan kelurahan per kapita sekitar 1%-2% sebelum adanya intervensi. Setelah periode pelaksanaan program Dana Desa, BUM Desa per kapita meningkat secara substansial menjadi sekitar 8% sedangkan kelurahan hanya meningkat sekitar 0.4% untuk periode yang sama.
2. Peningkatan BUM Desa tidak hanya terjadi di Pulau Jawa tetapi juga terjadi di luar Pulau Jawa, dan mencakup seluruh jenis usaha. Bentuk usaha penyewaan seperti penyewaan



alat-alat pertanian, gedung pertemuan dan kendaraan yang paling besar pertumbuhannya setelah program Dana Desa, yaitu sekitar 6 kali lipat dari periode sebelum adanya Dana Desa.

3. Model yang kami gunakan mengatakan bahwa setiap penambahan satu juta rupiah Dana Desa per kapita yang diberikan kepada pemerintah desa meningkatkan kemungkinan adanya 0.003 BUM Desa per kapita atau peningkatan sebesar 14% dari jumlah BUM Desa per kapita sebelum adanya program Dana Desa di wilayah administrasi desa. Dengan rata-rata Dana Desa per kapita sebesar 375 ribu rupiah, maka diestimasikan meningkatkan ketersediaan sekitar 1 BUM Desa untuk 1.000 penduduk desa.

### **Pengetahuan Masyarakat dan Pemanfaatan Bum Desa**

1. Penerima manfaat informasi keberadaan badan usaha lokal desa/kelurahan lebih besar diterima oleh rumah tangga yang merupakan keluarga dari aparat desa/tokoh masyarakat dan penerimanya regresif terhadap pendapatan per kapita keluarga. Hal ini mengindikasikan masih terbatasnya akses informasi badan usaha lokal desa/kelurahan oleh rumah tangga miskin dan yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan aparat desa.
2. Terbatasnya informasi kepada masyarakat berhubungan dengan terbatasnya masyarakat yang pernah memanfaatkan keberadaan badan usaha di lingkungan mereka, walaupun tingkat pemanfaatan badan usaha di desa lebih tinggi (sekitar 15%) dari pada tingkat pemanfaatan badan usaha di kelurahan (sekitar 10%).
3. Kami juga menemukan adanya indikasi ketidakselarasan antara jenis usaha BUM Desa yang dibangun dengan kebutuhan masyarakat. BUM Desa dengan jenis usaha penyewaan mengalami peningkatan terbesar, namun masyarakat lebih banyak memanfaatkan BUM Desa jenis usaha lainnya seperti pendanaan dan perdagangan.
4. Rendahnya pemanfaatan dan ketidakselarasan ini berkorelasi dengan rendahnya partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam proses pengambilan keputusan program desa. Desa yang memiliki partisipasi masyarakat lebih besar berkorelasi positif dengan semakin besarnya tingkat pemanfaatan BUM Desa di wilayah tersebut. Rendahnya tingkat pemanfaatan tersebut perlu menjadi perhatian mengingat keberadaan badan usaha tidak optimal membawa manfaat ekonomi pada masyarakat apabila tingkat pemanfaatan masyarakat rendah

### **BUM Desa dan Kesempatan Kerja**

1. Layanan jasa lembaga keuangan merupakan jenis layanan yang lebih cenderung dimanfaatkan oleh masyarakat desa/kelurahan. Meskipun penggunaan layanan keuangan di desa lebih rendah, namun penggunaan layanan perdagangan dan distribusi di pedesaan jauh lebih tinggi dari pada di kelurahan. Hal ini mengindikasikan layanan keuangan dan layanan perdagangan adalah dua jenis layanan yang lebih cenderung diakses oleh





masyarakat desa, sedangkan di kelurahan, hanya layanan keuangan yang lebih cenderung untuk diakses oleh masyarakat. Sementara itu, pemanfaatan badan usaha lokal untuk pelatihan/pengembangan dan penyewaan sangat kecil sekali apabila dibandingkan dengan jenis layanan lainnya.

2. Proporsi masyarakat yang bekerja di bidang jasa lebih kecil untuk masyarakat desa dibandingkan masyarakat yang tinggal di kelurahan. Seiring dengan waktu, semakin besar proporsi orang yang bekerja di sektor jasa, baik masyarakat yang berada di wilayah kelurahan maupun wilayah desa. Akan tetapi, peningkatan proporsi orang yang bekerja di sektor jasa lebih besar untuk rumah tangga yang tinggal di desa yang memiliki BUM Desa dibandingkan kelurahan ataupun desa yang tidak memiliki BUM Desa untuk masyarakat yang berada di luar Jawa. Hal ini mengindikasikan BUM Desa memberikan kesempatan kerja di bidang jasa untuk masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa.
3. Metode yang digunakan juga memberikan indikasi BUM Desa memberikan kesempatan bekerja masyarakat desa di bidang jasa. Peningkatan kesempatan kerja ini terjadi di wilayah luar Jawa. Namun, kami tidak menemukan indikasi meningkatnya kesempatan kerja di bidang lainnya yang disebabkan karena adanya BUM Desa wilayah desa tersebut. Hal ini mendukung ide pemanfaatan BUM Desa yang lebih banyak dimanfaatkan sebagai akses keuangan dan perdagangan sehingga membuka peluang untuk masyarakat melakukan usaha di bidang jasa. Hasil ini perlu dicermati karena sebagian besar sampel merupakan rumah tangga yang berada di Pulau Jawa. Kami juga tidak memiliki sampel yang berada di Pulau Papua untuk sampel yang berada di luar Jawa. Sehingga estimasi yang dilakukan mungkin akan memberikan hasil berbeda jika terdapat distribusi yang sampel yang berbeda.

#### **Dana Desa dan Lapangan Pekerjaan**

1. Alokasi Dana Desa per kapita memberi kemungkinan meningkatnya individu yang bekerja di sektor pertanian dan jasa, akan tetapi dengan semakin tingginya alokasi Dana Desa per kapita tidak selalu meningkatkan kesempatan kerja. Sebagai contoh, terlalu besarnya dana memungkinkan semakin sulitnya manajemen pemanfaatan dana sehingga dana tidak digunakan untuk kegiatan produktif. Walaupun demikian, proporsi wilayah penerima yang mendapat Dana Desa per kapita lebih dari dua juta rupiah tidak besar. Mayoritas wilayah kabupaten menerima Dana Desa per kapita dibawah satu juta rupiah dengan rata-rata 375 ribu rupiah.
2. Kami tidak menemukan adanya dampak Dana Desa terhadap peningkatan kesempatan kerja di bidang manufaktur. Lapangan kerja manufaktur termasuk manufaktur pembuatan infrastruktur. Jika masifnya pembangunan infrastruktur karena besarnya pemanfaatan Dana Desa untuk infrastruktur dapat mempekerjakan masyarakat desa, maka akan adanya dampak alokasi Dana Desa terhadap manufaktur. Akan tetapi, hasil ini juga mengindikasikan program-program pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan pembangunan jalan lainnya belum dapat memberikan peningkatan lapangan pekerjaan



di bidang manufaktur (termasuk infrastruktur) yang substansial dibandingkan wilayah di kelurahan.

### **Dana Desa dan Infrastruktur**

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa porsi pemanfaatan Dana Desa masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur. Penelitian ini mencoba membandingkan persepsi responden terhadap kualitas 4 (empat) kategori infrastruktur yaitu infrastruktur transportasi, penerangan, kesehatan, dan pertanian; antara sebelum adanya program Dana Desa (2014) dan setelah adanya Dana Desa (2018).
2. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kepuasan atas kualitas infrastruktur antara desa dan kelurahan 5 (lima) tahun lalu (2014) masih relatif berbeda secara signifikan jika dibandingkan persepsi kepuasan saat ini (2018). Lima tahun lalu pada berbagai tingkat pendapatan, persepsi kualitas masyarakat kelurahan masih di atas rata-rata masyarakat desa. Kondisi perbedaan ini mengalami perubahan setelah lebih dari 3 (tiga) tahun kebijakan Dana Desa digulirkan.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan temuan yang diperoleh, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya regulasi yang mengatur tentang proporsi pemanfaatan Dana Desa sesuai keadaan regional wilayah tersebut sehingga adanya proporsi substansial Dana Desa yang digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia;
2. Karena Dana Desa sebagai salah satu program peningkatan perekonomian desa dan penanggulangan kemiskinan, faktor jumlah penduduk (atau jumlah penduduk miskin) dan luas wilayah dapat menempati proporsi yang substansial dalam formula alokasi Dana Desa. Hal ini diperlukan karena variasi jumlah penduduk (dan luas wilayah) yang besar antara tiap wilayah.
3. Sebagian besar desa telah memiliki BUM Desa yang dapat dioptimalkan. Perlunya regulasi untuk meningkatkan diseminasi informasi dan partisipasi masyarakat dalam penentuan jenis usaha BUM Desa di wilayah desa sehingga terjadi keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan pembentukan badan usaha lokal. Hal ini dapat meningkatkan pemanfaatan badan usaha lokal tersebut.
4. Perlunya regulasi untuk menjalin kerja sama antara pemerintah lokal dengan pihak swasta yang ahli dalam bidang usaha yang dijalankan BUM Desa sehingga dapat berkembang secara optimal dan tidak bergerak secara tradisional. Regulasi ini juga dapat mencegah terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang aparat pemerintah desa.



## PENELITIAN LANJUTAN

Laporan ini hanya berfokus pada pemanfaatan BUM Desa dan kesempatan kerja masyarakat serta persepsi masyarakat atas kualitas infrastruktur. Mengingat survei Dana Desa 2018 yang telah dilakukan mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa atau kelurahan, maka direncanakan untuk dilakukan penelitian mendalam mengenai aspek sosial ekonomi lainnya akan dilakukan pada periode-periode selanjutnya. Kami telah melakukan beberapa analisis deskriptif seperti infrastruktur, partisipasi masyarakat desa dalam program desa, dan pelayanan publik. Tabel 5.1 adalah rangkuman analisis deskripsi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat desa berdasarkan survei Dana Desa yang dilaksanakan:

**Tabel 5.1 Ringkasan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa**

Aspek Sosial Ekonomi	Keterangan
Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur desa dan kepuasan masyarakat dengan kualitas infrastruktur dibandingkan 5 tahun sebelumnya.
Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan pelayanan publik dibandingkan 5 tahun sebelumnya.
Partisipasi Masyarakat	70% responden menyatakan tidak dilibatkan dalam partisipasi program desa.
Inklusi Keuangan	Rendahnya masyarakat yang memanfaatkan program inklusi keuangan desa/kelurahan.
Inovasi Pemanfaatan Dana Desa	Besarnya proporsi penggunaan Dana Desa melautkan dari bentuk pemanfaatan program sebelumnya (PNPM Mandiri) berupa pembangunan infrastruktur.

Sumber: Diolah Tim Peneliti

Penelitian lanjutan akan dilakukan dengan mengeksplorasi lebih dalam hasil olahan data primer, dan menjajaki kemungkinan survei tambahan bersama dengan mahasiswa PKN STAN yang diharapkan dapat memperkaya serta mengkonfirmasi informasi yang sudah ada.





---

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadie, A. (2005). Semiparametric difference-in-differences estimators. *The Review of Economic Studies*, 72(1), 1-19.
- Arcand, J.-L. (2008). *Does community driven development work? Evidence from Senegal*.
- BKF. (2016). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa*. Jakarta.
- BKF. (2017). *Manfaat Dana Desa Dalam Percepatan Pembangunan Dan Pengentasan Kemiskinan Desa*. Jakarta.
- Beath, A., Christia, F., & Enikolopov, R. (2013). *Randomized Impact Evaluation of Afghanistan's National Solidarity Programme*.
- Bertrand, M., Duflo, E., & Mullainathan, S. (2004). How much should we trust differences-in-differences estimates? *The Quarterly Journal of Economics*, 119(1), 249-275.
- Bhattacharya, J., & Sood, N. (2006). *Health insurance and the obesity externality*. In *The economics of obesity* (pp. 279-318). Emerald Group Publishing Limited.
- Boonperm, J., Haughton, J., & Khandker, S. R. (2013). *Does the Village Fund matter in Thailand? Evaluating the impact on incomes and spending*. *Journal of Asian Economics*, 25, 3-16.
- Boonperm, J., Haughton, J., Khandker, S. R., & Rukumnuaykit, P. (2012). *Appraising the Thailand village fund*. The World Bank.
- Center, A. P. P. (2007). *Tracking Progress towards Community Empowerment and Welfare (Midterm Survey for the Impact Evaluation of the KalahiCIDSS)*. Manila: Asian Pacific Policy Center.
- Chandoevrit, W., & Ashakul, B. (2008). *The impact of the village fund on rural households*. *TDRI Quarterly Review*, 23(2), 9-16.
- Chase, R., & Sherburne-Benz, L. (2001). *Household effects of African community initiatives: evaluating the impact of the Zambia Social Fund*. The World Bank.
- Deininger, K., & Liu, Y. Y. (2009). *Longer Term Economic Impact of Self Help Groups in India*. World.
- Ghosal, S. (2013). *Soft or hard: Infrastructure matters in rural economic empowerment*. *Journal of Infrastructure Development*, 5(2), 137-149.
- Gibson, J. & Olivia, S. (2010). *The effect of infrastructure access and quality on non-farm enterprises in rural Indonesia*. *World Development*, 38(5), 717-726.



Harmiati & Zulhakim, A. A (2017) *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*. Diakses melalui <http://setnas-asean.id/site/uploads/document/journals/file/59b0f03a8a119-14-cluster-ekonomi-unihaz.pdf>.

Kanbur, R. & Rauniyar, G. (2010). *Conceptualizing inclusive development: With application to rural infrastructure and development assistance*. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 15(4), 437-454.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Labonne, J. (2013). *Philippines-KALAH-CIDSS Impact Evaluation, A Revised Synthesis Report*. Discussion Papers, 69094.

Menkhoff, L., & Rungruxsirivorn, O. (2009). *Village funds in the rural credit market of Thailand*.

Murwadji, T., Rahardjo, D. S., & Hasna (2018). *Koperasi Versus Bum Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1).

Newman, J., Pradhan, M., Rawlings, L. B., Ridder, G., Coa, R., & Evia, J. L. (2002). *An impact evaluation of education, health, and water supply investments by the Bolivian Social Investment Fund*. *The World Bank Economic Review*, 16(2), 241-274.

Parajuli, D., Acharya, G., Chaudhury, N., & Thapa, B. B. (2012). *Impact of Social Fund on the Welfare of Rural Households: Evidence from the Nepal Poverty Alleviation Fund*. The World Bank.

Puhani, P. A. (2012). *The treatment effect, the cross difference, and the interaction term in nonlinear "difference-in-differences" models*. *Economics Letters*, 115(1), 85-87.

Purwantini, T. B. & Suhaeti, R. N. (2017). *Irigasi kecil: Kinerja, masalah, dan solusinya*. *Forum Penelitian Agroekonomi*, 35(2), 91-105.

Putra, H. S. & Rianto, N. (2017). *Pengaruh akses air bersih terhadap kemiskinan di Indonesia: Pengujian data rumah tangga*. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum*, 9(1), 6-76.

PATTIRO. (2016). *Mempertanggung Badan Usaha Milik Desa untuk Menggerakkan Ekonomi Desa*. PATTIRO: Jakarta.

SMERU. (2018). *Praktik dan Kecenderungan Tata Kelola : Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Desa*. Jakarta.

Sutoro, E & Tim FPPD (2013), "Policy Paper: Membangun BUM Desa yang Mandiri, Kokoh dan Berkelanjutan," 2 Desember 2013



# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Kuisisioner Aparat Desa/Kelurahan

SURVEI EVALUASI PROGRAM DANA DESA - KELURAHAN/DESA/DUSUN Kementerian Keuangan, 2018		RAHASIA	KODE: A
<b>BLOK I. KETERANGAN UMUM</b>		<b>INFORMASI DAN PANDUAN PENGISIAN</b>	
1001	Provinsi	<input type="checkbox"/>	Pertanyaan dengan awalan <b>[D]</b> hanya untuk desa bukan untuk kelurahan  Mengenai penyerapan Dana Desa (nomor 3006); a Untuk pembangunan infrastruktur Desa (jalan, penerangan, irigasi, dsb) b Untuk pengelolaan BUMDes, penyediaan lapangan pekerjaan dsb c Untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa d Untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Masyarakat Desa (contoh: Pelatihan)  Mengenai nomor 5001 poin (c) terkait jasa; PNS, jasa pendidikan (guru), jasa profesional, jasa transportasi, dll  Responden diutamakan: 1 Kepala Desa/ Lurah 2 Sekretaris / KAU / KASI Desa / Kelurahan 3 Staff Desa/Kelurahan Lainnya / BPD 4 Untuk pilihan "Lainnya" harap dijelaskan jabatan beliau.
1002	Kabupaten/Kota	<input type="checkbox"/>	
1003	Kecamatan	<input type="checkbox"/>	
1004	Desa/Kelurahan	<input type="checkbox"/>	
1005	Jenis Pemerintahan (1 Desa 2 Kelurahan)	<input type="checkbox"/>	
1006	Alamat (Jalan, RT/RW)	<input type="checkbox"/>	
1007	Koordinat alamat ( <i>latitude-longitude</i> )	<input type="checkbox"/>	
1008	Nama Responden	<input type="checkbox"/>	
1009	Jenis Kelamin (1. Laki-Laki 2. Perempuan) *Jangan ditanyakan	<input type="checkbox"/>	
1010	No telp/HP Responden	<input type="checkbox"/>	
1011	Jabatan Responden (1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Staff Kantor Desa) (4. Lurah 5. Sekretaris Kelurahan 6. Staff Kantor Kelurahan) (7. Lainnya .....)	<input type="checkbox"/>	
1012	Lama Jabatan Untuk Posisi Diatas (Tahun 9.Tidak Tahu)	<input type="checkbox"/>	
1013	Pendidikan Terakhir Responden (1. Tidak Bersekolah 2. SD 3. SMP 4. SMU 5.Univ)	<input type="checkbox"/>	
1014	Jumlah Penduduk (jiwa)	<input type="checkbox"/>	
1015	Luas Wilayah (m2)	<input type="checkbox"/>	
1016	<b>Pewawancara Mendapat Foto Kantor Desa? (1. ya 0. tidak)</b> <small>Upload Google Drive: folder Data/NIM Pewawancara; Format File: Kode Propinsi-Kode Kabupaten-Kode Kecamatan-Kode Kelurahan-Kode Sampel-Desa-1011.ekstensi; Contoh: 11-01-001-001-01-DESA-1011.jpg</small>	<input type="checkbox"/>	
<b>BLOK II. KETERANGAN PEWAWANCARA</b>			
2001	a Nama Pewawancara/NIM	<input type="checkbox"/>	
	b Tanggal Survey (dd-mm-yyyy)	<input type="checkbox"/>	
	c Tanda Tangan	<input type="checkbox"/>	
2002	a Nama Supervisi/NIM	<input type="checkbox"/>	
	b Tanggal Supervisi (dd-mm-yyyy)	<input type="checkbox"/>	
	c Tanda Tangan	<input type="checkbox"/>	
<b>BLOK III. SUMBER PENDANAAN DESA/KELURAHAN</b>			
3001	Berapakah Total Pendapatan Desa/Kelurahan ini pada Tahun 2017? (Juta Rupiah)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3002	<b>[D]</b> Apakah pada Tahun 2017 Desa/Kelurahan ini memiliki sumber pendapatan sebagai berikut? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>	Jumlah (Juta Rupiah)
	a Pendapatan Asli Desa/Kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b Dana Desa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3003	<b>[D]</b> Tahun Berapa Program Dana Desa Dimulai Di Desa Anda? (tahun 9999. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3004	<b>[D]</b> Apakah Desa ini memiliki Laporan Keuangan Dana Desa (Contoh: Laporan dari Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes))? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3005	<b>[D]</b> Siapakah yang menyiapkan Laporan Keuangan Dana Desa? (1. Aparat Desa 2. Aparat Kecamatan 3. Operator/Pendamping Desa 4. Lainnya.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3006	<b>[D]</b> Proporsi Penggunaan Dana Desa (dalam Persen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	a Pembangunan Infrastruktur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b Pemberdayaan Masyarakat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c Penyelenggaraan Pemerintahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d Pembinaan Kemasyarakatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



BLOK IV. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) / BADAN USAHA EKONOMI KELURAHAN			
4001	Apakah Desa/Kelurahan Anda Memiliki <b>Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Ekonomi Kelurahan</b> ? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	JIKA JAWABAN 0/9 LANGSUNG KE BLOK V	
4002	Tahun berapa <b>Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Ekonomi Kelurahan</b> tersebut berdiri? (tahun, 9. tidak tahu)		
4003	Apakah <b>jenis usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)/Badan Usaha Ekonomi Kelurahan</b> di pada tahun 2017 di Desa/Kelurahan Anda? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	a Perbankan/Lembaga Keuangan Non Bank (Contoh: Memberikan Pinjaman Usaha)		
	b Perdagangan dan Distribusi (Contoh: Penjualan Hasil Pertanian, Pembelian Bibit Unggul, Penyaluran Produk Pertanian)		
	c Penyewaan (Contoh: Menyewa alat pertanian)		
	d Pengembangan Karir/Usaha (Contoh: Mengadakan Pelatihan Kerja/Usaha)		
	e Pariwisata (Contoh: Pengelolaan Area Wisata, Penyedia Jasa (Guide) atau Barang (Souvenir) Pada Area Pariwisata)		
	f Pengelolaan Air Bersih, Sanitasi, dan Limbah (Contoh: Pembuatan Jaringan Air Bersih)		
	g Kontraktor (Contoh : Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Jalan, Saluran Irigasi, Pembangunan MCK)		
	h Jasa Lainnya, Sebutkan: .....		
4004	Berapa jarak <b>BUMDes/Badan Usaha Ekonomi Kelurahan</b> dari Kantor Desa/Kelurahan Anda? (dalam kilometer)		
4005	Apakah <b>BUMDesa/Badan Usaha Ekonomi Kelurahan</b> memberikan manfaat berikut selama setahun terakhir? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	A Penyediaan Lapangan Pekerjaan (Contoh: Sebagai Pekerja atau Penyedia Barang dan Jasa)		
	B Pelatihan dan (atau) Pendampingan Usaha (Contoh: Pelatihan Pembuatan Souvenir)		
	C Pemberian Modal Kerja		
	D Bantuan Sarana Usaha (Contoh: Pemberian Mesin Jahit, Mesin Pengolah Padi)		
4006	Apakah terdapat <b>bantuan lainnya untuk pekerjaan / usaha</b> tersebut diatas dari selain dari <b>BUMDes</b> selama setahun terakhir? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	A Pemerintah Desa/Kecamatan Melalui Program Dana Desa		
	B Pemerintah Desa/Kecamatan Tidak Melalui Program Dana Desa		
	C Pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi		
	D Pemerintah Pusat		
4007	<b>Pewawancara Cek 4004</b> (Apakah lokasi <b>BUMDesa/ Badan Usaha Ekonomi Kelurahan</b> dapat dikonfirmasi melalui google map atau cek fisik? (1. ya 0. tidak))		
	Latitude <input type="text"/>	Longitude <input type="text"/>	
	(Foto Upload Ke Google Drive; folder Data/NIM Pewawancara; Format File: Kode Propinsi-Kode Kabupaten-Kode Kecamatan-Kode Kelurahan-Kode Sampel-Desa-4007.ekstensi; Contoh: 11-01-001-001-01-DESA-4007.jpg)		
BLOK V. LAPANGAN PEKERJAAN UMUM			
5001	Berapa banyak penduduk desa yang memiliki sumber mata pencaharian utama dari:		
	a Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan (Petani, Buruh Tani, Nelayan, dsb)		
	b Perdagangan/Jasa/Konstruksi (Toko Kelontong, Buruh Bangunan, Supir, Ojek, dsb)		
	c Industri (Buruh Pabrik)		
	d Lainnya .....		
5002	[D] Apakah <b>Dana Desa</b> menciptakan lapangan pekerjaan baru (mengurangi pengangguran)? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	JIKA JAWABAN 0/9 LANGSUNG KE 5004	
5003	[D] Jika ya, apa saja jenis bidang lapangan pekerjaan baru utama yang diciptakan oleh <b>program Dana Desa</b> ? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	a Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan (Petani, Buruh Tani, Nelayan, dsb)		
	b Perdagangan/Jasa/Konstruksi (Toko Kelontong, Buruh Bangunan, Supir, Ojek, dsb)		
	c Industri (Buruh Pabrik)		
	d Lainnya .....		
5004	Apakah anda mengetahui kendala yang dihadapi kantor desa/kelurahan untuk menyediakan lapangan pekerjaan/usaha? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
5005	Apakah kendala yang dihadapi kantor desa/kelurahan untuk menyediakan lapangan pekerjaan/usaha? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	A Tidak Terdapat Dana / Dana Tidak Mencukupi		
	B Peraturan Sulit Untuk Diterapkan		
	C Masyarakat Tidak Ingin Bantuan		
	D SDM tidak terampil		
	E Infrastruktur /akses tidak memadai		
	F Lainnya.....		
5006	[D] Seberapa besar pengaruh Dana Desa terhadap penurunan perantau dari desa anda? (1. 0-25% 2. 26-50% 3. lebih dari 50% 9. tidak tahu)		
5007	Infrastruktur desa/kelurahan mana kah yang paling penting dalam mendukung usaha masyarakat? (1. Jalan 2. Penerangan 3. Air Bersih 4. Lainnya 9. Tidak Tahu)		
BLOK VI. PROGRAM PNPM MANDIRI DAN DANA DESA			
6001	Apakah wilayah anda menjadi penerima <b>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri</b> ? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
6002	Sejak tahun berapa desa/kelurahan anda menjadi penerima <b>PNPM Mandiri</b> ?		
6003	Mohon urutkan sumber pendanaan utama untuk kegiatan di bawah ini	2012-2014	2015-2018
	Diurutkan sesuai proporsi (1 hingga 3) *1. besar 2. sedang 3. kecil	PNPM	Lainnya
	1. Infrastruktur (contoh: pembuatan saluran irigasi, jalan, jembatan, dll)		
	2. Kesehatan (contoh: pendampingan ibu hamil, posyandu, dll)		
	3. Pendidikan (contoh: memperbaiki kelas sekolah, membangun sekolah, dll)		
	4. Pemberdayaan Masyarakat (contoh: pendampingan usaha, partisipasi dalam kegiatan politik lokal, dll)		
	5. Lainnya .....		
6004	[D] Bagaimana proses administrasi Dana Desa dibandingkan Dana PNPM? (1. Lebih mudah 2. Lebih kompleks 3. Sama saja 9. Tidak tahu)		
BLOK VII. PROGRAM DESA/KELURAHAN UNTUK PENINGKATAN KESEHATAN			
7001	Adakah program desa/kelurahan yang digunakan untuk <b>program pemberdayaan kesehatan masyarakat</b> ? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	JIKA JAWABAN 0/9 LANGSUNG KE BLOK VIII	
7002	Jika ya, sebutkan jenis program pemberdayaan kesehatan masyarakat tersebut: (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	A Kunjungan Ke Rumah Masyarakat Untuk Memberikan Bantuan / Bimbingan Tentang Kesehatan dan Pencegahan Penyakit		
	B Pembinaan Aparat Desa/Kelurahan Kepada Kelompok Masyarakat (Poskedes, Polindes, Posyandu, dll) untuk peningkatan kualitas kesehatan		
	C Bidan Desa Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat Desa (Contoh: Pembinaan terkait HIV/AIDS)		
	D Tenaga Kesehatan memberikan pemeriksaan kesehatan kepada ibu hamil (Contoh: Visitasi kesehatan kandungan)		
	E Lainnya .....		
7003	[D] Adakah program sejenis seperti yang anda sebutkan sebelum tahun 2015? *Untuk desa sebelum adanya Dana Desa (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
7004	Jika ya, apakah perbaikan dalam pelayanan kesehatan desa/kelurahan setelah tahun 2015? *Untuk desa setelah adanya Dana Desa (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	A Kualitas Meningkat (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	i Obat yang memenuhi kebutuhan		
	ii Insentif bagi bidan desa meningkat		
	iii Kecepatan respons pelayanan kesehatan masyarakat		
	iv Ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat (Contoh: Tenaga kesehatan yang selalu siap sedia)		
	B Kuantitas Meningkat (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	i Meningkatnya jumlah bidan/tenaga kesehatan lain		
	ii Jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih banyak		
	iii Jumlah PMT (Pemberian Makanan Tambahan) lebih banyak		
	iv Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan (Contoh: Ambulans/ transportasi untuk kesehatan)		





BLOK VIII. KESETARAAN GENDER																																											
8001	Dari <b>10 orang</b> , berapa jumlah kaum perempuan yang terlibat dalam satu program desa/kelurahan? (Contoh: Sebagai tenaga terampil program Dana Desa)																																										
8002	<b>Apa saja kendala</b> dalam melibatkan kaum perempuan dalam program di desa/kelurahan anda? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)																																										
	A Pekerjaan Fisik Yang Sulit Dilakukan Perempuan (Contoh: Tukang Bangunan)																																										
	B Pekerjaan Jauh Dari Rumah (Lebih dari 5 Km)																																										
	C Tidak Diperbolehkan oleh Pengurus/Panitia Program/Keluarga																																										
	D Tingkat Pendidikan Rendah																																										
	E Budaya Mendahulukan Pria																																										
	F Lainnya .....																																										
8003	Menurut anda, apakah kaum perempuan dapat mendukung [program di desa/kelurahan anda]? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)																																										
	A Perempuan Lebih Teliti/Cermat /Sabar																																										
	B Perempuan Dapat Melakukan Kegiatan Fisik Yang Berat																																										
	C Perempuan Memiliki Keterampilan Khusus (Contoh: Penyajian konsumsi, hospitality, dll)																																										
	D Lainnya .....																																										
8004	Menurut pendapat anda, apakah keterlibatan perempuan sudah ideal dalam program di desa/kelurahan anda? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)																																										
8005	Dari <b>10 orang</b> , berapakah sebaiknya jumlah perempuan yang ideal dalam program di desa/kelurahan anda? (0-10 orang)																																										
8006	Apakah anda setuju dengan keterlibatan perempuan dalam program di desa/kelurahan anda? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)																																										
8007	Apakah terdapat alokasi Dana Desa untuk program pemberdayaan perempuan? (misalnya pelatihan) (1 ya 0. tidak 9. tidak tahu)																																										
BLOK IX. PROGRAM KEMISKINAN																																											
9001	Apakah di desa/kelurahan anda ada program untuk membantu orang miskin? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)																																										
9002	<b>Dalam bentuk apakah dasar pelaksanaan bantuan program tersebut?</b> (1. Peraturan Pemda 2. Peraturan Desa 3. jawaban 1 dan 2 0. tidak ada)																																										
9003	<b>Apakah ada partisipasi/keterlibatan masyarakat (Rembung Desa/Kelurahan atau sejenis) pada tahap penentuan sasaran atas bantuan program tersebut?</b> (1. ya 0. tidak)																																										
9004	Apa bentuk bantuan program yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan? (1. uang 2. barang 3. perbaikan rumah 4. lainnya)																																										
9005	Berapakah Jumlah rata-rata bantuan yang masyarakat desa/kelurahan tiap keluarga terima setahun terakhir? (rupiah; 9. tidak tahu)	Rp. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 100px;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																																									
9006	[D] Selain APBDes, darimanakah sumber bantuan bagi orang miskin di desa/kelurahan anda? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)																																										
	A APBD Kota/Kabupaten																																										
	B APBD Propinsi																																										
	C Swasta / BUMD / BUMN																																										
	D Swadaya Masyarakat																																										
	E Lainnya .....																																										
9007	[D] Apakah jenis bantuan program bagi orang miskin di desa/kelurahan anda selain APBDes diatas? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)																																										
	A Program Keluarga Harapan (PKH)																																										
	B Program Indonesia Pintar (PIP)																																										
	C Beras Sejahtera (Rastra/Kartu Keluarga Sejahtera)																																										
	D Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Kartu Keluarga Sejahtera)																																										
	E Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)																																										
	F Lainnya .....																																										
BLOK X. INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK																																											
10001	Apakah terdapat infrastruktur ..... di desa anda? (Kondisi pada 5 tahun lalu dan saat ini) (1 ya 0. tidak 9. tidak tahu)	2012-2014	2015-2018																																								
	A Sanitasi (MCK)																																										
	B Jalan (Jalan aspal/hotmix/beton/cor)																																										
	C Selokan/pengendalian banjir																																										
	D Irigasi																																										
	E Penerangan (Lampu Jalan)																																										
	F Air bersih																																										
10002	Bagaimana kualitas infrastruktur ..... di desa anda? (Kondisi pada 5 tahun lalu dan saat ini)	2012-2014	2015-2018																																								
	(1. Sangat Memadai 2. Cukup Memadai 3. Kurang Memadai 4. Sangat Tidak Memadai 9. Tidak Tahu)																																										
	A Sanitasi (MCK)																																										
	B Jalan (Jalan aspal/hotmix/beton/cor)																																										
	C Selokan/pengendalian banjir																																										
	D Irigasi																																										
	E Penerangan (Lampu Jalan)																																										
	F Air bersih																																										
10003	Berapakah rata-rata lebar jalan (aspal/hotmix/beton/cor) setelah tahun 2015 di desa/kelurahan anda? (dalam m)																																										
	(baik peningkatan kapasitas jalan maupun pembuatan jalan baru)																																										
10004	Menurut anda, siapakah pihak yang paling berperan dalam pembangunan atau perbaikan infrastruktur di desa/kelurahan anda satu tahun terakhir?																																										
	(skala prioritas dari 1-5) *1 paling penting 5 kurang penting																																										
	A Masyarakat																																										
	B Kantor Desa/Dusun																																										
	C Pemerintah Daerah Lainnya																																										
	D Pemerintah Pusat																																										
	E Lainnya																																										
10005	Bagaimanakah kualitas pelayanan ..... di desa/kelurahan anda saat ini? (Kondisi pada 5 tahun lalu dan saat ini)	2012-2014	2015-2018																																								
	(1. Sangat Memadai 2. Cukup Memadai 3. Kurang Memadai 4. Sangat Tidak Memadai 9. Tidak Tahu)																																										
	A Transportasi																																										
	B Pelayanan pendidikan																																										
	C Pelayanan kesehatan																																										
	D Administrasi Kependudukan/Perizinan																																										
	E Layanan lembaga keuangan																																										
	F Akses layanan komunikasi (Konektivitas Layanan Telekomunikasi)																																										
10006	Menurut anda, siapakah pihak yang paling berperan dalam perbaikan kualitas pelayanan di desa anda satu tahun terakhir? (1-5 sesuai urutan pihak yang paling berperan)																																										
	A Masyarakat																																										
	B Kantor Desa/Dusun																																										
	C Pemerintah Daerah Lainnya																																										
	D Pemerintah Pusat																																										
	E Lainnya																																										
10007	<b>Pewawancara Cek 10001</b> (Apakah alamat jalan dapat dikonfirmasi melalui google map atau cek fisik? (1. ya 0. tidak)																																										
	Latitude <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 100px;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Longitude <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 100px;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																																										
	(Foto Upload Ke Google Drive; folder Data/NIM Pewawancara; Format File: Kode Prov.-Kode Kabupaten-Kode Kecamatan-Kode Kelurahan-Kode Sampel-Desa-10006.ekstensi)																																										
	Contoh: 11-01-001-001-01-DESA-10006.jpg																																										



BLOK EV. EVALUASI JAWABAN RESPONDEN (DIISI OLEH PEWAWANCARA)	
EV.01	Bagaimana Penilaian Anda Terhadap Jawaban Responden? (1. Sangat Baik 2. Baik 3. Kurang Baik 4. Sangat Tidak Baik)
EV.02	Bagaimana Penilaian Anda Terhadap Kesungguhan Perhatian Responden? (1. Sangat Baik 2. Baik 3. Kurang Baik 4. Sangat Tidak Baik)
EV.03	Bagaimana Hubungan Anda Dengan Responden? (1. Keluarga/Saudara 2. Teman/Rekan/Pernah Mengenal Sebelumnya 3. Tidak Mengenal Sebelumnya)
CATATAN	



## Lampiran 2. Kuisisioner Masyarakat Desa/Kelurahan

SURVEI EVALUASI PROGRAM DANA DESA - MASYARAKAT Kementerian Keuangan, 2018		RAHASIA	KODE: M
<b>BLOK I KETERANGAN UMUM</b>		<b>INFORMASI DAN PANDUAN PENGISIAN</b>	
1001	Provinsi		Keterangan: <b>Minimal 4 Responden Per Mahasiswa</b> <b>Kita</b> menggunakan sistem cluster: Jika di desa/kelurahan terdapat 7 atau lebih Rukun Warga (RW), maka: Responden 1: Keluarga di RW 1 Responden 2: Keluarga di RW 3 Responden 3: Keluarga di RW 5 Responden 4: Keluarga di RW 7 Jika di desa/kelurahan terdapat 4-6 Rukun Warga (RW), maka: Responden 1: Keluarga di RW 1 Responden 2: Keluarga di RW 2 Responden 3: Keluarga di RW 3 Responden 4: Keluarga di RW 4
1002	Kabupaten/Kota		
1003	Kecamatan		
1004	Desa/Kelurahan		
1005	Nomor Kode Sampel		
1006	Alamat (Jalan, RT/RW)		
1007	Koordinat alamat (latitude-longitude)		
1008	Nama Responden		
1009	Kedudukan Responden di Keluarga (1.KK 2.Istri/Suami 3.Anak 4.Lainnya.....)		
1010	Jenis Kelamin (1. Laki-Laki 2. Perempuan)		
1011	Usia Responden		Jika di desa/kelurahan terdapat kurang dari 4 Rukun Warga (RW), maka: Responden 1: Keluarga di RW 1 Responden 2: Keluarga di RW 1 Responden 3: Keluarga di RW 2 Responden 4: Keluarga di RW 2 Usia minimum responden adalah 15 tahun keatas Responden diutamakan Kepala Keluarga atau Istri/Suami Lapangan kerja/usaha utama adalah pekerjaan/usaha yang mendapatkan penghasilan terbesar dibandingkan dengan pekerjaan/usaha lainnya <input type="checkbox"/> Pertanyaan dengan awalan [D] hanya untuk desa bukan untuk kelurahan
1012	Pendidikan Terakhir Responden (1. Tidak Bersekolah 2. SD 3. SMP 4. SMU 5. Univ)		
1013	Responden Memiliki Hubungan Keluarga Dengan Aparat Desa (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
1014	<b>Responden Merupakan Tokoh Masyarakat</b>		
1015	No telp/HP Responden		
1016	Nama Kepala Keluarga		
1017	Banyaknya anggota Keluarga		
1018	Banyaknya anggota Keluarga berumur 0-14 tahun		
1019	Banyaknya anggota Keluarga berumur 15-64 tahun		
1020	Banyaknya anggota Keluarga berumur diatas 65 tahun		
1021	Banyaknya anggota Keluarga Yang Hamil		
1022	<b>Pewawancara Mendapat Foto Responden? (1. ya 0. tidak)</b>		
<small>Upload Google Drive: folder Data/NIM Pewawancara; Format File: Kode Propinsi-Kode Kabupaten-Kode Kecamatan-Kode Kelurahan-Kode Sampel-MASY-1017 ekstensi; Contoh: 11-01-001-003-01-MASY-1017.jpg</small>			
<b>BLOK II KETERANGAN PEWAWANCARA</b>			
2001	a Nama Pewawancara/NIM		
	b Tanggal Survey (dd-mm-yyyy)		
	c Tanda tangan		
2002	a Nama Supervisi/NIM		
	b Tanggal Supervisi (dd-mm-yyyy)		
	c Tanda tangan		
<b>BLOK III KETERANGAN PROGRAM</b>			
3001	[D] Apakah Anda Mengetahui Program "Dana Desa" di Desa Anda? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
3002	[D] Darimana Anda Mengetahui Informasi Program "Dana Desa"? (1. RT/RW/Kelurahan 2. Media Massa 3. Tetangga dan Lingkungan Sekitar)		
3003	[D] Apakah Anda Mengetahui Sejak Kapan Program Dana Desa Dimulai? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
3004	[D] Jika iya, tahun Berapa Program Dana Desa Dimulai Di Desa Anda?		
<b>BLOK IV.1 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) / BADAN USAHA EKONOMI KELURAHAN</b>			
4101	Apakah Anda Mengetahui Tentang "Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Ekonomi Kelurahan"? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		JIKA JAWABAN 0/9 LANGSUNG KE BLOK IV.2
4102	Darimana Anda Mengetahui Informasi "Badan Usaha Milik Desa"? (1. RT/RW/Kelurahan 2. Media Massa 3. Tetangga dan Lingkungan Sekitar)		
4103	Apakah Anda Pernah Memanfaatkan "Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Ekonomi Kelurahan" di Desa/Kelurahan Anda? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	a Perbankan/Lembaga Keuangan Non Bank (Contoh: Permohonan Pinjaman Usaha)		
	b Perdagangan dan Distribusi (Contoh: Penjualan Hasil Pertanian, Pembelian Bibit Unggul, Penyaluran Produk Pertanian)		
	c Penyewaan (Contoh: Menyewa alat alat pertanian)		
	d Pengembangan Karir/Usaha (Contoh: Mendapatkan Pelatihan Kerja/Usaha)		
	e Pariwisata (Contoh: Pengelolaan Area Wisata, Pemberi Jasa (Guide) atau Barang (Souvenir) Pada Area Pariwisata)		
	f Pengelolaan Air Bersih, Sanitasi, dan Limbah (Contoh: Pekerja pada Pembuatan Jaringan Air Bersih)		
	g Kontraktor (Contoh : Menjadi Pekerja pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Jalan, Saluran Irigasi, Pembangunan MCK)		
	h Jasa Lainnya, Sebutkan: .....		
4104	Estimasi, Berapa Jarak dari Rumah Anda Ke BUMDesa/Badan Usaha Ekonomi Kelurahan? (KM/Kilometer)		
4105	Apakah kendaraan utama yang digunakan dari Rumah Anda ke BUMDesa/Badan Usaha Ekonomi Kelurahan? (1. Jalan Kaki 2. Kendaraan Darat 3. Kendaraan Air 3. Kendaraan Udara)		
4106	Pewawancara Cek 4105 (Apakah jarak Rumah dengan BUMDesa dapat dikonfirmasi melalui google map atau cek fisik? (1. ya 0. tidak)		
	Estimasi, Berapa Jarak dari Rumah Responden Ke BUMDesa Menggunakan Google Map atau Aplikasi Map Lainnya? (KM/Kilometer)		
	(Foto Upload Ke Google Drive; folder Data/NIM Pewawancara; Format File: Kode Propinsi-Kode Kabupaten-Kode Kecamatan-Kode Kelurahan-Kode Sampel-MASY-4107.ekstensi; Contoh: 11-01-001-001-01-MASY-4107.jpg)		
<b>BLOK IV.2 PINJAMAN DARI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)</b>			
4201	Apakah Keluarga Anda Pernah Mengajukan Pinjaman Kepada Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Ekonomi Kelurahan selama Setahun Terakhir? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	JIKA JAWABAN PERTANYAAN 4201 0/9, LANGSUNG KE BLOK V		
4202	Apakah Alasan Pinjaman Keluarga Anda Kepada Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Ekonomi Kelurahan selama Setahun Terakhir? (1. Produksi/Usaha 0. Konsumsi 9. tidak tahu)		
4203	Adakah Pinjaman Keluarga Anda Yang Ditetujui oleh Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Ekonomi Kelurahan selama Setahun Terakhir? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	JIKA JAWABAN PERTANYAAN 4203 0/9, LANGSUNG KE BLOK V		
4204	Apakah Anda/Keluarga Mengetahui Jumlah Pinjaman Yang Ditetujui oleh BUMDesa / Badan Usaha Ekonomi Kelurahan selama Setahun Terakhir? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
4205	Jika ya, berapakah Jumlah Pinjaman Yang Ditetujui oleh BUMDesa / Badan Usaha Ekonomi Kelurahan selama Setahun Terakhir? (Rupiah)		
<b>BLOK V LAPANGAN PEKERJAAN UMUM / USAHA</b>			
5001	Apakah anda bekerja/memiliki usaha utama selama sebulan terakhir? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	JIKA JAWABAN PERTANYAAN 5001 0 LANGSUNG KE BLOK PERTANYAAN 5013; JIKA 9 LANGSUNG KE BLOK VII		
5002	Selain anda, adakah anggota keluarga lainnya yang bekerja/memiliki usaha selama setahun terakhir? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	A Istri / Suami		
	B Anak (Kandung atau Anak Angkat)		
	C Orang Tua (Kandung, Mertua atau Orang Tua Angkat)		
	D Lainnya .....		
5003	Sebutkan sejak tahun berapa keluarga anda bekerja/memiliki usaha utama tersebut diatas? (Angka Tahun; 9999 tidak Tahu)		
5004	Apakah jenis lapangan pekerjaan utama / usaha keluarga selama sebulan terakhir? (1. Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan (Petani, Buruh Tani, Nelayan, dsb); 2. Perdagangan/Jasa/Konstruksi (Toko Kelontong, Buruh Bangunan, Supir, Ojek, dsb) 3. Industri atau Buruh Pabrik; 4. Lainnya .....		
5005	Berapa jumlah karyawan di tempat bekerja / usaha utama keluarga anda? (angka jumlah karyawan; 9999. tidak tahu)		
5006	Sebutkan jumlah penghasilan pekerjaan/usaha utama anda sebulan terakhir (Rupiah)? (Angka dalam rupiah; 9. tidak tahu)	Rp	
5007	Sebutkan jumlah penghasilan pekerjaan/usaha utama keluarga (termasuk anda) sebulan terakhir (Rupiah)? (Angka dalam rupiah; 9. tidak tahu)	Rp	
5008	<b>Infrastruktur desa mana kah yang anda anggap paling penting dalam mendukung usaha Anda? (1. Jalan 2. Penerangan 3. Air Bersih 4. Lainnya 9. Tidak Tahu)</b>		
5009	Apakah BUMDesa/Badan Usaha Ekonomi Kelurahan berperan penting bagi kelangsungan pekerjaan atau usaha keluarga Anda selama Setahun Terakhir? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
5010	Apakah BUMDesa/Badan Usaha Ekonomi Kelurahan membawa manfaat bagi kelangsungan pekerjaan atau usaha keluarga Anda selama Setahun Terakhir? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		



5011	Sebutkan jenis bantuan yang diberikan oleh BUMDesa/Dana Desa untuk pekerjaan/usaha tersebut diatas selama setahun terakhir? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5012	Apakah anggota keluarga anda mendapatkan bantuan lainnya untuk pekerjaan / usaha tersebut diatas dari selain dari BUMDes selama setahun terakhir? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5013	Apakah Anda Tinggal di wilayah Desa/Kelurahan tempat anda tinggal saat ini? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>
5014	Apakah alasan anda tidak bekerja/tidak memiliki usaha selama sebulan terakhir? (2. Melanjutkan pendidikan 1. Tidak dapat bekerja 0. Sedang mencari pekerjaan 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>
5015	Apakah sebelum pekerjaan/usaha anda sekarang, anda sudah memiliki pekerjaan/usaha sebelumnya? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>
5016	Sebutkan sejak tahun berapa anda bekerja/memiliki usaha sebelumnya tersebut diatas?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5017	Alasan anda meninggalkan kal pekerjaan sebelumnya (1. Telah Habis Masa Kontrak 2. Menemukan Pekerjaan Baru Yang Lebih Tinggi Penghasilannya 3. Pekerjaan Sebelumnya Terlalu Jauh dari Tempat Tinggal 4. Lainnya 9. Tidak Tahu)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>BLOK VI. PROGRAM PNPM MANDIRI DAN DANA DESA</b>		
6001	Apakah anggota keluarga anda menjadi penerima manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>
6002	Siapaah anggota keluarga anda yang menjadi penerima manfaat PNPM Mandiri diatas tersebut? (1. saya sendiri 2. Istri/suami 3. anak 4. orang tua 5.lainnya)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6003	Tahun berapa keluarga anda terakhir kali menerima PNPM Mandiri? (angka tahun; 9999. tidak tahu)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6004	Apakah jenis peruntukan kegiatan dari dana PNPM Mandiri yang keluarga anda terima tersebut di atas (1. Infrastruktur 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Pemberdayaan Masyarakat 5. Lainnya 9. Tidak Tahu)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6005	[D] Apakah anggota keluarga anda menjadi penerima manfaat Program Dana Desa? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>
6006	[D] Siapaah anggota keluarga anda yang menjadi penerima manfaat Dana Desa diatas tersebut? (1. saya sendiri 2. Istri/suami 3. anak 4. orang tua 5.lainnya)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6007	[D] Apakah manfaat Dana Desa yang keluarga anda terima didapatkan melalui BUMDesa? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>
6008	[D] Tahun berapa terakhir kali keluarga anda menjadi penerima manfaat Dana Desa? (angka tahun; 9999. tidak tahu)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6009	[D] Apakah jenis peruntukan kegiatan dari Dana Desa yang anda terima tersebut di atas (1. Infrastruktur 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Pemberdayaan Masyarakat 5. Lainnya 9. Tidak Tahu)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6010	Bagaimana proses pemanfaatan Dana Desa dibandingkan Dana PNPM (1. Lebih mudah 2. Lebih kompleks 3. Sama saja 9. Tidak tahu)	<input type="checkbox"/>
<b>BLOK VII. PROGRAM DANA DESA UNTUK PENINGKATAN KESEHATAN</b>		
7001	Apakah anggota keluarga anda menerima program pemberdayaan kesehatan masyarakat selama setahun terakhir? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu JIKA JAWABAN 0/9 LANGSUNG KE 7005	<input type="checkbox"/>
7002	Jika ya, sebutkan jenis program pemberdayaan kesehatan masyarakat tersebut selama setahun terakhir: (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	A Kunjungan Ke Rumah Keluarga Anda Untuk Memberikan Bantuan / Bimbingan Tentang Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	<input type="checkbox"/>
	B Apakah ada Kelompok Masyarakat (Poskedes, Polindes, Posyandu, dll) yang memberikan penjelasan tentang pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat	<input type="checkbox"/>
	C Apakah terdapat Bidan Desa yang melakukan penjelasan tentang kesehatan keluarga	<input type="checkbox"/>
	D Jika terdapat Ibu Hamil, apakah mendapatkan pelayanan pemeriksaan kepada Ibu Hamil?	<input type="checkbox"/>
	E Lainnya .....	<input type="checkbox"/>
7002	Apakah program tersebut diatas merupakan bagian dari program Dana Desa / bantuan kelurahan di desa/kelurahan ini? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>
7003	Adakah program sejenis seperti yang anda sebutkan yang diadakan sebelum tahun 2015 ? * Desa: sebelum adanya program Dana Desa (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>
7004	Jika ya, apakah terdapat perbaikan jenis pelayanan dibandingkan program sebelum tahun 2015: (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	A Kualitas Meningkat (Contoh: Obat yang memenuhi kebutuhan, Bidan Desa yang lebih bersemangat)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	i Obat yang memenuhi kebutuhan	<input type="checkbox"/>
	ii Kecepatan respons pelayanan kesehatan masyarakat (contoh: Bidan Desa yang berkunjung ke rumah anda, waktu tunggu yang semakin singkat)	<input type="checkbox"/>
	iii Ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat (Contoh: Tenaga kesehatan yang selalu siap sedia)	<input type="checkbox"/>
	B Kuantitas Meningkat (Contoh: Bidan yang lebih banyak, jenis kegiatan yang lebih banyak)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	i Meningkatkan jumlah bidan/tenaga kesehatan lain di desa/kelurahan anda	<input type="checkbox"/>
	ii Jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih banyak	<input type="checkbox"/>
	iii Jumlah PMT (Pemberian Makanan Tambahan) lebih banyak	<input type="checkbox"/>
	iv Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan (Contoh: Ambulans/ transportasi untuk kesehatan)	<input type="checkbox"/>
7005	Apakah terdapat anggota keluarga yang sakit hingga seharusnya memerlukan perawatan intensif di puskesmas atau rumah sakit dalam satu tahun terakhir? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>
	JIKA JAWABAN PERTANYAAN 7005 0/9 LANGSUNG KE PERTANYAAN 7008	<input type="checkbox"/>
7006	Jika ya, apakah terdapat kendala untuk membawa anggota keluarga ke fasilitas kesehatan tersebut? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>
7007	Jika ya, kendala apakah ketika akan membawa anggota keluarga ke puskesmas atau rumah sakit? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	A Fasilitas kesehatan yang jauh (lebih dari 5 KM) / sulit dijangkau (contoh: di seberang sungai)	<input type="checkbox"/>
	B Tidak Ada Biaya	<input type="checkbox"/>
	C Dilakukan penolakan oleh fasilitas kesehatan (puskesmas / rumah sakit) (contoh: tidak menerima asuransi BPJS, Kamar perawatan yang penuh)	<input type="checkbox"/>
7008	Berapakah kira-kira jarak dari rumah anda menuju puskesmas/dokter umum/minik/bidan terdekat? (km)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7009	Berapakah kira-kira jarak dari rumah anda menuju rumah sakit terdekat? (km)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>BLOK VIII. KESETARAAN GENDER</b>		
8001	Adakah kaum perempuan sebagai penerima manfaat Dana Desa / bantuan kelurahan yang anda terima? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>
8002	Dari 10 orang, berapa jumlah kaum perempuan yang terlibat dalam program desa/kelurahan yang anda terima? (Contoh: Sebagai tenaga terampil program Dana Desa)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8003	Apakah terdapat kendala dalam melibatkan kaum perempuan dalam Program Dana Desa yang keluarga anda terima? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>
8004	Menurut anda, kendala apakah dalam melibatkan kaum perempuan dalam Program Desa / Kelurahan yang keluarga anda terima? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	A Pekerjaan Fisik Yang Sulit Dilakukan Perempuan (Contoh: Tukang Bangunan)	<input type="checkbox"/>
	B Pekerjaan Jauh Dari Rumah (Lebih dari 5 Km)	<input type="checkbox"/>
	C Tidak Diperbolehkan oleh Pengurus/Panitia Program/Keluarga	<input type="checkbox"/>
	D Tingkat Pendidikan Rendah	<input type="checkbox"/>
	E Budaya Mendahulukan Pria	<input type="checkbox"/>
	F Lainnya .....	<input type="checkbox"/>
8005	Menurut anda, dukungan apakah yang dapat diberikan kaum perempuan dalam Program Desa / Kelurahan yang keluarga anda terima? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	A Perempuan lebih teliti/cermat	<input type="checkbox"/>
	B Perempuan dapat melakukan kegiatan fisik yang berat	<input type="checkbox"/>
	C Perempuan melakukan kegiatan pendukung dari kegiatan utama (Contoh: Penyajian konsumsi)	<input type="checkbox"/>
	D Lainnya	<input type="checkbox"/>
8006	Menurut pendapat anda, apakah keterlibatan perempuan sudah ideal dalam Program Desa / Kelurahan yang anda terima? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>
8007	Dari 10 orang, berapakah sebaiknya jumlah perempuan yang ideal dalam Program Desa / Kelurahan yang keluarga anda terima? (0-10 orang)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8008	Apakah anda setuju dengan keterlibatan perempuan dalam Program Desa / Kelurahan yang keluarga anda terima? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>
8009	Apakah anda mengetahui bahwa Dana Desa dialokasikan untuk program pemberdayaan perempuan? (1 ya 0. tidak 9. tidak tahu)	<input type="checkbox"/>



BLOK XI. PROGRAM KEMISKINAN			
9001	Apakah anda mengetahui jika di desa/kelurahan anda ada <b>program untuk membantu orang miskin setahun terakhir?</b> (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
9002	Darimana anda mengetahui informasi tersebut diatas? (1. Kepala Desa/Lurah/Perangkat Desa/Kelurahan 2. Tetangga/Saudara 3. Surat kabar/lainnya)		
9003	Apakah anda atau anggota keluarga anda dilibatkan pada tahap penentuan sasaran atas bantuan program tersebut diatas? (Rembug Desa atau sejenis) (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
9004	Apakah anda atau anggota keluarga termasuk salah satu penerima dari bantuan program tersebut diatas? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
9005	Jika ya, dalam bentuk apa bantuan program yang anda atau anggota keluarga lainnya terima setahun terakhir? (1. uang 2. barang 3. perbaikan rumah 4. lainnya 9. tidak tahu)		
9006	Berapakah Jumlah bantuan yang anda terima jika bisa dinilai dengan uang setahun terakhir? (rupiah; 9. tidak tahu)	Rp	
9007	Apakah bantuan yang anda terima bermanfaat bagi anda? (1. sangat cukup 2. cukup 3. kurang cukup 4. sangat tidak cukup)		
9008	Apa saran anda terhadap program bantuan desa tersebut agar dapat lebih baik lagi di masa depan? (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	A Jumlah bantuan lebih besar (termasuk jumlah barang yang lebih banyak)		
	B Barang yang lebih sesuai kebutuhan, Sebutkan.....		
	C Lainnya .....		
9009	Apakah ada bantuan program lain yang anda atau keluarga anda terima setahun terakhir: (1. ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	A Program Keluarga Harapan (PKH)		
	B Program Indonesia Pintar (PIP)		
	C Beras Sejahtera (Rastra/Kartu Keluarga Sejahtera)		
	D Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Kartu Keluarga Sejahtera)		
	E Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)		
	F Lainnya .....		
BLOK X. INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK			
10001	Apakah terdapat infrastruktur ..... di rumah anda atau lingkungan di sekitar desa/kelurahan anda? (Kondisi pada 5 tahun lalu dan saat ini)	5 Tahun lalu	Saat ini
	dan saat ini) (1 ya 0. tidak 9. tidak tahu)		
	A Sanitasi		
	B Jalan (jalan aspal/hotmix/beton/cor)		
	C Selokan/pengendalian banjir		
	D Irigasi		
	E Penerangan		
	F Air bersih		
10002	Berapakah kira-kira jarak infrastruktur ..... di desa anda dari rumah anda? (Kondisi pada 5 tahun lalu dan saat ini) (Kilometer; 99. tidak tahu)		
	A Sanitasi		
	B Jalan (jalan aspal/hotmix/beton/cor)		
	C Selokan/pengendalian banjir		
	D Irigasi		
	E Penerangan		
	F Air bersih		
10003	Menurut anda bagaimana kualitas infrastruktur ..... yang terdekat dengan rumah anda? (Kondisi pada 5 tahun lalu dan saat ini)	5 Tahun lalu	Saat ini
	(1. Sangat Memadai 2. Cukup Memadai 3. Kurang Memadai 4. Sangat Tidak Memadai 9. Tidak Tahu)		
	A Sanitasi		
	B Jalan (jalan aspal/hotmix/beton/cor)		
	C Selokan/pengendalian banjir		
	D Irigasi		
	E Penerangan		
	F Air bersih		
10004	Berapakah lebar jalan (aspal/hotmix/beton/cor) setelah tahun 2015 yang terdekat dengan rumah anda? (dalam m)		
10005	Menurut anda, siapakah pihak yang paling berperan dalam pembangunan atau perbaikan infrastruktur di desa anda satu tahun terakhir? (1-5 sesuai urutan pihak yang paling berperan)		
	A Masyarakat		
	B Kantor Desa/Dusun		
	C Pemerintah Daerah Lainnya		
	D Pemerintah Pusat		
	E Lainnya		
10006	Bagaimanakah kualitas pelayanan ..... di desa anda saat ini? (Kondisi pada 5 tahun lalu dan saat ini)	5 Tahun lalu	Saat ini
	(1. Sangat Memadai 2. Cukup Memadai 3. Kurang Memadai 4. Sangat Tidak Memadai 9. Tidak Tahu)		
	A Transportasi		
	B Pelayanan pendidikan		
	C Pelayanan kesehatan		
	D Administrasi Kependudukan/Perizinan		
	E Layanan lembaga keuangan		
	F Akses layanan komunikasi (Konektivitas Layanan Telekomunikasi)		
10007	Urutkan, menurut anda siapakah pihak yang paling berperan dalam perbaikan kualitas pelayanan di desa anda satu tahun terakhir? (1-5 sesuai urutan pihak yang paling berperan)		
	A Masyarakat		
	B Kantor Desa/Dusun		
	C Pemerintah Daerah Lainnya		
	D Pemerintah Pusat		
	E Lainnya		
10008	Pewawancara Cek 10004 (Apakah jalan dapat dikonfirmasi melalui google map atau cek fisik? (1. ya 0. tidak)		
	Latitude		Longitude
	(Foto Upload Ke Google Drive; folder Data/NIM Pewawancara; Format File: Kode Propinsi-Kode Kabupaten-Kode Kecamatan-Kode Kelurahan-Kode Sampel-MASY-9007.ekstensi; Contoh: 11-01-001-001-01-MASY-9007.jpg)		
BLOK EV. EVALUASI JAWABAN RESPONDEN (DIISI OLEH PEWAWANCARA)			
EV.01	Bagaimana Penilaian Anda Terhadap Jawaban Responden? (1. Sangat Baik 2. Baik 3. Kurang Baik 4. Sangat Tidak Baik)		
EV.02	Bagaimana Penilaian Anda Terhadap Kesungguhan Perhatian Responden? (1. Sangat Baik 2. Baik 3. Kurang Baik 4. Sangat Tidak Baik)		
EV.03	Bagaimana Hubungan Anda Dengan Responden? (1. Keluarga/Saudara 2. Teman/Rekan/Pernah Mengenal Sebelumnya 3. Tidak Mengenal Sebelumnya)		
CATATAN			



### Lampiran 3. Estimasi dampak dana desa terhadap BUM Desa

**Tabel 3a. Estimasi Dampak Dana Desa Terhadap BUM Desa (*All Samples*)**

VARIABEL	BUM Desa / Capita	
	First Difference	DID
Village Fund (Mil) / Capita	0.281*** (0.0131)	0.340*** (0.00888)
Constant	0.0112*** (0.00288)	0.0112*** (0.00259)
Observation	8,691	15,851
R-squared	0.188	0.169
Control	No	No
Villages/Kelurahan FE	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes
# Villages/Kelurahan	1,090	1,985

Robust standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

**Tabel 3b. Estimasi Dampak Dana Desa Terhadap BUM Desa (*Heterogeneity*)**

VARIABLES	BUM Desa			
	Jawa		Non-Jawa	
	(1) DID	(2) First Difference	(3) DID	(4) First Difference
Village Fund (Mil) / Cap	0.390*** (0.0110)	0.299*** (0.0160)	0.313*** (0.0165)	0.270*** (0.0301)
Constant	0.00882*** (0.00143)	0.00874*** (0.00226)	0.0156*** (0.00460)	0.0221* (0.0122)
Observations	11,574	7,110	4,277	1,581
R-squared	0.233	0.258	0.120	0.132
Number of village/kelurahan	1,450	892	535	198

Standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1



#### Lampiran 4. Uji Plasebo, Badan Usaha Milik Desa

	(1)
VARIABLES	DID
	BUM Desa / Kapita
Dana Desa Per Kapita (Jutaan Rupiah)	-0.000155
	(0.000219)
Constant	0.0107***
	(0.000800)
Observations	9,920
Number of kelurahan	1,984
R-squared	0.075
Tahun falsifikasi	2014

Standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1



**Lampiran 5. Badan Usaha Milik Desa dan Kesempatan Kerja (Seluruh Sampel)**

	(1)	(2)	(3)
VARIABLES	Agriculture	Manufacturing	Services
Village-Owned-Enterprises/Capita	-0.00221 (0.00143)	-0.00248 (0.00224)	-0.00627 (0.00575)
Village-Owned-Enterprises/Capita *	-0.000807 (0.00279)	0.00149 (0.00242)	0.0102** (0.00487)
Village Fund Per Capita			
Constant	0.0418*** (0.000452)	0.0181*** (0.000461)	0.106*** (0.00181)
Observation	36,117	36,117	36,117
R-squared	0.004	0.005	0.022
Individual FE	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes
# Individual	4,529	4,529	4,529

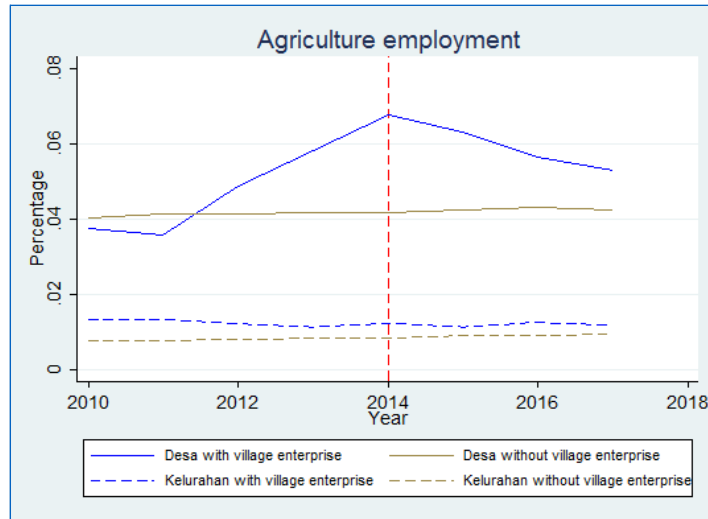
Robust standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

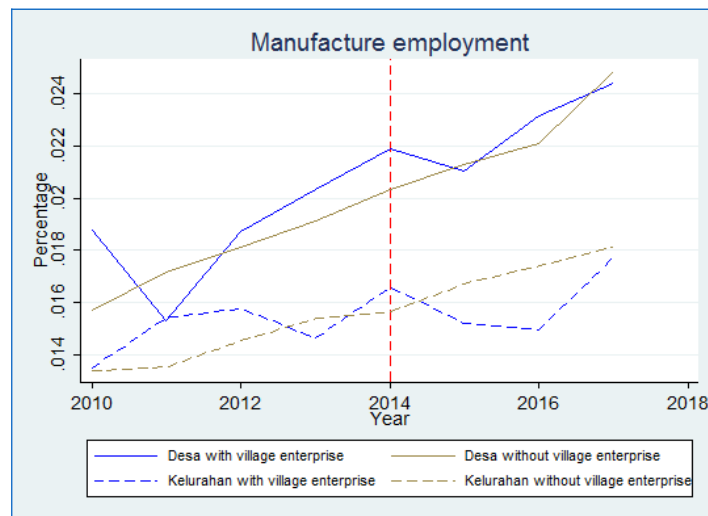




Lampiran 6. Badan Usaha Lokal dan Tren Pekerjaan di Sektor Pertanian dan Manufaktur



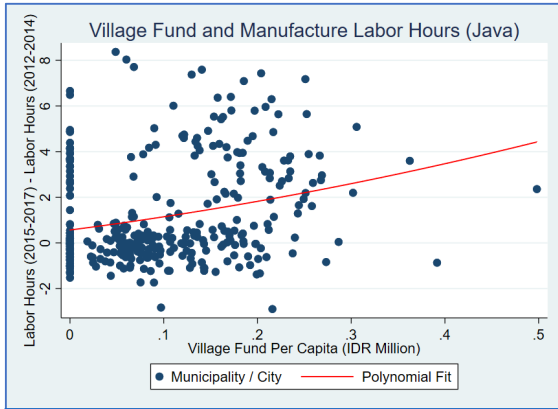
Gambar 6a. Rata-rata proporsi jumlah pekerja di sektor pertanian



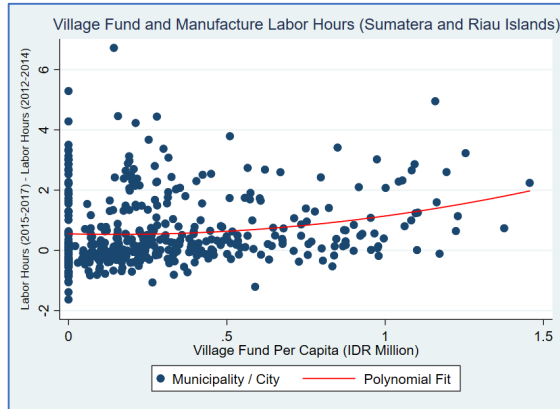
Gambar 6c. Rata-rata proporsi jumlah pekerja di sektor manufaktur (Jawa)



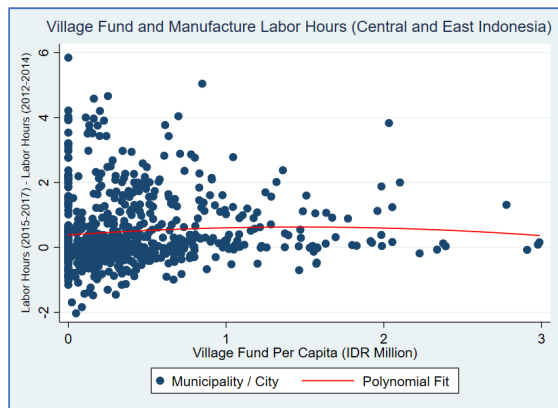
### Lampiran 7. Alokasi Dana Desa dan Jam Kerja di Bidang Manufaktur dan Jasa



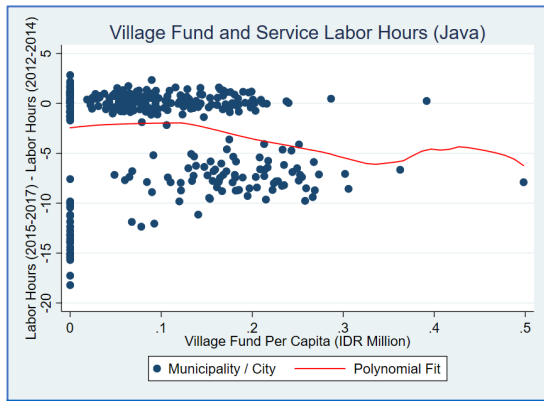
Gambar 7a. Alokasi dana desa dan Jam Kerja di bidang Manufaktur (Jawa)



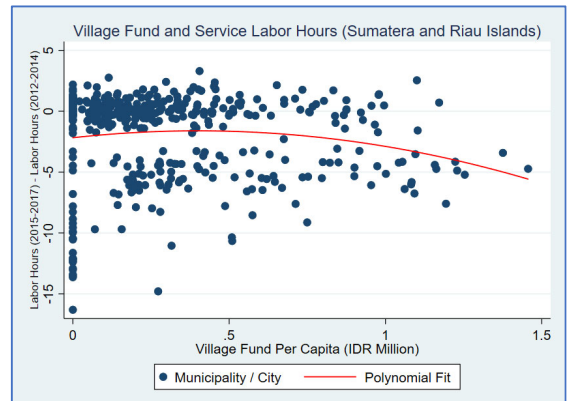
Gambar 7b. Alokasi dana desa dan Jam Kerja di bidang Manufaktur (Sumatera dan Riau)



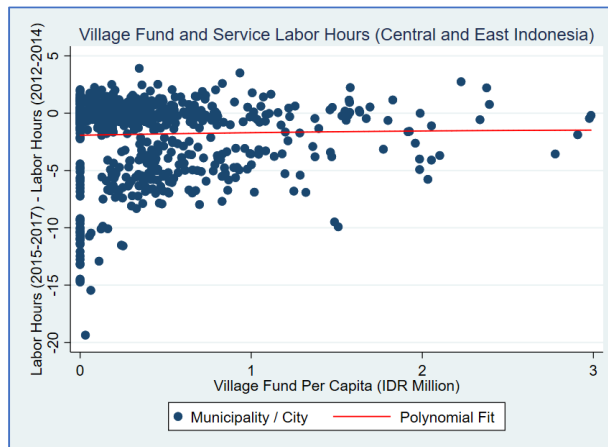
Gambar 7c. Alokasi dana desa dan Jam Kerja di bidang Manufaktur (Indonesia Tengah dan Timur)



Gambar 7d. Alokasi dana desa dan Jam Kerja di bidang Jasa (Jawa)



Gambar 7e. Alokasi dana desa dan Jam Kerja di bidang Jasa (Sumatera dan Riau)



Gambar 7f. Alokasi dana desa dan Jam Kerja di bidang Jasa (Indonesia Tengah dan Timur)



**Lampiran 8. Estimasi alokasi dana desa per kapita dan jam kerja (Pertanian)**

	(1)	(2)	(3)
VARIABEL	Jam Kerja Pertanian	Jam Kerja Pertanian	Jam Kerja Pertanian
Dana Desa / Kapita	2.5363	2.8536***	1.2096***
	(3.1356)	(0.9362)	(0.1825)
(Dana Desa / Kapita) <sup>2</sup>	10.2142	-2.5724	-0.3569***
	(15.9897)	(1.7362)	(0.0561)
Constant	0.6448	-4.5447***	-1.0204*
	(0.4500)	(0.7342)	(0.5355)
Observasi	1,239,038	1,225,507	1,779,427
R-squared	0.1988	0.2594	0.2654
Kontrol	Ya	Ya	Ya
Kabupaten FE	Ya	Ya	Ya
Propinsi*Tahun FE	Ya	Ya	Ya
Korelasi antar Pekerjaan	Ya	Ya	Ya
Pulau	Jawa	Sumatera	Indonesia Timur

Robust standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1



**Lampiran 9. Estimasi alokasi dana desa per kapita dan jam kerja (Manufaktur)**

	(1)	(2)	(3)
VARIABEL	Jam Kerja Manufaktur	Jam Kerja Manufaktur	Jam Kerja Manufaktur
Dana Desa / Kapita	2.5733	0.7107	-0.0950
	(3.2520)	(0.5662)	(0.0988)
(Dana Desa / Kapita) <sup>2</sup>	-29.5922*	-2.0915**	-0.0111
	(15.8114)	(1.0101)	(0.0267)
Constant	4.6687***	2.2060***	5.5614***
	(0.4066)	(0.4296)	(0.3790)
Observasi	1,239,038	1,225,507	1,779,427
R-squared	0.0964	0.0568	0.2654
Kontrol	Ya	Ya	Ya
Kabupaten FE	Ya	Ya	Ya
Propinsi*Tahun FE	Ya	Ya	Ya
Korelasi antar Pekerjaan	Ya	Ya	Ya
Pulau	Jawa	Sumatera	Indonesia Timur

Robust standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1



**Lampiran 10. Estimasi alokasi dana desa per kapita dan jam kerja (Jasa)**

	(1)	(2)	(3)
VARIABEL	Jam Kerja Jasa	Jam Kerja Jasa	Jam Kerja Jasa
Dana Desa / Kapita	4.2561 (3.6074)	-0.9562 (0.8675)	0.9775*** (0.1604)
(Dana Desa / Kapita) <sup>2</sup>	-9.0145 (15.8039)	2.9201** (1.3852)	-0.1199*** (0.0447)
Constant	4.2592*** (0.3813)	1.4611** (0.7326)	7.2092*** (0.4944)
Observasi	1,239,038	1,225,507	1,779,427
R-squared	0.1080	0.1146	0.1359
Kontrol	Ya	Ya	Ya
Kabupaten FE	Ya	Ya	Ya
Propinsi*Tahun FE	Ya	Ya	Ya
Korelasi antar Pekerjaan	Ya	Ya	Ya
Pulau	Jawa	Sumatera	Indonesia Timur

Robust standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1



**Lampiran 11. Uji plasebo estimasi alokasi dana desa per kapita dan jam kerja (Jawa)**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VARIABLES	Pertanian	Manufaktur	Jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa
Dana Desa / Kapita	0.0708	0.1979	0.2898	0.1448	0.2395	0.1738
	(0.2619)	(0.2349)	(0.2364)	(0.1674)	(0.1562)	(0.1702)
(Dana Desa / Kapita) <sup>2</sup>	-0.3666	-0.8836	-1.1948	-0.6072	-1.0829	-0.6369
	(1.2077)	(1.0517)	(1.0449)	(0.7573)	(0.6877)	(0.7487)
Constant	0.1141***	0.1630***	0.0982***	0.1157***	0.1633***	0.0942***
	(0.0281)	(0.0208)	(0.0186)	(0.0281)	(0.0206)	(0.0185)
Observations	601,732	601,732	601,732	601,732	601,732	601,732
R-squared	0.2272	0.0926	0.1257	0.2272	0.0926	0.1257
Kontrol	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kabupaten FE	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Propinsi*Tahun FE	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Korelasi antar Pekerjaan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Pulau	Jawa	Jawa	Jawa	Jawa	Jawa	Jawa
Artificial Year	2013	2013	2013	2014	2014	2014

Robust standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1



**Lampiran 12. Uji plasebo estimasi alokasi dana desa per kapita dan jam kerja (Sumatera)**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VARIABLES	Pertanian	Manufaktur	Jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa
Dana Desa / Kapita	0.0284	-0.0047	-0.0283	-0.0171	0.0254	-0.0407
	(0.0752)	(0.0325)	(0.0545)	(0.0472)	(0.0228)	(0.0380)
(Dana Desa / Kapita) <sup>2</sup>	-0.0266	0.0057	0.0675	0.0196	-0.0385	0.0524
	(0.1212)	(0.0499)	(0.0842)	(0.0760)	(0.0357)	(0.0593)
Constant	-0.0659	0.0230	0.1115***	-0.0817**	0.0265	0.0975***
	(0.0407)	(0.0201)	(0.0312)	(0.0415)	(0.0206)	(0.0315)
Observations	595,562	595,562	595,562	595,562	595,562	595,562
R-squared	0.2915	0.0547	0.1380	0.2915	0.0547	0.1380
Kontrol	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kabupaten FE	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Propinsi*Tahun FE	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Korelasi antar Pekerjaan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Pulau	Sumatera	Sumatera	Sumatera	Sumatera	Sumatera	Sumatera
Artificial Year	2013	2013	2013	2014	2014	2014

Robust standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1





**Lampiran 13. Uji plasebo estimasi alokasi dana desa per kapita dan jam kerja  
(Indonesia Tengah dan Timur)**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VARIABLES	Pertanian	Manufaktur	Jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa
Dana Desa / Kapita	0.0044 (0.0126)	-0.0022 (0.0047)	0.0067 (0.0081)	0.0048 (0.0071)	0.0019 (0.0031)	0.0006 (0.0053)
(Dana Desa / Kapita) <sup>2</sup>	-0.0055 (0.0050)	0.0001 (0.0014)	-0.0030 (0.0026)	-0.0030 (0.0025)	-0.0007 (0.0009)	-0.0009 (0.0016)
Constant	0.0350 (0.0268)	0.1419*** (0.0125)	0.1450*** (0.0179)	0.0370 (0.0269)	0.1428*** (0.0125)	0.1394*** (0.0180)
Observations	870,511	870,511	870,511	870,511	870,511	870,511
R-squared	0.3094	0.0563	0.1656	0.3094	0.0563	0.1656
Kontrol	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kabupaten FE	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Propinsi*Tahun FE	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Korelasi antar Pekerjaan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Pulau	Tengah dan Timur	Tengah dan Timur	Tengah dan Timur	Tengah dan Timur	Tengah dan Timur	Tengah dan Timur
Artificial Year	2013	2013	2013	2014	2014	2014

Robust standard errors in parentheses

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1





---

## BIODATA SINGKAT PENULIS



**Irwanda Wisnu Wardhana** adalah peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Penulis mengawali karir sebagai auditor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2001 s.d. 2007. Penulis telah menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Texas (Amerika Serikat) pada tahun 2016, master di Universitas Hitotsubashi (Jepang) pada tahun 2010, dan sarjana di Politeknik Keuangan Negara STAN pada tahun 2005. Area penelitian yang ditekuni adalah kebijakan publik dan ekonomi politik. Selain meneliti, Wisnu aktif mengajar di kampus dan berbagai pelatihan. Wisnu dapat dihubungi melalui email: [irwanda.wisnu@fiskal.kemenkeu.go.id](mailto:irwanda.wisnu@fiskal.kemenkeu.go.id)



**Bondi Arifin**, peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan (S.ST) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan Sarjana Ekonomi (S.E) di Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Master of Sains* (M.Sc) diperoleh dari Universitas Gadjah Mada dan *Master of Art* (M.A) dari *Georgia State University* pada tahun 2014. Kemudian memperoleh *Doctor of Philosophy* (Ph.D) dari *Georgia State University* pada tahun 2017. Penulis juga asisten riset Profesor Thomas A. Mroz dan Dr. Daniel Kreisman pada saat melaksanakan studi doktoral di universitas yang sama. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan karir pekerjaan pertama penulis yang dimulai pada tahun 2004, sebelum bergabung di Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2011. Area penelitian berfokus pada bidang ekonomi kesehatan, ekonomi pendidikan, ekonomi pekerjaan dan ekonomi publik. Penulis menggunakan beberapa *software* statistik lainnya seperti STATA, R, dan SAS untuk melakukan analisis penelitian. Selain itu, *software* yang berhubungan dengan desain website seperti HTML, PHP, Javascript, CSS, SQL juga dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan penelitian.  
Email: [barifin@fiskal.kemenkeu.go.id](mailto:barifin@fiskal.kemenkeu.go.id)



**Eko Wicaksono**, peneliti di Badan Kebijakan Fiskal. Menamatkan Program Diploma IV Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2008 kemudian melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada dan *Georgia State University* dan memperoleh gelar *Mater of Science* dan *Master of Arts in Economics* pada tahun 2013. Topik utama yang ditekuninya adalah *Development Economics* khususnya terkait dengan kemiskinan dan *inequality*. Sangat familiar dengan data mikro rumah tangga Indonesia seperti *Indonesia Family Life Survey* dan *Susenas*. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan konferensi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional.

Email: [ewicaksono@fiskal.kemenkeu.go.id](mailto:ewicaksono@fiskal.kemenkeu.go.id)

---



**Rita Helbra Tenrini**, lahir di Watan Soppeng tanggal 19 Oktober 1975. Meraih gelar Magister Ekonomi (M.E.) dari Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2009. Karir penulis dimulai sebagai pegawai BUMN di PT.(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia pada tahun 1994. Pada tahun 2002 penulis beralih menjadi PNS pada Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan. Selanjutnya penulis menjadi peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan sejak tahun 2011. Topik penelitian yang menjadi minat penulis adalah di bidang kebijakan fiskal, terkait perpajakan, PNBPN, subsidi, kebijakan multilateral, pembiayaan perubahan iklim.

Email: [rhtenrini@fiskal.kemenkeu.go.id](mailto:rhtenrini@fiskal.kemenkeu.go.id)

---



**Praptono Djunedji**, ialah peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Meraih gelar Sarjana Sains Terapan (S.ST) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1997. Memperoleh gelar Magister Manajemen dari salah satu universitas di Jakarta pada tahun 2008. Bergabung ke Badan Kebijakan Fiskal (dahulu: Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional/BAPEKKI) sejak tahun 2004. Menekuni area penelitian di bidang kebijakan fiskal, terutama terkait dengan kebijakan belanja negara dan belanja daerah.

Email: [pdjunedji@fiskal.kemenkeu.go.id](mailto:pdjunedji@fiskal.kemenkeu.go.id)

---



**Sofia Arie Damayanty**, meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1998. Magister Ekonomi (M.E.) diperoleh dari Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2007. Penulis memulai karir sebagai PNS pada tahun 1999 di Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan. Selanjutnya penulis melanjutkan karir sebagai peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan sejak tahun 2011 hingga saat ini. Menekuni area penelitian di bidang kebijakan fiskal, terkait perpajakan, energi, infrastruktur, air bersih, dan industri ekstraktif.

Email: [sadamayanty@fiskal.kemenkeu.go.id](mailto:sadamayanty@fiskal.kemenkeu.go.id)

---



**Hadi Setiawan**, ialah peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Meraih gelar Sarjana Sains Terapan (S.S.T) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2005 dan Sarjana Ekonomi (S.E) di STIE DR. Moechtar Talib pada tahun 2006. *Master of Accounting* diperoleh dari UGM pada tahun 2010. Penulis memulai karir sebagai PNS pada tahun 2000 di Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan. Kemudian melanjutkan karir sebagai peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan pada tahun 2011. Menekuni area penelitian di bidang kebijakan fiskal, terutama yang terkait dengan perpajakan, kebijakan energi, infrastruktur, dan keuangan daerah.

Email: [hsetiawan@fiskal.kemenkeu.go.id](mailto:hsetiawan@fiskal.kemenkeu.go.id)

---



**Rudi Handoko**, peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan R.I. Meraih gelar Ajun Akuntan dan Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan kemudian melanjutkan studinya di *Asian Public Policy Program, Hitotsubashi University, Tokyo, Jepang* dengan gelar *Master of Public Policy (MPP)*. Meminati bidang penelitian terkait ekonomi makro dan kebijakan fiskal, Email: [rhandoko@fiskal.kemenkeu.go.id](mailto:rhandoko@fiskal.kemenkeu.go.id) dan [rhandoko@gmail.com](mailto:rhandoko@gmail.com)

---



**Arif Budi Rahman** menyelesaikan studi S1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1995. Memperoleh gelar MA dari *Murdoch University* pada tahun 2009 dan PhD dari *Curtin University Sustainability Policy Institute* di Perth Australia pada tahun 2018. Email: [abrahman@fiskal.kemenkeu.go.id](mailto:abrahman@fiskal.kemenkeu.go.id)

---



**Maman Suhendra**, dosen pada Jurusan Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN sejak November 2016. Sebelumnya pernah bertugas dalam beberapa jabatan struktural pada Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Penyandang *Chartered Accountant (CA)* ini meraih gelar Ahli Madya dan Sarjana Sains Terapan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Kemudian melanjutkan studi master di *Korean Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management, Seoul, Korea Selatan* dan berhasil meraih gelar *Master of Public Policy (MPP)* pada konsentrasi *Public Finance and Local Administration*. Meminati bidang penelitian terkait keuangan publik dan pembiayaan infrastruktur, Email: [msuhendra@pknstan.ac.id](mailto:msuhendra@pknstan.ac.id)

---



**Akhmad Solikin aka Akhsol**, lulus Diploma III Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1995, kemudian bekerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Melanjutkan pendidikan S1 jurusan Akuntansi pada Program Extension FEUI lulus 1999. Kemudian memperoleh beasiswa S2 ke *Hiroshima University*, Jepang, pada bidang *International Development And Cooperation*, lulus 2004. Sebentar bertugas pada Pusdiklat Pegawai di Magelang sebagai unit penyelenggara diklat kepemimpinan Kemenkeu, sebelum pindah ke Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN), Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Selama di PKPN bertugas menganalisis PNBPN dan kemudian perpajakan internasional. Pendidikan S3 ditempuh di *Ruhr University Bochum (RUB)*, NRW, Jerman, pada bidang *International Development Studies*, lulus 2015. Setelah lulus S3, bekerja kembali di PKPN BKF dengan tugas menganalisis tarif bea masuk, sebelum mutasi sebagai dosen pada Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), BPPK, mulai 2017. Di PKN STAN mengajar matakuliah Keuangan Publik, Ekonomi Mikro, dan Ekonomi Makro serta tertarik meneliti terkait ekonomi/keuangan publik, ekonomi pembangunan, ekonomi lingkungan, serta *governance*. Dapat dihubungi lewat [akhsol@pknstan.ac.id](mailto:akhsol@pknstan.ac.id) atau [akhsol@kemenkeu.go.id](mailto:akhsol@kemenkeu.go.id)

---



**Acwin Hendra Saputra**, dosen pada Jurusan Manajemen Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN sejak November 2016. Sebelumnya pernah bertugas dalam beberapa jabatan struktural pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Meraih gelar Ahli Madya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), gelar Sarjana Ekonomi diperoleh dari Universitas Satya Negara Indonesia kemudian melanjutkan studi master pada Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Meminati bidang penelitian terkait keuangan publik dan ekonomi regional, Email: [acwin@pknstan.ac.id](mailto:acwin@pknstan.ac.id)

---



**I Gede Agus Ariutama**, dosen pada Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan. Meraih gelar Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2007 dan kemudian melanjutkan S2 di *Public Management and Policy Analysis Program (PMPP)*, *International University of Japan* dengan gelar *Master of Arts (M.A)* pada tahun 2014. Meminati bidang penelitian terkait ekonomi makro, kebijakan fiskal dan keuangan publik. Email: [igedeagus@pknstan.ac.id](mailto:igedeagus@pknstan.ac.id)

---





**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Gd. R.M. Notohamiprodjo  
Jl. Dr Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat - 10710  
Telp. +62 21 3441484

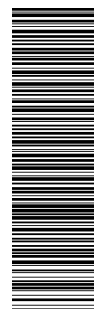
[www.fiskal.kemenkeu.go.id](http://www.fiskal.kemenkeu.go.id)



**POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN**

Jl. Bintaro Utama Sektor V  
Banten - 15222  
Telp. +62 21 7361654

[www.pknstan.ac.id](http://www.pknstan.ac.id)



ISBN 978-602-53083-1-4